

Laporan Perekonomian

# Provinsi Kalimantan Timur



**2026**  
**FEBRUARI**



Laporan Perekonomian

# Provinsi Kalimantan Timur



**2026**  
FEBRUARI



Publikasi ini dapat diakses secara online pada:  
<https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/default.aspx>

Salinan publikasi dalam bentuk *hardcopy* dapat diperoleh di:

**Fungsi Perumusan Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur**

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur

Jl. Gajah Mada No. 1

Samarinda 75122, Kalimantan Timur

Telp: 0542 - 741 022, 741 023

Fax: 0542 - 732 644



Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Kalimantan Timur (Kaltim) merupakan hasil asesmen perkembangan perekonomian yang dilakukan setiap triwulan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltim. Laporan ini memuat informasi terkini mengenai kondisi ekonomi makro daerah, keuangan pemerintah, inflasi, stabilitas sistem keuangan daerah, sistem pembayaran, ketenagakerjaan dan kesejahteraan, serta prospek perekonomian ke depan. Laporan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi *stakeholders* baik untuk tujuan penyusunan kajian, sosialisasi maupun perumusan kebijakan.

Secara umum, ekonomi Kaltim pada triwulan IV 2025 tumbuh 5,04% (yoy), atau lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi triwulan sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Kaltim pada periode pelaporan didorong utamanya oleh kinerja Lapangan Usaha (LU) Industri Pengolahan, Perdagangan, dan Pertambangan. Kinerja LU Industri Pengolahan tumbuh lebih tinggi, ditopang oleh peningkatan kapasitas produksi seiring beroperasinya sejumlah pabrik pengolahan sepanjang tahun 2025. LU Perdagangan juga menguat sejalan dengan meningkatnya aktivitas konsumsi masyarakat pada momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru). Peningkatan permintaan masyarakat di akhir tahun 2025, mendorong tekanan inflasi Kaltim pada periode laporan tercatat meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Sejumlah komoditas yang tercatat mengalami peningkatan harga diantaranya adalah komoditas bahan makanan dan harga emas perhiasan. Sejalan dengan perbaikan kondisi ekonomi, stabilitas sistem keuangan di Kaltim juga tumbuh baik sepanjang triwulan laporan. Kondisi tersebut tercermin dari penyaluran kredit perbankan yang meningkat, ditengah rasio *non performing loan* (NPL) yang berada di bawah *threshold* 5%. Meski demikian, DPK Perbankan Kaltim jutsru

mengalami kontraksi yang mengindikasikan adanya adanya penurunan simpanan dari individu dan pelaku ekonomi lainnya. Sementara itu dari sisi sistem pembayaran, transaksi sistem pembayaran melalui infrastruktur Bank Indonesia tumbuh positif, didukung perkembangan pembayaran nontunai digital retail melalui Uang Elektronik (UE) dan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS).

Analisis dalam laporan ini menggunakan berbagai data dan informasi yang diperoleh dari kegiatan dan laporan survei, *focus group discussion* (FGD), serta *liaison* Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltim. Data dimaksud juga termasuk hasil pengolahan berbagai data sekunder dan informasi yang diperoleh dari hasil kerjasama dengan berbagai pihak, baik dari kalangan Pemerintah maupun swasta. Kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar besarnya kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam penyusunan laporan ini. Laporan ini juga merupakan salah satu wujud dari hubungan kemitraan strategis yang telah terjalin dengan baik dan semoga dapat ditingkatkan di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan dan petunjuk kepada kita semua dalam upaya mengembangkan ekonomi Kalimantan Timur guna mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya menuju Indonesia maju.

Samarinda, Februari 2026  
KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Ttd.

**Jajang Hermawan**  
Kepala Perwakilan

## VISI BANK INDONESIA

- Menjadi bank sentral digital terdepan dengan tata kelola kuat yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara *emerging markets* untuk Indonesia Maju.

## MISI BANK INDONESIA

1. Mencapai stabilitas nilai rupiah melalui efektivitas penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
2. Memelihara stabilitas sistem pembayaran melalui penetapan kebijakan, pengaturan, perizinan, penyelenggaraan, pengawasan sistem pembayaran, dan pengelolaan uang rupiah, termasuk memfasilitasi percepatan ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
3. Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui penetapan dan pelaksanaan kebijakan makroprudensial dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
4. Turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan Pemerintah pusat dan daerah, otoritas atau lembaga terkait, dan/atau mitra strategis lain, serta kerja sama internasional;
5. Turut meningkatkan pendalaman pasar keuangan melalui pengaturan, pengawasan, dan pengembangan pasar uang dan pasar valas, termasuk infrastrukturnya, untuk memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan mendukung pembiayaan ekonomi nasional;
6. Turut meningkatkan inklusi ekonomi-keuangan, dan keuangan berkelanjutan, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, serta perlindungan konsumen melalui perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja Bank Indonesia; dan
7. Mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan, yang mengutamakan Sistem Tata Kelola Kebijakan dan Kelembagaan Bank Indonesia yang baik dan profesional, melalui pengelolaan organisasi dan sumber daya.

## NILAI-NILAI STRATEGIS BANK INDONESIA

- Nilai-nilai strategis Bank Indonesia adalah: (i) kejujuran dan integritas (*trust and integrity*); (ii) profesionalisme (*professionalism*); (iii) keunggulan (*excellence*); (iv) mengutamakan kepentingan umum (*public interest*); dan (v) koordinasi dan kerja sama tim (*coordination and teamwork*) yang berlandaskan keluhuran nilai-nilai agama (religi).



KATA PENGANTAR	iii
VISI BANK INDONESIA	iv
MISI BANK INDONESIA	iv
NILAI-NILAI STRATEGIS BANK INDONESIA	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GRAFIK	viii
DAFTAR GAMBAR	xii
RINGKASAN EKSEKUTIF	xvii

<b>I. PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH</b>	<b>1</b>	3.3.3. Kelancaran Distribusi	37
1.1. Gambaran Umum	2	3.3.4. Komunikasi Efektif	37
1.2. Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Lapangan Usaha	3	BOKS 1: MANDAU KALTIM - Pengendalian Inflasi berbasis <i>artificial intelligence</i>	38
1.3. Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Pengeluaran	8		
<b>II. KEUANGAN PEMERINTAH DI DAERAH</b>	<b>17</b>	<b>IV. PEMBIAYAAN DAERAH SERTA PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM</b>	<b>41</b>
2.1. Gambaran Umum	18	4.1. Gambaran Umum	42
2.2. Realisasi Belanja dan Pendapatan Provinsi	19	4.2. Perkembangan Stabilitas Sistem Keuangan Daerah	42
2.3. Realisasi Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota	22	4.2.1. Perkembangan Penyaluran Kredit dan Dana Pihak Ketiga	42
2.4. Realisasi Pendapatan dan Belanja APBN Wilayah Kaltim	24	4.2.2. Perkembangan Pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga Syariah	46
		4.2.3. Asesmen Stabilitas Keuangan Korporasi di Kaltim	49
<b>III. PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH</b>	<b>29</b>	4.2.4. Asesmen Stabilitas Keuangan Rumah Tangga	50
3.1. Gambaran Umum	30	4.2.5. Perkembangan Dana Pihak Ketiga Pemerintah Daerah	51
3.1.1. Perkembangan Inflasi Daerah Berdasarkan Kelompok Pengeluaran	31	4.3. Perkembangan Penyaluran Kredit UMKM	52
3.1.2. Perkembangan Inflasi Daerah Berdasarkan Kabupaten/Kota IHK	32	4.3.1. Perkembangan Kredit UMKM Spasial	53
3.2. <i>Tracking</i> Inflasi Triwulan I 2026	34		
3.3. Program Pengendalian Inflasi Daerah	36		
3.3.1. Keterjangkauan Harga	36		
3.3.2. Ketersediaan Pasokan	37		

# Daftar isi

<b>V. PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH</b>	<b>55</b>	<b>VI. KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN</b>	<b>67</b>
5.1. Gambaran Umum	56	6.1. Gambaran Umum	68
5.2. Sistem Pembayaran yang Diselenggarakan Bank Indonesia	56	6.2. Ketenagakerjaan	68
5.2.1. Perkembangan Transaksi <i>Real Time Gross Settlement</i> (RTGS)	57	6.3. Kesejahteraan	70
5.2.2. Perkembangan Transaksi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)	58	<b>VII. PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH</b>	<b>75</b>
5.2.3. Perkembangan Transaksi BI-FAST	58	7.1. Prospek Pertumbuhan Ekonomi	76
5.3. Sistem Pembayaran Non Tunai Ritel	59	7.2. Prospek Inflasi	79
5.3.1. Perkembangan Transaksi APMK	59	<b>DAFTAR ISTILAH</b>	<b>81</b>
5.3.2. Perkembangan Transaksi Uang Elektronik	61	<b>TIM PENYUSUN LAPORAN</b>	<b>83</b>
5.3.3. Perkembangan Transaksi QRIS	62		
5.4. Pengelolaan Uang Rupiah	63		

# Daftar Tabel

## I. Perkembangan Ekonomi Makro Daerah

Tabel I.1	Pertumbuhan Ekonomi Kaltim Triwulan IV 2025 Berdasarkan Lapangan Usaha (yoy)	4
Tabel I.2	Pertumbuhan Ekonomi Kaltim Triwulan IV 2025 Berdasarkan Pengeluaran (yoy)	9
Tabel I.3	Realisasi Belanja APBD Kaltim	14
Tabel I.4	Realisasi Belanja APBN Kaltim	14

## II. Keuangan Pemerintah Di Daerah

Tabel II.1.	Realisasi Keuangan Pemerintah Daerah Kalimantan Timur	19
Tabel II.2.	Realisasi APBD Pemprov Kaltim Triwulan IV 2024 serta Triwulan III dan IV 2025	19
Tabel II.3.	Realisasi Belanja APBD Pemprov Kaltim Triwulan IV 2024 serta Triwulan III dan IV 2025	20
Tabel II.4.	Realisasi Pendapatan APBD Pemprov Kaltim Triwulan IV 2024 serta Triwulan III dan IV 2025	21
Tabel II.5.	Realisasi Belanja APBD Kabupaten /Kota Kaltim Triwulan IV 2024 serta Triwulan III dan IV 2025	23
Tabel II.6	Realisasi Pendapatan APBD Kabupaten/ Kota Kaltim Triwulan IV 2024 serta Triwulan III dan IV 2025	23
Tabel II.7.	Realisasi Pendapatan dan Belanja APBN di Kalimantan Timur Triwulan IV 2024, serta Triwulan III dan IV 2025	25
Tabel II.8	Realisasi Penyaluran Dana Desa per Pemerintah Daerah di Kalimantan Timur Triwulan III 2025	27

## III. Perkembangan Inflasi Daerah

Tabel III.1	Kelompok Barang Pembentuk Inflasi Kaltim (yoy)	31
Tabel III.2	Komoditas Utama Penyumbang Inflasi dan Deflasi Tahunan Provinsi Kaltim Triwulan IV 2025	32
Tabel III.3	Inflasi Kaltim dan Kota Pembentuk (% yoy)	33
Tabel III.4	Inflasi Kabupaten/Kota Pembentuk IHK di Kaltim Menurut Kelompok Barang	33
Tabel III.5	Inflasi Kaltim Menurut Kelompok Barang	35
Tabel III.6	Komoditas Utama Penyumbang Inflasi dan Deflasi Kaltim Januari 2026	35
Tabel III.7.	Program Pengendalian Inflasi Daerah Kaltim Periode Oktober - Desember 2025	37

## VI. Ketenagakerjaan Dan Kesejahteraan

Tabel VI.1	Angkatan Kerja dan Pengangguran Kaltim	68
Tabel VI.2	Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha	69
Tabel VI.3	Penduduk Yang Bekerja Berdasarkan Lapangan Usaha Kaltim	70
Tabel VI.4	Persentase Komoditas Makanan terhadap GKM	72
Tabel VI.5	Persentase Komoditas Nonmakanan terhadap GKNM	72

## VII. Prospek Perekonomian Daerah

Tabel VII.1	Proyeksi Pertumbuhan Global dan Domestik	76
Tabel VII.2	Proyeksi Inflasi Global dan Domestik	78

# Daftar Grafik

## I. Perkembangan Ekonomi Makro Daerah

Grafik I.1	Pertumbuhan Ekonomi Kaltim, Kalimantan & Nasional Triwulan IV 2025	2
Grafik I.2	Pertumbuhan 5 (lima) Lapangan Usaha Utama pada Triwulan IV 2025	4
Grafik I.3	Pangsa PDRB Kaltim Triwulan IV 2025 Berdasarkan Lapangan Usaha*)	4
Grafik I.4	Perkembangan Volume Ekspor Batu Bara Kaltim Triwulan IV 2025	5
Grafik I.5	Perkembangan Curah Hujan Kaltim	5
Grafik I.6	Perkembangan Kredit Pertambangan Kaltim Berdasarkan Lokasi Proyek	5
Grafik I.7	Perkembangan Produksi Batu Bara Tiongkok	5
Grafik I.8	Perkembangan Volume Ekspor CPO	6
Grafik I.9	Perkembangan Nilai Impor migas Berdasarkan Jenis Barang	6
Grafik I.10	Perkembangan Volume Ekspor CPO	6
Grafik I.11	Perkembangan Kredit Industri	6
Grafik I.12	Perkembangan Realisasi Anggaran IKN	7
Grafik I.13	Pengadaan Semen di Kaltim	7
Grafik I.14	Indeks Penjualan Riil Kaltim	7
Grafik I.15	Perkembangan tamu mancanegara di Kaltim	7
Grafik I.16	Perkembangan TPK Hotel Berbintang di Kaltim	8
Grafik I.17	Perkembangan tamu mancanegara di Kaltim	8
Grafik I.18	Perkembangan NTP Subsektor	8
Grafik I.19	Perkembangan Ekspor Perikanan	8
Grafik I.20	Pertumbuhan 5 (lima) Komponen Pengeluaran Utama Kaltim pada Triwulan IV 2025 (% yoy)	9
Grafik I.21	Pangsa PDRB Kaltim Berdasarkan Pengeluaran Triwulan IV 2025	9
Grafik I.22	Perkembangan Volume Ekspor Total	10
Grafik I.23	Perkembangan Volume Ekspor Batu Bara di 3 (Tiga) Negara Tujuan Utama	10
Grafik I.24	Perkembangan Harga Batu Bara Acuan Indonesia	10

Grafik I.25	Perkembangan Nilai Ekspor Hasil Migas dan Nonmigas	10
Grafik I.26	Perkembangan Nilai Impor Migas dan Nonmigas Kaltim	11
Grafik I.27	Perkembangan Nilai Impor Nonmigas Berdasarkan Jenis Barang	11
Grafik I.28	Perkembangan Nilai Impor migas Berdasarkan Jenis Barang	11
Grafik I.29	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Kaltim	11
Grafik I.30	Penanaman Modal Asing (PMA) Kaltim	11
Grafik I.31	Perkembangan IKK, IEK, dan IKE	12
Grafik I.32	Perkembangan Komponen IKE	12
Grafik I.33	Perkembangan Komponen IEK	12
Grafik I.34	Realisasi belanja APBD Kaltim selain Belanja Modal	13
Grafik I.35	Realisasi belanja Operasional dan Belanja Transfer APBD Kaltim	13
Grafik I.36	Realisasi belanja pegawai dan Belanja Barang APBD Kaltim	13
Grafik I.37	Realisasi belanja bantuan sosial dan belanja hibah APBD Kaltim	13

## II. Keuangan Pemerintah Di Daerah

Grafik II.1	Komponen Realisasi Belanja APBD Pemprov Kaltim Triwulan IV 2024 dan 2025 (dalam %) 21	
Grafik II.2	Komponen Realisasi Pendapatan APBD Pemprov Kaltim (dalam %)	22
Grafik II.3	Derajat Otonomi Fiskal Pemprov Kaltim	22
Grafik II.4	Derajat Otonomi Fiskal Pemerintah Kab/Kota	24

## III. Perkembangan Inflasi Daerah

Grafik III.1	Inflasi Kaltim dan Nasional	30
Grafik III.2	Kelompok Utama Pendorong Inflasi Kaltim	30
Grafik III.3	Perbandingan Inflasi Gabungan Kota IHK di seluruh Provinsi di Kalimantan, triwulan III 2025 dan triwulan IV 2025	31

Grafik III.4	Inflasi Samarinda, Balikpapan, Berau, dan PPU	31
Grafik III.5	Inflasi Tahunan ( <i>year-on-year, yoy</i> ) Kaltim	34
Grafik III.6	Inflasi Bulanan ( <i>month-to-month, mtm</i> ) Kaltim	34

#### IV. Pembiayaan Daerah Serta Pengembangan

##### Akses Keuangan Dan Umkm

Grafik IV.1	Perkembangan Kredit Kaltim dan Nasional	43
Grafik IV.2	Perkembangan Kredit Kaltim Berdasarkan Penggunaannya	43
Grafik IV.3	Pangsa Penyaluran Kredit Berdasarkan Debitur	43
Grafik IV.4	Perkembangan NPL Kredit Kaltim Berdasarkan Penggunaannya	43
Grafik IV.5	Perkembangan Kredit Sektoral Kaltim	44
Grafik IV.6	<i>Share</i> Kredit Kaltim Berdasarkan Sektor	44
Grafik IV.7	Perkembangan NPL Kaltim Berdasarkan Sektor	44
Grafik IV.8	Pertumbuhan Kredit Spasial Kabupaten/ Kota di Wilayah Kaltim	45
Grafik IV.9	Perkembangan NPL Spasial Kabupaten/ Kota di Wilayah Kaltim	45
Grafik IV.10	Pangsa Kredit Spasial Kabupaten/Kota di Kaltim	45
Grafik IV.11	Perkembangan DPK Kaltim dan Nasional	45
Grafik IV.12	Perkembangan DPK Kaltim Berdasarkan Sumbernya	46
Grafik IV.13	Pangsa DPK Kaltim Berdasarkan Sumber	46
Grafik IV.14	Pangsa DPK Kaltim Berdasarkan Golongan Nasabah	46
Grafik IV.15	Perkembangan DPK Perseorangan Kaltim	46
Grafik IV.16	Perkembangan Pembiayaan Syariah Kaltim	46
Grafik IV.17	Perkembangan Pangsa Pembiayaan Syariah Kaltim	46
Grafik IV.18	Perkembangan Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Jenis Penggunaan	47
Grafik IV.19	Perkembangan NPF Kaltim Berdasarkan Penggunaannya	47
Grafik IV.20	Pertumbuhan Pembiayaan Syariah Spasial Kabupaten/Kota di Wilayah Kaltim	47
Grafik IV.21	Perkembangan NPF Spasial Kabupaten/ Kota di Wilayah Kaltim	48
Grafik IV.22	Pangsa Pembiayaan Syariah Spasial Kabupaten/Kota di Kaltim	48
Grafik IV.23	Perkembangan DPK Syariah Kaltim	48
Grafik IV.24	Perkembangan DPK Syariah Kaltim berdasarkan Komponen Pembentuk	49
Grafik IV.25	Pangsa DPK Syariah Kaltim berdasarkan Komponen Pembentuk	49
Grafik IV.26	Pangsa DPK Syariah dan Non Syariah Kaltim	49
Grafik IV.27	Perkembangan Kredit Korporasi Kaltim	49
Grafik IV.28	Perkembangan NPL Korporasi Kaltim	49
Grafik IV.29	Perkembangan DPK Korporasi Kaltim	50
Grafik IV.30	Perkembangan DPK Korporasi Kaltim Berdasarkan Komponennya	50
Grafik IV.31	Pangsa DPK Korporasi Kaltim	50
Grafik IV.32	Perkembangan Kredit Rumah Tangga Kaltim	50
Grafik IV.33	Perkembangan Kredit Rumah Tangga Kaltim Berdasarkan Jenis Penggunaannya	50
Grafik IV.34	NPL Kredit Rumah Tangga Kaltim	50
Grafik IV.35	NPL Kredit Rumah Tangga Kaltim Berdasarkan Jenis Penggunaannya	51
Grafik IV.36	Perkembangan DPK Pemerintah Daerah Kaltim	51
Grafik IV.37	Perkembangan DPK Pemerintah Daerah Kaltim Berdasarkan Komponennya	51
Grafik IV.38	Pangsa DPK Pemerintah Daerah Kaltim Berdasarkan Komponennya	51
Grafik IV.39	Perkembangan Kredit UMKM Kaltim dan Nasional	52
Grafik IV.40	Perkembangan Kredit UMKM Kaltim berdasarkan Jenis Penggunaan	52
Grafik IV.41	Perkembangan NPL UMKM Kaltim	52

Grafik IV.42	Perkembangan NPL UMKM Kaltim berdasarkan Jenis Penggunaan	52
Grafik IV.43	Pertumbuhan Kredit UMKM Spasial Kabupaten/Kota di Wilayah Kaltim	53
Grafik IV.44	Perkembangan NPL UMKM Spasial Kabupaten/Kota di Wilayah Kaltim	53
Grafik IV.45	Pangsa Kredit UMKM Spasial Kabupaten/Kota di Kaltim	53
<b>V. Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Dan Pengelolaan Uang Rupiah</b>		
Grafik V.1	Perkembangan Nominal Transaksi Melalui Sistem Pembayaran Bank Indonesia di Provinsi Kaltim	56
Grafik V.2	Perkembangan Volume Transaksi Melalui Sistem Pembayaran Bank Indonesia di Provinsi Kaltim (% yoy)	57
Grafik V.3	Transaksi Melalui Sistem Pembayaran Bank Indonesia di Kaltim Berdasarkan Infrastruktur	57
Grafik V.4	Perkembangan Nominal Transaksi RTGS di Provinsi Kaltim	57
Grafik V.5	Perkembangan Volume Transaksi RTGS di Provinsi Kaltim	57
Grafik V.6	Perkembangan Nominal Transaksi SKNBI di Provinsi Kaltim	58
Grafik V.7	Perkembangan Volume Transaksi SKNBI di Provinsi Kaltim	58
Grafik V.8	Perkembangan Nominal Transaksi BI-FAST di Provinsi Kaltim	58
Grafik V.9	Perkembangan Volume Transaksi SKNBI di Provinsi Kaltim	59
Grafik V.10	Perkembangan Nominal Transaksi APMK di Provinsi Kaltim	59
Grafik V.11	Perkembangan Volume Transaksi APMK di Provinsi Kaltim	59
Grafik V.12	Perkembangan Nominal Transaksi Kartu Kredit di Provinsi Kaltim	60
Grafik V.13	Perkembangan Volume Transaksi Kartu Kredit di Provinsi Kaltim	60

Grafik V.14	Distribusi Nominal Transaksi Kartu Kredit di Provinsi Kaltim	60
Grafik V.15	Distribusi Volume Transaksi Kartu Kredit di Provinsi Kaltim	60
Grafik V.16	Perkembangan Nominal Transaksi Kartu ATM/Debit di Provinsi Kaltim	61
Grafik V.17	Perkembangan Volume Transaksi Kartu ATM/Debit di Provinsi Kaltim	61
Grafik V.18	Distribusi Nominal Transaksi Kartu ATM/Debit di Provinsi Kaltim Triwulan IV 2025	61
Grafik V.19	Distribusi Volume Transaksi Kartu ATM/Debit di Provinsi Kaltim Triwulan IV 2025	61
Grafik V.20	Perkembangan Nominal Transaksi Uang Elektronik di Provinsi Kaltim	62
Grafik V.21	Perkembangan Volume Transaksi Uang Elektronik di Provinsi Kaltim	62
Grafik V.22	Perkembangan Jumlah Akun Uang Elektronik di Provinsi Kaltim	62
Grafik V.23	Jumlah Pengguna QRIS di Provinsi Kaltim	63
Grafik V.24	Jumlah <i>Merchant</i> QRIS di Provinsi Kaltim	63
Grafik V.25	Perkembangan Nominal Transaksi QRIS di Provinsi Kaltim	63
Grafik V.26	Perkembangan Volume Transaksi QRIS di Provinsi Kaltim	63
Grafik V.27	Pengedaran Uang Kartal di Provinsi Kaltim	63
Grafik V.28	Uang Kartal di Provinsi Kaltim - Spasial	64
Grafik V.29	<i>Dropping</i> ULE dan <i>inflow</i> UTLE	64
Grafik V.30	Penarikan Uang Tidak Layak Edar di Provinsi Kaltim	64
Grafik V.31	Penarikan Uang Tidak Layak Edar terhadap <i>Inflow</i> di Provinsi Kaltim	64

## VI. Ketenagakerjaan Dan Kesejahteraan

Grafik VI.1	Perbandingan TPT Kaltim dan Provinsi Lainnya di Kalimantan	69
Grafik VI.3	Tenaga Kerja Kaltim Berdasarkan Sektor Formal dan Informal	69
Grafik VI.2	Perbandingan TPAK Kaltim dan Provinsi Lainnya di Kalimantan	69

Grafik VI.4	Perbandingan Proporsi Tenaga Kerja Formal dan Informal Seluruh Provinsi di Kalimantan	69
Grafik VI.5	Jumlah Penduduk Miskin Kalimantan Timur	71
Grafik VI.7	Garis Kemiskinan Kalimantan Timur	71
Grafik VI.6	Perbandingan Rasio Gini Seluruh Provinsi di Kalimantan	71
Grafik VI.8	Pertumbuhan GKM dan GKNM	71
Grafik VI.9	Perkembangan NTP, IT, dan IB Kaltim	72
Grafik VI.10	Perkembangan NTP Sub Sektor Pertanian	72

## VII. Prospek Perekonomian Daerah

Grafik VII.1	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kaltim 2026	77
Grafik VII.2	Proyeksi Inflasi Kaltim 2026	79

# Daftar Gambar

Gambar I.1	Pertumbuhan Ekonomi Tiap Provinsi di Kalimantan Triwulan IV 2025	2
Gambar III.1	Peta Prakiraan Curah Hujan Kaltim Maret 2026	36

Gambar III.2	Peta Prakiraan Daerah Potensi Banjir Kaltim Maret 2026	36
Gambar III.3	Peta Anomali Suhu Muka Laut Dasarian II Februari 2026	36

# Tabel Indikator Makroekonomi

## PERTUMBUHAN EKONOMI

Komponen PDRB	2023				2024				2025				andil %yoy	share %
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV		
	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy		
<b>PDRB TOTAL</b>	<b>6,99</b>	<b>6,89</b>	<b>5,30</b>	<b>5,76</b>	<b>7,26</b>	<b>5,85</b>	<b>5,52</b>	<b>6,12</b>	<b>4,08</b>	<b>4,69</b>	<b>4,26</b>	<b>5,04</b>	<b>5,04</b>	<b>100,00</b>
<b>Berdasarkan Lapangan Usaha</b>														
Pertanian	2,96	1,19	2,35	3,49	3,77	3,04	-1,24	3,95	5,79	8,64	8,62	7,77	0,48	9,61
Pertambangan	5,09	5,21	3,26	7,17	10,47	6,24	5,65	4,93	-0,58	-0,13	-0,19	0,45	0,21	33,92
Industri Pengolahan	7,00	4,97	7,05	0,12	-0,47	-1,99	-0,15	3,58	8,31	15,01	13,46	13,89	2,53	20,06
Listrik dan Gas	19,57	20,06	16,57	9,39	17,09	18,96	18,74	11,33	6,51	5,12	5,28	6,83	0,01	0,07
Air	7,09	6,47	7,89	9,05	9,12	8,79	6,76	6,32	5,23	6,41	8,90	9,32	0,01	0,06
Konstruksi	16,73	20,47	14,22	12,63	12,26	17,28	13,98	11,11	3,87	-0,11	-1,39	-2,69	-0,25	11,50
Perdagangan	9,91	7,44	6,22	4,11	6,34	8,89	9,32	9,66	12,99	9,91	8,48	12,80	0,78	7,74
Transportasi dan Pergudangan	11,81	13,81	8,81	4,36	5,59	5,26	10,12	11,69	13,36	6,58	5,82	8,73	0,28	4,77
Akomodasi dan Makan Minum	7,66	6,84	7,63	8,59	9,18	11,88	12,05	13,19	13,73	9,97	12,32	15,96	0,16	1,31
Informasi dan Komunikasi	6,89	8,03	8,06	4,62	5,54	7,41	8,75	9,95	8,96	6,98	7,09	13,81	0,27	1,67
Jasa Keuangan	12,99	20,26	2,44	12,60	6,54	3,40	9,69	6,99	3,71	1,62	-6,19	-6,56	-0,11	1,83
Real Estate	4,67	4,64	5,04	3,22	3,74	5,13	5,98	8,60	8,61	7,54	7,52	9,94	0,08	0,88
Jasa Perusahaan	9,21	6,89	4,62	6,06	6,69	6,53	7,91	9,03	6,50	9,89	8,58	12,07	0,02	0,25
Adm. Pemerintahan	8,34	12,94	0,78	10,48	14,19	25,86	13,87	12,37	13,26	2,83	13,85	12,89	0,25	2,42
Jasa Pendidikan	4,88	4,97	3,77	5,74	5,16	5,89	3,98	6,25	6,19	6,96	9,79	9,89	0,15	1,96
Jasa Kesehatan dan Sosial	6,73	8,96	7,56	4,42	3,73	4,07	5,73	6,23	8,46	8,72	8,87	13,62	0,11	1,04
Jasa lainnya	7,16	8,31	8,79	7,60	5,69	9,58	13,81	13,48	12,22	13,96	8,97	14,92	0,09	0,91
<b>Berdasarkan Penggunaan</b>													<b>5,04</b>	<b>100,00</b>
Konsumsi Rumah Tangga	5,08	5,13	4,52	5,22	5,27	5,16	4,48	4,36	5,36	4,58	4,53	5,67	0,80	17,61
Konsumsi LNPRT	5,02	5,94	0,53	11,02	18,12	14,85	4,97	7,63	-1,63	3,92	4,93	-1,36	-0,01	0,53
Konsumsi Pemerintah	26,10	37,82	38,42	38,15	14,75	26,19	5,37	5,29	6,75	-17,41	3,20	-18,92	-1,28	7,06
PMTB	11,80	14,76	11,17	8,58	7,29	9,69	9,22	7,04	2,56	1,72	2,54	1,25	0,38	35,96
Perubahan Inventori	894,46	-7,07	70,95	-38,51	48,28	43,88	77,85	-117,31	-91,86	-83,74	-96,94	-989,14	0,02	0,01
Ekspor	10,92	4,76	1,62	6,03	7,14	5,56	6,90	7,47	5,81	7,15	5,53	5,62	6,32	116,59
Impor*)	17,97	7,50	2,58	10,37	6,95	8,48	9,82	8,40	6,82	5,93	5,61	1,89	1,18	77,76

\*)Sejak tahun 2020, perhitungan PDRB ekspor impor mengalami perubahan dari komponen ekspor luar negeri (LN), impor luar negeri (LN), dan net ekspor antar daerah (AD) menjadi komponen ekspor dan impor.

sumber: BPS Provinsi Kaltim, diolah

## EKSPOR DAN IMPOR

Ekspor dan Impor	2023				2024				2025			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy
<b>EKSPOR TOTAL</b>	<b>29,29</b>	<b>-33,02</b>	<b>-44,89</b>	<b>-31,87</b>	<b>-25,44</b>	<b>-5,66</b>	<b>-2,71</b>	<b>5,92</b>	<b>-12,30</b>	<b>-22,43</b>	<b>-8,68</b>	<b>-13,90</b>
Ekspor Migas	32,58	-21,58	-18,93	-26,00	-11,50	4,51	-39,61	33,22	-10,45	-30,43	20,27	-33,33
Ekspor Nonmigas	28,99	-33,93	-47,14	-32,49	-26,76	-6,62	2,20	2,76	-12,51	-21,58	-10,96	-10,99
<b>TOTAL IMPOR</b>	<b>19,24</b>	<b>17,98</b>	<b>-8,63</b>	<b>-5,88</b>	<b>-18,59</b>	<b>-21,24</b>	<b>-6,75</b>	<b>1,14</b>	<b>21,54</b>	<b>6,58</b>	<b>-9,47</b>	<b>-7,12</b>
Impor Migas	30,58	18,77	-3,55	2,64	-16,89	-22,47	-15,47	-4,58	26,3	8,04	10,28	5,55
Impor Nonmigas	0,53	15,79	-19,15	-27,67	-22,23	-17,80	14,75	21,92	10,66	2,73	-45,35	-43,11

Sumber: BPS Provinsi Kaltim, diolah

## INFLASI

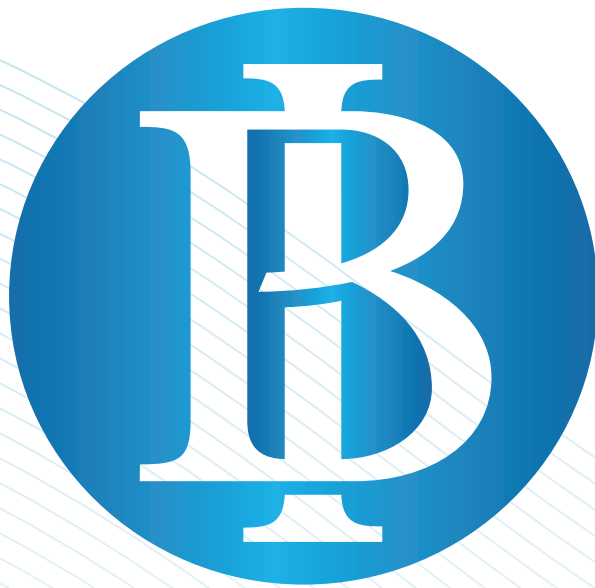
	2023				2024				2025			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Kaltim	5,24	3,76	3,06	3,46	3,03	2,99	2,16	1,47	1,36	1,62	1,77	2,68
Samarinda	5,03	3,67	3,14	3,37	2,84	2,88	1,79	1,50	1,29	1,77	2,16	2,70
Balikpapan	5,51	3,87	2,96	3,60	2,95	3,00	2,31	1,11	1,38	1,77	1,15	2,71
Berau					4,05	3,67	3,34	2,69	1,71	0,77	1,86	2,83
PPU					3,18	2,36	1,73	1,25	1,19	1,26	2,83	2,08
Nasional	4,97	3,52	2,28	2,61	3,05	2,51	1,84	1,57	1,03	1,87	2,65	2,92
Kalimantan	5,44	3,85	2,64	2,79	2,75	2,55	1,92	1,56	1,22	1,48	2,17	2,75
Kalsel	6,56	4,29	2,72	2,43	2,58	2,34	1,98	1,05	1,20	1,81	2,91	3,66
Kalbar	5,06	4,10	2,26	2,02	2,51	2,28	1,79	1,72	0,93	1,20	1,94	1,85
Kalteng	5,63	3,55	1,88	2,64	2,72	2,22	1,45	1,03	1,33	1,06	2,35	3,14
Kaltara	4,17	2,91	2,16	2,44	2,62	2,39	1,74	1,30	1,23	1,38	2,32	2,58

\*) Sejak tahun 2024, perhitungan Inflasi Kaltim menggunakan SBH 2022

umber: BPS Provinsi Kaltim, diolah

## PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN

Kinerja Perbankan dan Sistem Pembayaran	2023				2024				2025			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy
<b>DPK dan ASET</b>												
Dana Pihak Ketiga (KC/KCP)	25,69	17,39	18,53	6,45	6,09	8,52	5,08	8,67	3,43	-4,24	-2,33	-5,89
Giro	57,92	23,62	28,35	-6,95	3,47	6,43	0,01	5,76	-8,41	-21,14	-7,15	-15,40
Tabungan	10,81	10,96	9,26	9,50	13,69	10,68	11,21	11,62	9,77	7,46	4,56	2,10
Deposito	21,36	20,48	21,82	23,16	-1,67	7,83	2,56	7,35	6,83	-2,08	-7,18	-8,14
<b>KREDIT</b>												
Penyaluran Kredit (Lokasi Proyek)	19,22	16,34	10,93	12,60	9,52	5,54	7,25	4,05	3,03	-0,17	2,37	3,39
NPL (%)	1,44	1,38	1,32	1,11	1,28	1,17	1,24	1,08	1,2	1,81	1,36	1,33
<b>Berdasarkan Jenis Penggunaan</b>												
Modal Kerja	20,46	21,45	1,22	17,53	25,20	18,08	18,89	2,44	-1,32	-9,47	-2,29	3,02
Investasi	21,90	14,97	19,00	9,10	-1,39	-5,65	-3,43	1,23	2,55	2,6	3,51	2,50
Konsumsi	10,16	11,14	9,53	11,99	12,49	13,46	15,52	14,92	13,03	11,8	8,4	6,21
<b>Berdasarkan Sektor Ekonomi</b>												
Pertanian	11,52	-0,42	-1,39	-8,66	-6,76	-4,25	-3,08	2,81	-1,12	-4,44	-7,13	-7,68
Pertambangan	44,00	34,04	4,33	40,74	23,81	5,39	21,74	-9,36	-8,16	-20,52	-11,99	-0,60
Industri	56,02	66,26	65,11	18,56	17,32	11,72	-24,48	-8,82	-13,99	-9,72	22,2	12,08
Konstruksi	-0,97	-0,16	0,18	-2,60	3,48	3,31	2,98	-3,50	-6,03	-6,23	6,99	23,01
LGA	-0,28	-2,24	-0,43	-2,36	1,72	1,94	50,44	56,32	56,62	51,91	1,72	-4,11
PHR	13,40	18,28	19,91	11,14	7,72	3,37	6,46	3,36	-0,76	-2,28	-4,79	-2,00
Trans & Kom	29,15	35,60	57,76	39,48	36,99	32,63	21,92	59,00	66,93	62,66	62,72	30,21
J. Keuangan, R.E. dan J. Usaha	3,81	-11,93	-14,97	4,09	-2,26	-2,87	-11,41	-25,32	63,47	79,53	95,98	101,42
Lainnya	22,19	21,00	19,32	17,22	7,34	8,96	13,15	24,76	-50,65	-52,66	-55,26	-60,36
Rumah Tangga (Penerima Kredit Non LU)	9,46	10,72	8,96	11,59	12,10	12,60	15,13	14,32	20,15	19,47	15,54	5,90
<b>SISTEM PEMBAYARAN</b>												
Inflow	29,90	19,89	18,43	3,41	61,27	-18,57	-1,59	-6,36	-1,31	-4,78	-14,43	25,76
Outflow	27,35	22,54	-1,20	15,02	-46,25	-58,84	8,48	19,08	4,04	-49,31	2,76	-10,27
Net	35,01	26,76	-44,62	19,49	13,28	56,17	54,54	27,42	418,16	-503,97	52,86	-18,95



*Halaman ini sengaja dikosongkan*



# RINGKASAN EKSEKUTIF

## LAPORAN PEREKONOMIAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Februari 2026

## PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH

**Ekonomi Kalimantan Timur (Kaltim) pada triwulan IV 2025 tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, sejalan dengan kinerja ekonomi nasional dan regional Kalimantan.** Pertumbuhan ekonomi Kaltim tercatat sebesar 5,04% (yoy), atau lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencatatkan realisasi sebesar 4,26% (yoy). Peningkatan pertumbuhan ekonomi Kaltim pada periode pelaporan didorong oleh menguatnya kinerja Lapangan Usaha (LU) Industri Pengolahan, Perdagangan, dan Pertambangan. Kinerja LU Industri Pengolahan tumbuh lebih tinggi, ditopang oleh peningkatan kapasitas produksi seiring beroperasinya sejumlah pabrik pengolahan baru di tahun 2025. LU Perdagangan juga menguat sejalan dengan meningkatnya aktivitas konsumsi masyarakat pada momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru), didukung oleh meningkatnya aktivitas perdagangan, mobilitas masyarakat, dan kunjungan wisata. Sementara itu, LU Pertambangan mengalami peningkatan disebabkan oleh peningkatan kebutuhan energi dari negara mitra dagang seiring kondisi musim dingin yang terjadi. Di sisi lain, LU Konstruksi termoderasi seiring normalisasi progres pembangunan IKN pasca percepatan pada tahun sebelumnya. LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tetap tumbuh namun sedikit termoderasi, sejalan dengan melambatnya ekspor komoditas perkebunan dan perikanan pada periode pelaporan.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Kaltim ditopang oleh kinerja ekspor yang membaik serta konsumsi rumah tangga yang tetap terjaga. Di sisi lain, pertumbuhan komponen pengeluaran pemerintah cenderung termoderasi seiring normalisasi belanja. Secara keseluruhan, penguatan sektor industri pengolahan, perdagangan, dan pertambangan mendorong pertumbuhan ekonomi Kaltim pada triwulan IV 2025 lebih kuat.

## KEUANGAN PEMERINTAH DI DAERAH

**Kinerja fiskal Kaltim pada triwulan IV 2025 termoderasi dari sisi belanja,** tercermin dari realisasi belanja pemerintah (APBN, APBD provinsi, dan APBD kabupaten/kota) yang secara tahunan terkontraksi sebesar 24,37% (yoy), dibandingkan dengan triwulan III 2025 yang terkontraksi sebesar 9,86% (yoy). Perkembangan belanja terutama dipengaruhi oleh dinamika realisasi pada APBN dan APBD kabupaten/kota. Sementara itu, APBD provinsi menunjukkan perbaikan yang ditopang oleh peningkatan komponen transfer dan belanja modal.

Dari sisi pendapatan, realisasi pendapatan pemerintah pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar 82,37% dari pagu, termoderasi dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2024 yang mencapai pagu sebesar 95,87%. Secara struktur, belanja pemerintah di Kaltim masih didominasi oleh APBN, diikuti APBD kabupaten/kota dan APBD provinsi, sementara struktur pendapatan masih didominasi oleh pendapatan kabupaten/kota, diikuti APBN dan APBD provinsi.

## PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH

Inflasi Kaltim meningkat dibandingkan dengan realisasi triwulan sebelumnya namun masih terjaga dalam rentang target inflasi nasional. Inflasi Kaltim pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar 2,68% (yoy), atau lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan III 2025 yang sebesar 1,77% (yoy). Kondisi ini terjadi disebabkan oleh peningkatan tekanan harga komoditas bahan makanan serta harga emas perhiasan pada periode laporan. kondisi anomali cuaca berpengaruh terhadap penurunan produktivitas dan kelancaran distribusi beberapa komoditas pangan yang pada akhirnya mendorong tekanan harga kelompok ini. Namun demikian, laju inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan kelompok pakaian dan alas kaki. Secara spasial, kota sampel IHK Kaltim tertinggi terjadi di Kabupaten Berau dengan realisasi sebesar 2,82% (yoy), serta terendah tercatat di Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar 2,08% (yoy). Tren laju inflasi di seluruh Kabupaten/Kota tercatat meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya terkecuali Kabupaten Penajam Paser Utara.

## PEMBIAYAAN DI DAERAH SERTA PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM)

Kinerja fungsi intermediasi perbankan di Kaltim melanjutkan pertumbuhan positif dan meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Penyaluran kredit Kaltim pada triwulan IV 2025 tercatat tumbuh positif dan meningkat sebesar 3,39% (yoy) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang hanya tumbuh sebesar 2,37% (yoy). Perkembangan ini sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kaltim, yang mengindikasikan bahwa penguatan pembiayaan perbankan turut mendukung peningkatan aktivitas usaha di daerah. Penyaluran kredit yang tumbuh positif turut didukung oleh risiko kredit yang terjaga rendah, tercermin dari *rasio non performing loan* (NPL) yang berada di bawah *threshold* 5%. Di tengah peningkatan pertumbuhan kredit secara umum, DPK Kaltim mengalami kontraksi yang mengindikasikan bahwa likuiditas perbankan cenderung lebih ketat di tengah meningkatnya penyaluran pembiayaan. Adapun inklusivitas keuangan Kaltim cenderung stabil, tercermin dari kredit UMKM yang mengalami perbaikan dan pembiayaan syariah melambat namun tetap berada pada tingkat risiko yang rendah.

## SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

Transaksi sistem pembayaran di Kaltim melanjutkan tren peningkatan pada triwulan IV 2025, didorong oleh aktivitas ekonomi masyarakat yang masih terjaga. Hal ini tercermin dari pertumbuhan nominal transaksi yang melalui infrastruktur Bank Indonesia sebesar 15,04% (yoy) atau menjadi Rp121,14 triliun dan volume sebesar 6,14% (yoy) atau mencapai 26,93 juta transaksi. Pertumbuhan tersebut terutama ditopang oleh BI-FAST yang berkontribusi sekitar 53% terhadap total nominal transaksi dan tumbuh 1,52% (yoy). Kondisi ini menunjukkan peran yang semakin besar dalam transaksi ritel antarbank. Sementara itu, transaksi RTGS dan SKNBI secara nominal masing-masing terkontraksi 29,8% (yoy) dan 20,10% (yoy), mencerminkan penyesuaian komposisi

penggunaan instrumen pembayaran. Pada instrumen ritel, QRIS mencatat pertumbuhan signifikan dengan kenaikan nominal 88% (yoy) dan volume 108% (yoy), menandakan perluasan akseptasi khususnya di sektor UMKM, sementara APMK tetap tumbuh 7,28% (yoy) dari sisi nominal dengan volume relatif stabil. Dari sisi transaksi tunai, aliran uang kartal pada triwulan IV 2025 berada pada posisi *net outflow* sebesar Rp5,23 triliun, dengan *inflow* Rp1,96 triliun dan *outflow* Rp7,18 triliun, sejalan dengan meningkatnya kebutuhan uang tunai masyarakat di tengah aktivitas ekonomi yang tetap berlangsung.

## **KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN**

**Kondisi ketenagakerjaan Kaltim termoderasi di tengah peningkatan pertumbuhan ekonomi di triwulan IV 2025.** Meskipun pertumbuhan ekonomi di triwulan IV mengalami peningkatan, utamanya dari sektor industri pengolahan, hal belum berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja di Kaltim. Kondisi ini tercermin dari penurunan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) serta peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Namun demikian, kondisi kesejahteraan masyarakat menunjukkan indikator lebih baik, terindikasi dari penurunan tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan.

## **PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH**

**Dinamika perekonomian global dan domestik masih diwarnai ketidakpastian pasar keuangan serta moderasi permintaan eksternal, khususnya komoditas batu bara.** Di tengah tantangan tersebut, perekonomian Provinsi Kaltim pada 2026 diperkirakan tetap tumbuh dalam kisaran 4,50–5,30% (yoy), didorong oleh akselerasi pembangunan proyek pemerintah dan Ibu Kota Nusantara (IKN), serta penguatan kinerja industri pengolahan. Namun demikian, pertumbuhan tertahan oleh perlambatan Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalan seiring penurunan kuota produksi dan lemahnya permintaan ekspor dari negara mitra. Di sisi harga, inflasi tahunan Kaltim pada 2026 diperkirakan tetap berada dalam koridor target 2,5±1% (yoy), didukung stabilitas nilai tukar, terkendalinya tekanan inflasi global, serta penguatan sinergi pengendalian inflasi melalui TPID guna menjaga stabilitas harga komoditas utama di daerah.



*Halaman ini sengaja dikosongkan*

# 01

## Perkembangan Ekonomi Makro di Daerah





- Ekonomi Kalimantan Timur pada triwulan IV 2025 tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya, sejalan dengan realiasi pertumbuhan ekonomi nasional dan regional Kalimantan.
- (Lapangan Usaha) pertumbuhan ekonomi kaltim pada triwulan IV 2025 didorong oleh sektor Pertambangan, Industri Pengolahan, dan Perdagangan. Perbaikan kinerja sektor batu bara seiring meningkatnya permintaan komoditas energi negara mitra dagang pada siklus tahunan musim dingin di akhir tahun. Industri pengolahan tumbuh kuat didukung peningkatan kapasitas sejumlah pabrik pengolahan baru. Sementara itu, sektor perdagangan menguat seiring meningkatnya aktivitas perdagangan, mobilitas, kunjungan, dan permintaan barang/jasa pada momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru).
- (Pengeluaran) Ekonomi Kaltim pada sisi pengeluaran didorong oleh Komponen ekspor dan konsumsi RT di periode laporan. Peningkatan produksi produk industri unggulan mendorong komponen ekspor Kaltim meningkat pada triwulan laporan. Sejalan dengan kondisi sektor perdagangan, komponen konsumsi RT juga mengalami penguatan didorong oleh peningkatan permintaan domestik menjelang momeb HBKN Nataru. Disisi lain, tertahannya kinerja progress fisik Ibu Kota Nusantara (IKN) di periode laporan menjadi faktor penahan utama kinerja pertumbuhan ekonomi Kaltim dari sisi pengeluaran.

### 1.1. GAMBARAN UMUM

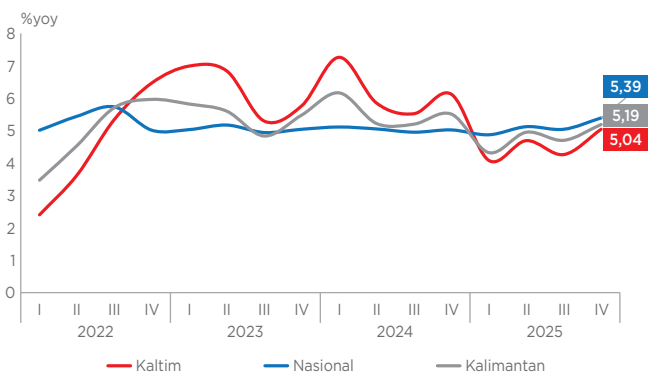
**Ekonomi Kalimantan Timur (Kaltim) pada triwulan IV 2025 tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional dan regional Kalimantan.** Pertumbuhan ekonomi Kaltim mengalami pertumbuhan sebesar 5,04% (yoy), atau lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar 4,26% (yoy). Kenaikan tersebut sejalan dengan kondisi ekonomi nasional yang juga meningkat dari 5,04% (yoy) di triwulan sebelumnya, menjadi 5,39% (yoy) di triwulan IV 2025. Hal yang sama juga terjadi di ekonomi regional Kalimantan yang juga tumbuh dari 4,70% (yoy) di triwulan lalu, dan menguat menjadi 5,19% (yoy) di triwulan IV 2025 (Grafik I.1). Meski pertumbuhan ekonomi Kaltim di periode laporan tercatat lebih rendah dibandingkan dengan regional Kalimantan, namun pangsa ekonomi Kaltim masih tertinggi diantara provinsi Kalimantan lainnya, yakni 46,02% (Gambar I.2).

**Pertumbuhan ekonomi Kaltim pada triwulan IV 2025 didorong utamanya oleh peningkatan kinerja Lapangan Usaha (LU) Industri pengolahan, Perdagangan dan pertambangan. Kondisi yang terjadi pada LU mendorong pertumbuhan pada komponen ekspor dan konsumsi RT dari sisi pengeluaran.** Kinerja LU industri pengolahan di dorong oleh peningkatan kapasitas produksi yang semakin kuat akibat penambahan sejumlah

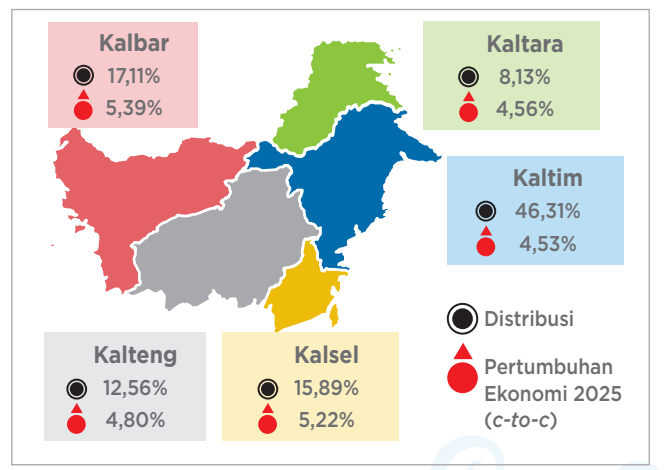
pabrik pengolahan baru yang beroperasi di tahun 2025. Sementara itu kinerja LU perdagangan meningkat di dorong oleh perbaikan aktivitas perdagangan seiring dengan momen hari besar Keagamaan Nasional Natal dan Tahun Baru (HBKN Nataru). Sementara itu, kinerja pada LU pertambangan, khususnya subsektor batu bara meningkat dipengaruhi oleh faktor musiman dan peningkatan permintaan dari negara mitra dagang seiring kebutuhan energi musim dingin. Di sisi komponen pengeluaran, perbaikan produksi komoditas utama industri dan sektor utama Kaltim pada periode laporan turut berdampak pada peningkatan aktivitas ekspor. Lebih lanjut, momen HBKN Nataru juga turut mendorong komponen konsumsi RT sejalan dengan perbaikan di LU perdagangan.

**Kinerja ekonomi Kaltim pada tahun 2025 tetap tumbuh solid meskipun termoderasi dibandingkan dengan tahun sebelumnya.** Perekonomian Kaltim pada tahun keseluruhan tahun 2025 tumbuh **4,53% (c-to-c)**, atau lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun 2024 yang sebesar **6,17% (c-to-c)**. Perlambatan ekonomi Kaltim sejalan dengan pertumbuhan regional kalimantan yang juga tumbuh melambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Meski demikian, ekonomi kaltim di keseluruhan tahun 2025 masih memegang pangsa terbesar di antara 4 (empat) provinsi lainnya di regional Kalimantan (Gambar I.1).

Grafik I.1 Pertumbuhan Ekonomi Kaltim, Kalimantan & Nasional Triwulan IV 2025



Gambar I.1 Pertumbuhan & Pangsa Ekonomi Tiap Provinsi di Kalimantan Triwulan IV 2025



Termoderasinya ekonomi Kaltim secara tahunan dari sisi Lapangan Usaha dipengaruhi oleh perlambatan pada LU Pertambangan dan Penggalian seiring tertahannya pertumbuhan subsektor batu bara, di tengah normalisasi harga komoditas global dan dinamika permintaan global. Sementara itu, kinerja LU Konstruksi juga cenderung moderat seiring normalisasi aktivitas pembangunan IKN dan pasca selesainya sejumlah proyek strategis pada akhir 2025. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan yang termoderasi turut dipengaruhi oleh komponen pengeluaran pemerintah yang mengalami kontraksi sejalan dengan implementasi *refocussing* dan normalisasi (pasca peningkatan realisasi proyek IKN di tahun 2024) belanja di keseluruhan tahun 2025. Meski demikian, pertumbuhan ekonomi Kaltim tetap terjaga seiring kinerja LU Industri pengolahan disisi lapangan usaha serta komponen ekspor serta konsumsi rumah tangga di sisi pengeluaran yang tetap baik di tahun 2025.

## 1.2. PERTUMBUHAN EKONOMI BERDASARKAN LAPANGAN USAHA

Dari sisi lapangan usaha (LU), **Pertumbuhan kinerja ekonomi Kaltim pada Periode triwulan IV 2025 didorong oleh LU pertambangan, industri pengolahan dan perdagangan (Grafik 1.2)**. Meningkatnya pertumbuhan kinerja LU pertambangan didorong oleh peningkatan aktivitas pertambangan batu bara seiring pemenuhan volume permintaan batu bara yang meningkat dari negara mitra dagang, khususnya untuk memenuhi kebutuhan energi di musim dingin. LU industri pengolahan juga mengalami perbaikan kinerja didorong oleh peningkatan aktivitas pengolahan migas pasca meningkatnya kapasitas kilang pada triwulan IV 2025. Perbaikan aktivitas perdagangan, mobilitas masyarakat serta peningkatan kunjungan wisata di momen HBKN juga turut menjadi pendorong ekonomi Kaltim melalui LU Perdagangan.

Di sisi lain, LU Konstruksi mengalami moderasi pada periode laporan seiring normalisasi *progress* pembangunan IKN pasca percepatan pada tahun

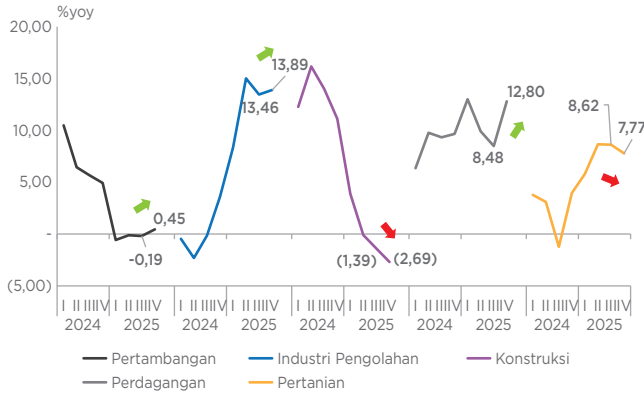
sebelumnya (aktivitas konstruksi pada periode pelaporan tidak sebanyak tahun sebelumnya). Sementara itu, LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tetap tumbuh pada periode laporan namun dalam perlambatan. Kondisi perlambatan tercermin dari pelemahan ekspor komoditas perkebunan dan perikanan Kaltim pada periode pelaporan.

**Secara pangsa, LU Pertambangan masih menjadi penopang utama struktur ekonomi Kaltim meski andil pertumbuhan tertinggi di triwulan IV 2025 disumbangkan oleh LU Industri Pengolahan.**

LU Pertambangan dan Penggalian memiliki pangsa terbesar sebesar 33,19%, diikuti oleh Industri Pengolahan sebesar 20,61%, Konstruksi sebesar 11,80%, Pertanian sebesar 9,58%, dan Perdagangan sebesar 7,70%. Sementara itu, Transportasi dan Pergudangan memiliki pangsa sebesar 4,73%, serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Akmamin) sebesar 1,29%. Adapun 10 LU lainnya secara agregat berkontribusi sebesar 11,10% terhadap total perekonomian daerah. Secara kumulatif, lima LU utama (Pertambangan, Industri Pengolahan, Konstruksi, Pertanian, dan Perdagangan) menguasai pangsa sebesar 82,88% dari total PDRB Kalimantan Timur pada periode pelaporan.

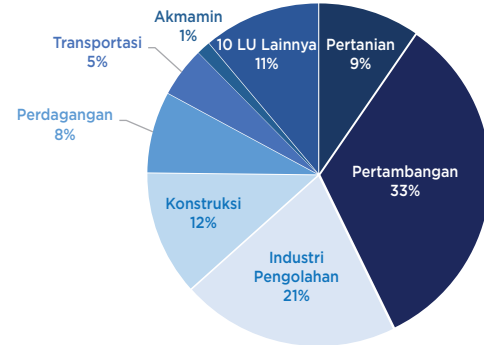
Andil pertumbuhan dari sisi lapangan usaha pada triwulan IV 2025 utamanya disumbangkan oleh LU Industri Pengolahan dengan andil sebesar 2,53% (yoy). LU Perdagangan Besar dan Eceran menjadi sektor dengan andil tertinggi kedua sebesar 0,78% (yoy), serta diikuti oleh LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 0,48% (yoy) yang menjadi penyumbang andil terbesar ketiga. Selain itu, beberapa lapangan usaha juga memberikan turut memberikan andil positif, antara lain Transportasi dan Pergudangan sebesar 0,28% (yoy), Informasi dan Komunikasi sebesar 0,27% (yoy), Administrasi Pemerintahan sebesar 0,25% (yoy) serta pertambangan sebesar 0,21% (yoy). Di sisi lain, LU Konstruksi tercatat menyumbangkan andil kontraksi sebesar -0,25% (yoy), bersama LU Jasa Keuangan dan Asuransi yang juga memberikan andil kontraksi sebesar -0,11% (yoy) pada periode pelaporan. Secara

**Grafik I.2 Pertumbuhan 5 (lima) Lapangan Usaha Utama pada Triwulan IV 2025**



Sumber: BPS, diolah

**Grafik I.3 Pangsa PDRB Kaltim Triwulan IV 2025 Berdasarkan Lapangan Usaha\***



Sumber: BPS, diolah  
\*pangsa diperoleh dari angka PDRB ADHB Triwulan IV 2025

**Tabel I.1 Pertumbuhan Ekonomi Kaltim Triwulan IV 2025 Berdasarkan Lapangan Usaha (yoy)**

Berdasarkan Lapangan Usaha	2023				2024				2025						
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	IV	IV	
	yoy (%)	yoy (%)	yoy (%)	yoy (%)	yoy (%)	yoy (%)	yoy (%)	yoy (%)	yoy (%)	yoy (%)	yoy (%)	yoy (%)	andil (%yoy)	share (%)	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,96	1,19	2,35	3,49	3,77	3,04	-1,24	3,95	5,79	8,64	8,62	7,77	0,48	9,58	
Pertambangan dan Penggalian	5,09	5,21	3,26	7,17	10,47	6,24	5,65	4,93	-0,58	-0,13	-0,19	0,45	0,21	33,19	
Industri Pengolahan	7,00	4,97	7,05	0,12	-0,47	-1,99	-0,15	3,58	8,31	15,01	13,46	13,89	2,53	20,61	
Pengadaan Listrik, Gas	19,57	20,06	16,57	9,39	17,09	18,96	18,74	11,33	6,51	5,12	5,28	6,83	0,01	0,07	
Pengadaan Air	7,09	6,47	7,89	9,05	9,12	8,79	6,76	6,32	5,23	6,41	8,90	9,32	0,01	0,06	
Konstruksi	16,73	20,47	14,22	12,63	12,26	17,28	13,98	11,11	3,87	-0,11	-1,39	-2,69	-0,25	11,80	
Perdagangan Besar & Eceran	9,91	7,44	6,22	4,11	6,34	8,89	9,32	9,66	12,99	9,91	8,48	12,80	0,78	7,70	
Transportasi dan Pergudangan	11,81	13,81	8,81	4,36	5,59	5,26	10,12	11,69	13,36	6,58	5,82	8,73	0,28	4,73	
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,66	6,84	7,63	8,59	9,18	11,88	12,05	13,19	13,73	9,97	12,32	15,96	0,16	1,29	
Informasi dan Komunikasi	6,89	8,03	8,06	4,62	5,54	7,41	8,75	9,95	8,96	6,98	7,09	13,81	0,27	1,64	
Jasa Keuangan	12,99	20,26	2,44	12,60	6,54	3,40	9,69	6,99	3,71	1,62	-6,19	-6,56	-0,11	1,86	
Real Estate	4,67	4,64	5,04	3,22	3,74	5,13	5,98	8,60	8,61	7,54	7,52	9,94	0,08	0,88	
Jasa Perusahaan	9,21	6,89	4,62	6,06	6,69	6,53	7,91	9,03	6,50	9,89	8,58	12,07	0,02	0,25	
Administrasi Pemerintahan	8,34	12,94	0,78	10,48	14,19	25,86	13,87	12,37	13,26	2,83	13,85	12,89	0,25	2,41	
Jasa Pendidikan	4,88	4,97	3,77	5,74	5,16	5,89	3,98	6,25	6,19	6,96	9,79	9,89	0,15	2,02	
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,73	8,96	7,56	4,42	3,73	4,07	5,73	6,23	8,46	8,72	8,87	13,62	0,11	1,03	
Jasa lainnya	7,16	8,31	8,79	7,60	5,69	9,58	13,81	13,48	12,22	13,96	8,97	14,92	0,09	0,88	
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>6,99</b>	<b>6,89</b>	<b>5,30</b>	<b>5,76</b>	<b>7,26</b>	<b>5,85</b>	<b>5,52</b>	<b>6,12</b>	<b>4,08</b>	<b>4,69</b>	<b>4,26</b>	<b>5,04</b>	<b>5,04</b>	<b>100,00</b>	

Sumber: BPS, diolah

keseluruhan, komposisi andil triwulan IV 2025 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kaltim ditopang oleh sektor Industri Pengolahan dan sektor-sektor berbasis permintaan domestik (Tabel I.1).

**Pertambangan dan Penggalian**

**LU pertambangan dan penggalian tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang triwulan sebelumnya.** Pada triwulan IV 2025, LU pertambangan tumbuh sebesar 0,45% (yoy) atau

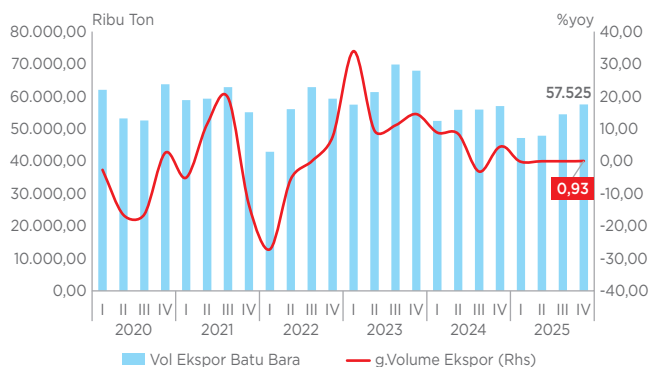
meningkat dibandingkan dengan kondisi pada periode sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar -0,19% (yoy). Kondisi perbaikan juga tercermin pada volume ekspor batu bara yang mencatatkan peningkatan sebesar 0,93% (yoy) pada periode laporan (Grafik I.6). Peningkatan tersebut menunjukkan perbaikan permintaan dari negara mitra dagang seiring dengan pemenuhan kebutuhan energi di musim dingin.

Dari sisi negara mitra dagang, produksi batu bara domestik Tiongkok pada triwulan IV 2025 tercatat mengalami kontraksi sebesar -0,63% (yoy)

(Grafik I.7). Perkembangan tersebut membuka ruang kebutuhan pasokan tambahan dari negara mitra, sehingga turut mendukung kinerja ekspor batu bara Indonesia pada periode pelaporan. Sejalan dengan dinamika sektor pertambangan, penyaluran kredit sektor ini pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar -0,60% (yoy), atau berada dalam tren perbaikan dibandingkan dengan periode sebelumnya (Grafik I.8).

Produksi lebih lanjut tertahan oleh tingginya tingkat curah hujan di sejumlah wilayah tambang. Pada triwulan IV 2025, curah hujan Kaltim tercatat 317,7 mm/bulan (Grafik I.5) atau berada diatas curah hujan rata-rata secara tahunan. Hal tersebut memengaruhi kelancaran aktivitas penambangan dan logistik di areal penambangan. Kondisi ini menyebabkan peningkatan produksi yang terjadi pada periode laporan menjadi tidak setinggi potensi permintaan yang tersedia. Secara keseluruhan, kinerja LU pertambangan

**Grafik I.4 Perkembangan Volume Ekspor Batu Bara Kaltim Triwulan IV 2025**



Sumber: Ditjen Bea Cukai, diolah

**Grafik I.5 Perkembangan Curah Hujan Kaltim**



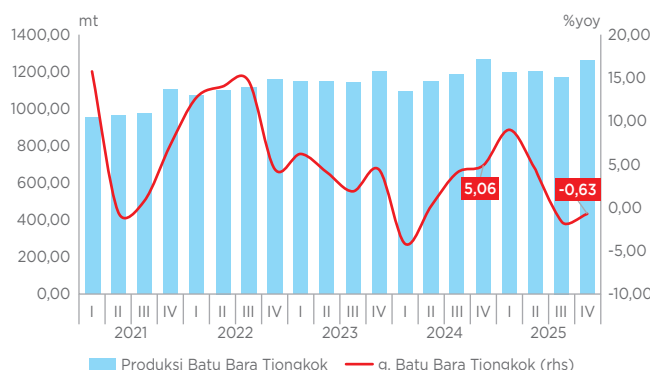
Sumber: BMKG Kaltim, diolah

**Grafik I.6 Perkembangan Kredit Pertambangan Kaltim Berdasarkan Lokasi Proyek**



Sumber: Ditjen Bea Cukai, diolah

**Grafik I.7 Perkembangan Produksi Batu Bara Tiongkok**



Sumber: McCloskey, diolah

pada triwulan IV 2025 ditopang oleh permintaan yang meningkat, dengan aktivitas produksi yang berjalan seiring penyesuaian operasional akibat kondisi cuaca pada periode pelaporan.

### Industri Pengolahan

Kinerja LU Industri Pengolahan tumbuh lebih tinggi pada triwulan IV 2025, didukung oleh peningkatan kapasitas produksi dan aktivitas industri hilir di Kaltim. LU industri pengolahan pada triwulan IV tercatat tumbuh sebesar 13,89% (yoy), atau meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 13,46% (yoy). Kinerja industri pengolahan pada triwulan IV 2025 ditopang utamanya oleh pengolahan migas yang masih tumbuh tinggi secara *year-on-year* pasca selesainya *revamp* kilang *refinery* migas. Sejalan dengan hal tersebut, impor minyak mentah juga meningkat sebesar 37% (yoy) (Grafik I.10), mengindikasikan kebutuhan input yang lebih

besar untuk mendukung aktivitas pengolahan pada periode pelaporan. Dari sisi pembiayaan, Kredit industri pengolahan secara nominal tetap tumbuh cukup tinggi sebesar 12,08% (yoy) pada akhir 2025 (Grafik I.12), kebutuhan modal kerja dan investasi pelaku usaha dalam mendukung ekspansi kapasitas serta aktivitas produksi.

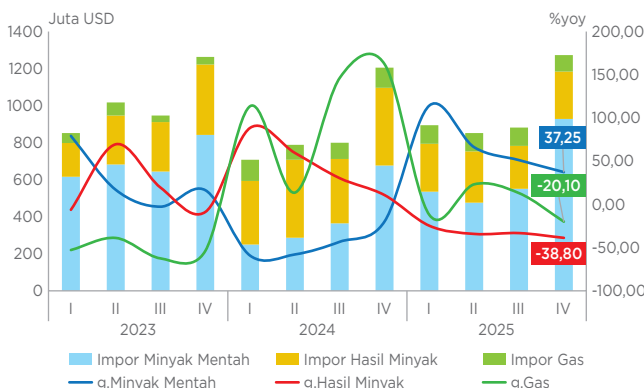
Di sisi lain, kinerja industri pengolahan CPO masih tertahan di triwulan IV 2025 yang disebabkan oleh tertahannya input produksi. Kondisi ini tercermin pada ekspor CPO yang tercatat terkontraksi sebesar 15,07% (yoy) (Grafik I.9). Secara keseluruhan, kinerja LU industri pengolahan pada triwulan IV 2025 tetap solid dan tumbuh lebih tinggi, ditopang oleh penguatan kapasitas produksi, dukungan pembiayaan yang memadai, serta berlanjutnya aktivitas industri, dengan dinamika ekspor pada sub sektor tertentu yang menyesuaikan perkembangan permintaan domestik.

Grafik I.8 Perkembangan Volume Ekspor CPO



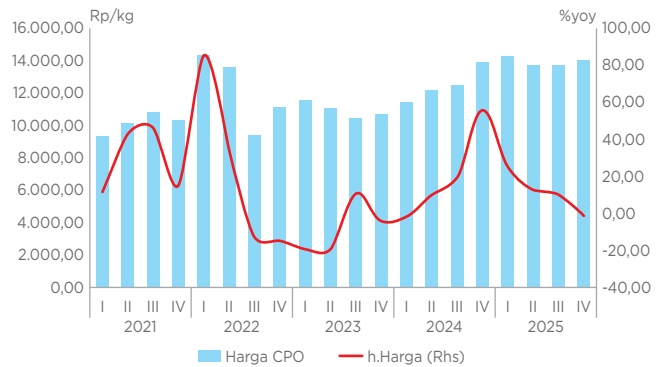
Sumber: Ditjen Bea Cukai, diolah

Grafik I.9 Perkembangan Nilai Impor migas Berdasarkan Jenis Barang



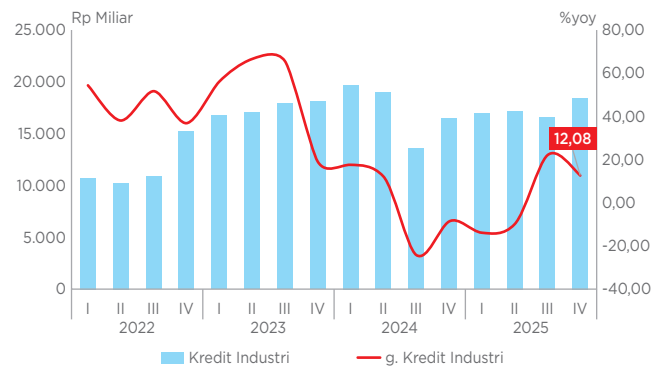
Sumber: BPS, diolah

Grafik I.10 Perkembangan Volume Ekspor CPO



Sumber: Ditjen Bea Cukai, diolah

Grafik I.11 Perkembangan Kredit Industri

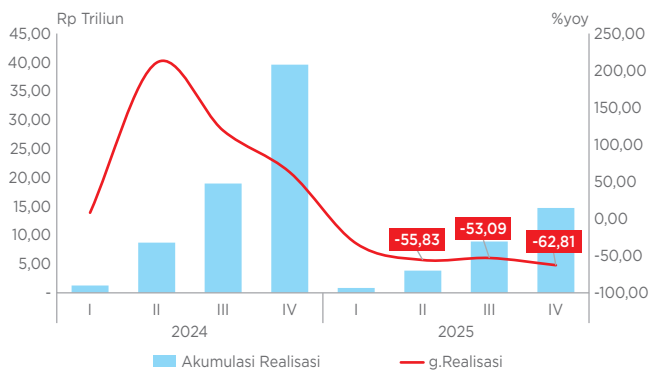


Sumber: Ditjen Bea Cukai, diolah

### Konstruksi

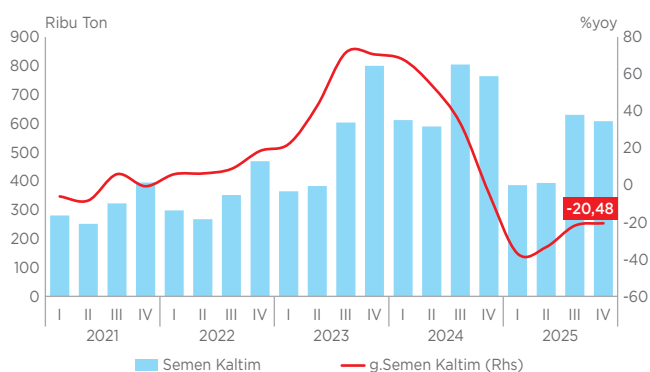
Kinerja LU konstruksi Kaltim pada triwulan IV 2025 terkontraksi akibat normalisasi *progress* pembangunan sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN). Pada triwulan IV 2025, LU konstruksi terkontraksi sebesar 2,69% (yoy), atau lebih dalam dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 1,40% (yoy). Penurunan kinerja LU konstruksi sejalan dengan realisasi anggaran pembangunan IKN yang turun 62.81% (yoy) dibandingkan dengan realisasi anggaran pembangunan IKN di periode yang sama di tahun sebelumnya (Grafik I.12). Turunnya realisasi anggaran pembangunan IKN ini tidak terlepas dari *high baseline* realisasi di tahun sebelumnya seiring percepatan pembangunan IKN untuk mengejar target penyelesaian pembangunan tahap I di akhir tahun 2024. Selain itu terdapat sejumlah proyek strategis nasional yang telah mencapai tahap *finishing* pada akhir

**Grafik I.12 Perkembangan Realisasi Anggaran IKN**



Sumber: DJPb Kaltim & Otorita IKN, diolah

**Grafik I.13 Pengadaan Semen di Kaltim**



Sumber: Asosiasi Semen Indonesia, diolah

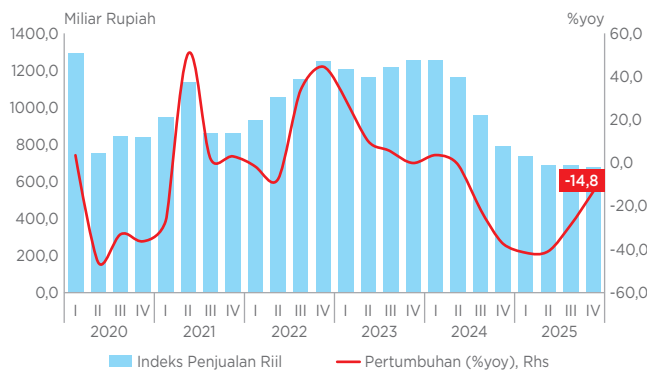
tahun 2025 sehingga mendorong penurunan realisasi anggaran konstruksinya. Lebih lanjut, perlambatan kinerja LU konstruksi juga tercermin dari statistik pengadaan semen di periode pelaporan yang terkontraksi 20,48% (yoy), sedikit naik dibandingkan dengan triwulan III 2025 yang sebesar -21,74% (yoy) (Grafik I.13).

### Perdagangan Besar dan Eceran

LU Perdagangan tumbuh lebih tinggi seiring dengan meningkatnya permintaan masyarakat menjelang momen HBKN Nataru. LU perdagangan pada triwulan IV tumbuh 12,80% (yoy), atau lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 7,95% (yoy). Peningkatan aktivitas perdagangan Kaltim pada triwulan IV 2025 juga tergambar dari jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) yang

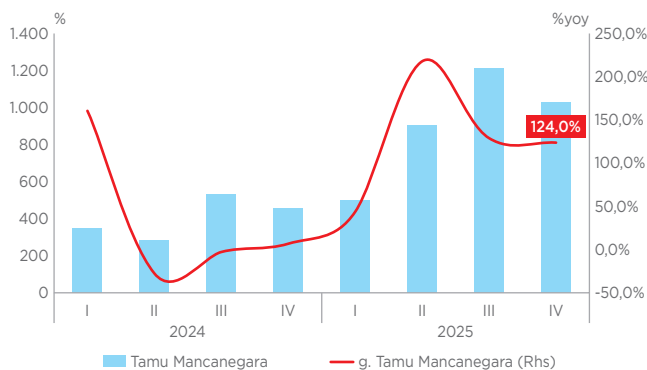
mencapai 124% (yoy) dan wisatawan nusantara (wisnus) yang masih tumbuh positif, meski sedikit melambat sebesar 14,5% (yoy). Peningkatan kegiatan wisata pada periode laporan didorong oleh pelaksanaan sejumlah event yang mendorong peningkatan berbagai aktivitas masyarakat. Disisi lain indeks penjualan riil mengalami perbaikan, meski masih terkontraksi sebesar -14,8% (yoy) pada triwulan laporan, dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar -28,3% (yoy). Perbaikan ini sejalan dengan pertumbuhan tingkat penghunian kamar (TPK) yang juga menunjukkan perbaikan kinerja dari kontraksi sebesar -21,98% (yoy) di triwulan III 2025 membaik di periode laporan menjadi kontraksi sebesar 13,58% (yoy) (Grafik I.16). Kinerja aktivitas perdagangan ini sejalan dengan peningkatan konsumsi rumah tangga seiring peningkatan permintaan masyarakat yang juga menguat.

**Grafik I.14 Indeks Penjualan Riil Kaltim**



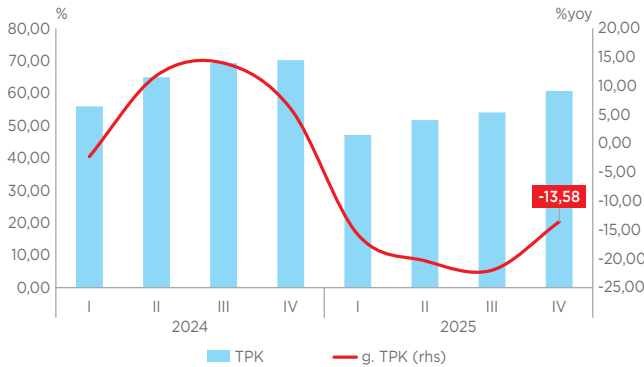
Sumber: Survey Bank Indonesia, diolah

**Grafik I.15 Perkembangan tamu mancanegara di Kaltim**



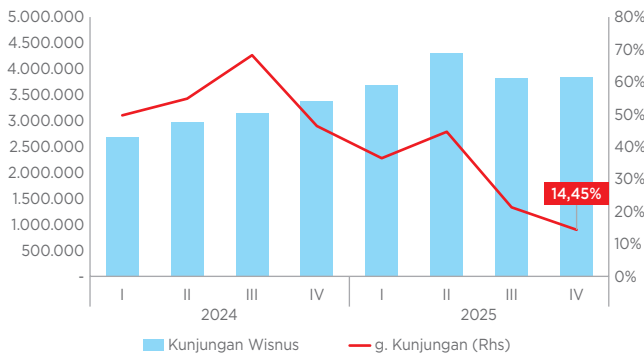
Sumber: BPS, diolah

**Grafik I.16 Perkembangan TPK Hotel Berbintang di Kaltim**



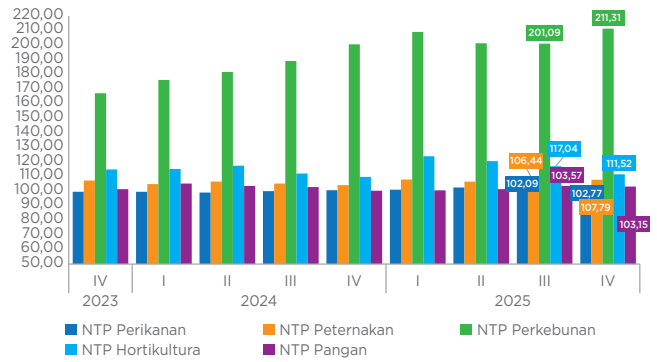
Sumber: BPS, diolah

**Grafik I.17 Perkembangan tamu mancanegara di Kaltim**



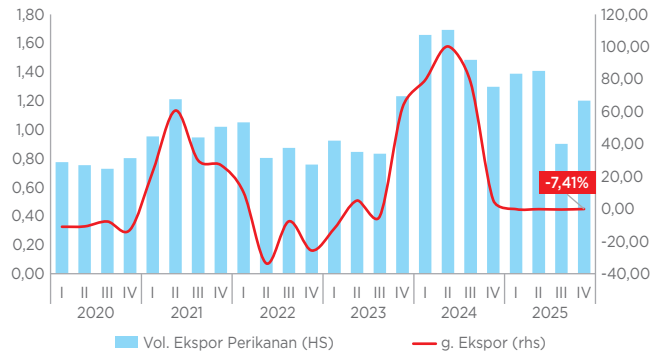
Sumber: BPS, diolah

**Grafik I.18 Perkembangan NTP Subsektor**



Sumber: BPS Kaltim, diolah

**Grafik I.19 Perkembangan Ekspor Perikanan**



Sumber: BPS Kaltim, diolah

**Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan**

Kinerja LU pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan sedikit termoderasi pada triwulan IV 2025. LU pertanian pada triwulan IV 2025 tumbuh sebesar 7,77% (yoy), atau sedikit melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 7,97% (yoy). Perlambatan kinerja pertanian disebabkan oleh penurunan produksi tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang tercermin dari penurunan produksi CPO di LU industri pengolahan. Dari sisi NTP, terjadi penurunan NTP pada sektor Hortikultura dan Pangan sejalan dengan inflasi *year-on-year* untuk komoditas hortikultura seperti bawang merah, cabai merah, dan tomat yang mengalami peningkatan tekanan di triwulan IV 2025. Kondisi ini mengindikasikan adanya keterbatasan pasokan akibat penurunan produksi. Penurunan juga terjadi dari subsektor perikanan, sejalan dengan volume ekspor perikanan yang berkontraksi sebesar 7,41% (yoy) (Grafik I.18).

**1.3. PERTUMBUHAN EKONOMI BERDASARKAN PENGELUARAN**

Pertumbuhan ekonomi Kaltim di triwulan IV 2025 dari sisi pengeluaran didorong utamanya oleh kinerja konsumsi rumah tangga dan ekspor (Grafik I.20). Kinerja ekspor tumbuh meningkat disebabkan oleh kenaikan permintaan batu bara global di tengah harga batu bara acuan yang stabil di level yang tinggi. Komponen konsumsi rumah tangga (RT) juga tumbuh, sejalan dengan peningkatan indeks keyakinan konsumen (IKK). Disisi lain, terjadi perlambatan pada Komponen Penanaman Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi akibat normalisasi pembangunan IKN dan pasca selesainya proyek strategis di akhir tahun 2025. Komponen belanja pemerintah tumbuh moderat seiring persentase realisasi belanja APBN dan APBD Kab/Kota pada triwulan IV 2025 yang lebih tinggi dibandingkan periode yang sama di tahun 2024 dan efisiensi

anggaran. Selanjutnya, komponen impor yang menjadi pengurang PDRB tercatat melambat seiring penurunan impor non-migas, utamanya barang modal dan bahan baku.

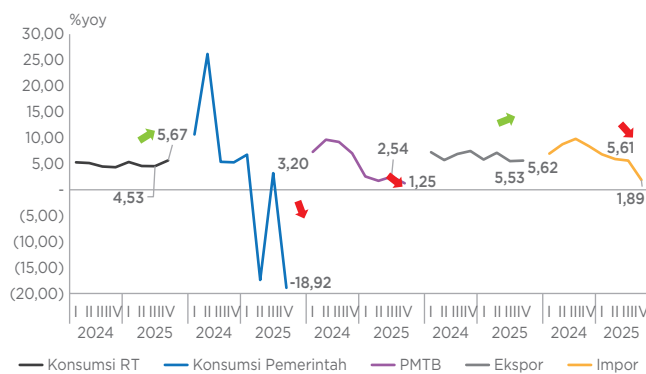
**Secara pangsa, net ekspor masih menopang struktur ekonomi Kaltim dari sisi pengeluaran sejalan dengan sumbangannya pada pertumbuhan yang masih menempati posisi tertinggi di triwulan IV 2025.** Ekonomi Kaltim pada sisi pengeluaran didominasi oleh net ekspor mencatatkan *share* terbesar mencapai 38,83% dari total PDRB Kaltim. Selanjutnya, secara berurutan, pangsa terbesar komponen pengeluaran PDRB Kaltim yakni PMTB sebesar 35,96%, konsumsi rumah tangga (RT) sebesar 17,61%, dan konsumsi pemerintah 7,06% (Grafik 1.21). Secara total, keempat komponen ini menguasai pangsa sebesar 99,46% dari total ekonomi Kaltim di periode pelaporan. Adapun

secara andil, ekspor masih menyumbang andil pertumbuhan tertinggi, yakni sebesar 6,32% (yoy). Andil tertinggi selanjutnya disumbangkan oleh komponen PMTB sebesar 0,38% (yoy) dan konsumsi rumah tangga sebesar 0,80% (yoy) (Tabel 1.2).

### Ekspor

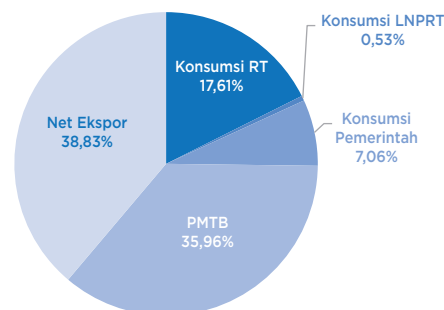
**Komponen ekspor Kaltim pada triwulan IV 2025 tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.** Ekspor Kaltim pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar 5,62% (yoy), atau lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan III 2025 yang sebesar 5,53% (yoy). Peningkatan komponen ekspor didorong oleh perbaikan total volume ekspor luar negeri (LN) sebesar 0,83% (yoy) yang utamanya didorong oleh peningkatan

**Grafik 1.20** Pertumbuhan 5 (lima) Komponen Pengeluaran Utama Kaltim pada Triwulan IV 2025 (% yoy)



Sumber: BPS, diolah

**Grafik 1.21** Pangsa PDRB Kaltim Berdasarkan Pengeluaran Triwulan IV 2025



Sumber: BPS, diolah

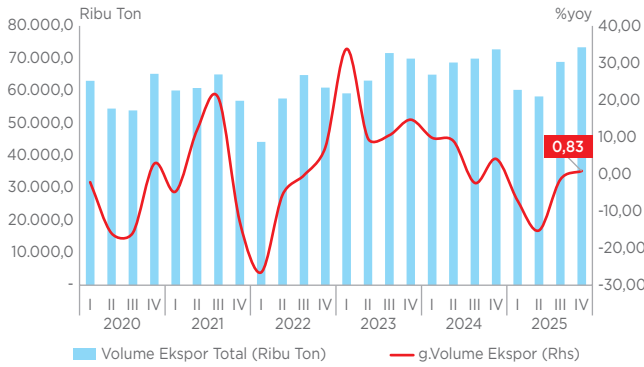
**Tabel 1.2** Pertumbuhan Ekonomi Kaltim Triwulan IV 2025 Berdasarkan Pengeluaran (yoy)

Berdasarkan Pengeluaran	2023				2024				2025					IV	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	IV		
	yoy (%)	yoy (%)	yoy (%)	yoy (%)	yoy (%)	yoy (%)	yoy (%)	yoy (%)	yoy (%)	yoy (%)	yoy (%)	yoy (%)	andil (%yoy)		share (%)
Konsumsi RT	5,08	5,13	4,52	5,22	5,27	5,16	4,48	4,36	5,36	4,58	4,53	5,67	0,80	17,61	↗
Konsumsi LNPR	5,02	5,94	0,53	11,02	18,12	14,85	4,97	7,63	-1,63	3,92	4,93	-1,36	-0,01	0,53	↘
Konsumsi Pemerintah	26,10	37,82	38,42	38,15	14,75	26,19	5,37	5,29	6,75	-17,41	3,20	-18,92	-1,28	7,06	↘
PMTB	11,80	14,76	11,17	8,58	7,29	9,69	9,22	7,04	2,56	1,72	2,54	1,25	0,38	35,96	↘
Perubahan Inventori	667,17	-28,48	134,62	-2,29	48,28	43,88	77,85	-117,31	-91,86	-83,74	-96,94	-989,14	0,02	0,01	↘
Ekspor*)	10,92	4,76	1,62	6,03	7,14	5,56	6,90	7,47	5,81	7,15	5,53	5,62	6,32	116,59	↗
Impor*)	17,97	7,50	2,58	10,37	6,95	8,48	9,82	8,40	6,82	5,93	5,61	1,89	1,18	77,76	↘
<b>PDRB</b>	<b>6,99</b>	<b>6,89</b>	<b>5,30</b>	<b>5,76</b>	<b>7,26</b>	<b>5,85</b>	<b>5,52</b>	<b>6,12</b>	<b>4,08</b>	<b>4,69</b>	<b>4,26</b>	<b>5,04</b>	<b>5,04</b>	<b>100,00</b>	<b>↗</b>

Sumber: BPS, diolah

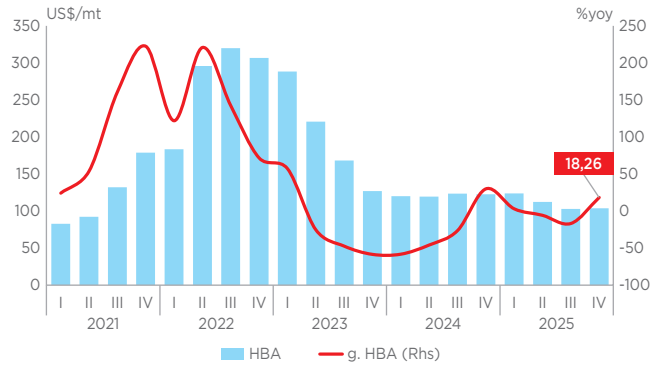
\*Nilai ekspor impor yang digunakan mencakup ekspor impor antar daerah dan luar negeri.

Grafik I.22 Perkembangan Volume Ekspor Total



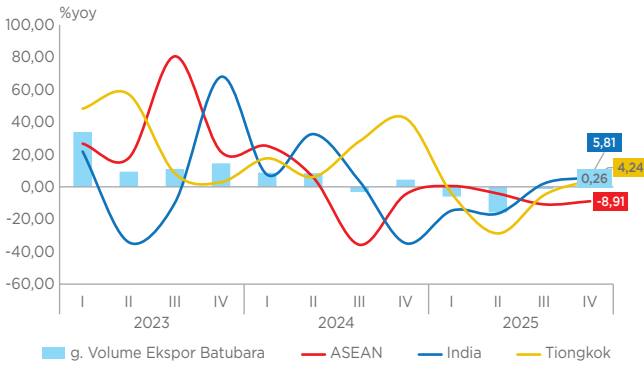
Sumber: BPS, diolah

Grafik I.24 Perkembangan Harga Batu Bara Acuan Indonesia



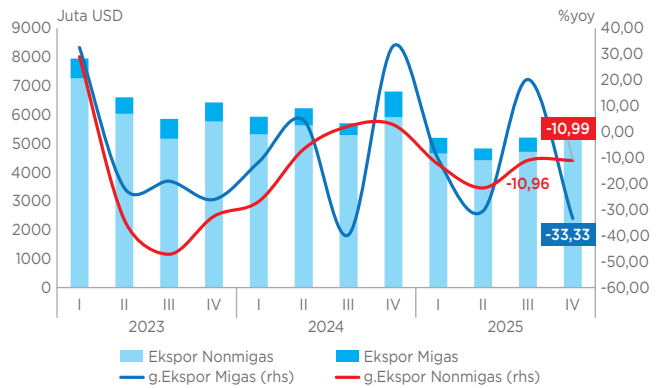
Sumber: Kementerian ESDM, diolah

Grafik I.23 Perkembangan Volume Ekspor Batu Bara di 3 (Tiga) Negara Tujuan Utama



Sumber: Ditjen Bea Cukai, diolah

Grafik I.25 Perkembangan Nilai Ekspor Hasil Migas dan Nonmigas



Sumber: BPS, diolah

volume ekspor batu bara (Grafik I.22). Total volume ekspor batu bara di triwulan IV 2025 tumbuh menjadi 0,26% (yoy), jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 1,29% (yoy). Kondisi ini terjadi seiring meningkatnya permintaan batu bara negara mitra dagang utama khususnya India dan Tiongkok (Grafik I.23). Lebih lanjut, peningkatan volume ekspor dan produksi batu bara juga di dorong oleh perbaikan harga batu bara acuan yang tumbuh sebesar 18,26% (yoy) (Grafik I.24). Di sisi lain, ekspor migas Kaltim berkontraksi sebesar 33,33% (yoy) dan menahan pertumbuhan lebih lanjut pada komponen ekspor.

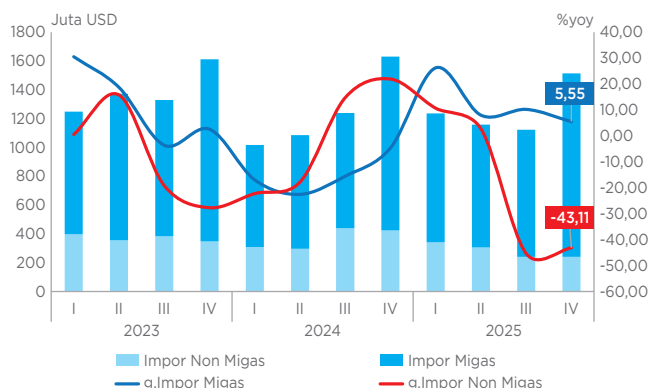
Impor

**Komponen impor Kaltim tumbuh melambat pada triwulan IV 2025 disebabkan oleh penurunan impor nonmigas, terutama impor barang modal**

**dan bahan baku.** Komponen impor melambat dari 5,81% (yoy) di triwulan sebelumnya menjadi 1,89% (yoy) pada periode pelaporan. Perlambatan tersebut disebabkan oleh penurunan impor nonmigas Kaltim yang berkontraksi 43,11% (yoy) (Grafik I.26). Jika dilihat berdasarkan jenis barangnya, penurunan impor non migas Kaltim juga tercermin dari penurunan nilai impor barang modal, bahan baku dan konsumsi yang secara berturut-turut berkontraksi -72,34 (yoy), -50,22% (yoy) dan -42,71% (yoy) atau lebih dalam dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar -54,28% (yoy), -49,56% (yoy) dan -34,84% (yoy) (Grafik I.27). Sementara itu, impor migas Kaltim yang memegang pangsa 84,05% dari total impor Kaltim, tercatat termoderasi dari 10,28 % (yoy) di triwulan sebelumnya menjadi 5,55% (yoy) dan ikut menyebabkan perlambatan yang lebih dalam pada komponen impor di periode laporan (Grafik I.26). Adapun jika ditinjau dari jenis

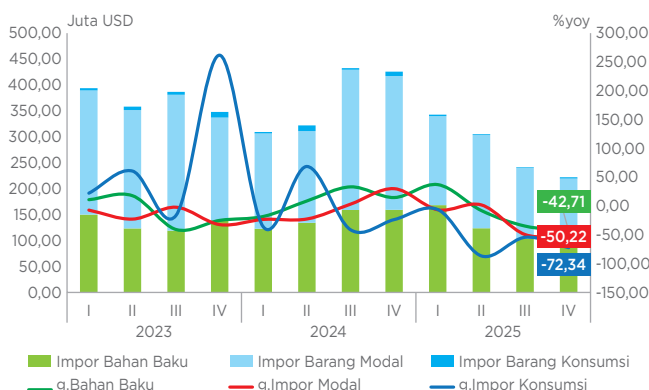
barangnya, perlambatan impor migas disebabkan oleh melambatnya impor hasil minyak, gas, serta minyak mentah yakni secara berturut turut dari -33,28 (yoy), 12,90% (yoy) dan 51,08% di triwulan III 2025, menjadi -38,80% (yoy), -20,10% (yoy) dan 37,25% (yoy) di periode laporan (Grafik I.28).

**Grafik I.26 Perkembangan Nilai Impor Migas dan Nonmigas Kaltim**



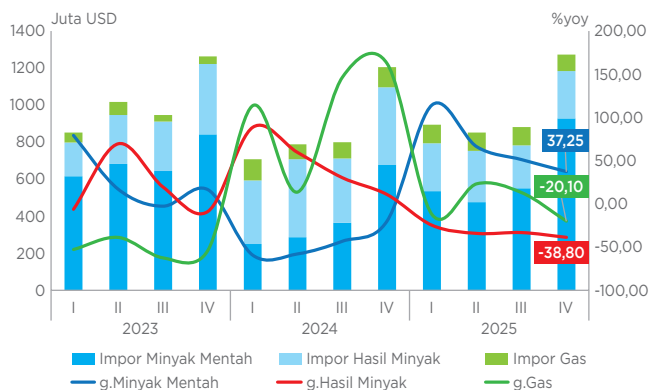
Sumber: BPS, diolah

**Grafik I.27 Perkembangan Nilai Impor Nonmigas Berdasarkan Jenis Barang**



Sumber: Ditjen Bea Cukai, diolah

**Grafik I.28 Perkembangan Nilai Impor migas Berdasarkan Jenis Barang**

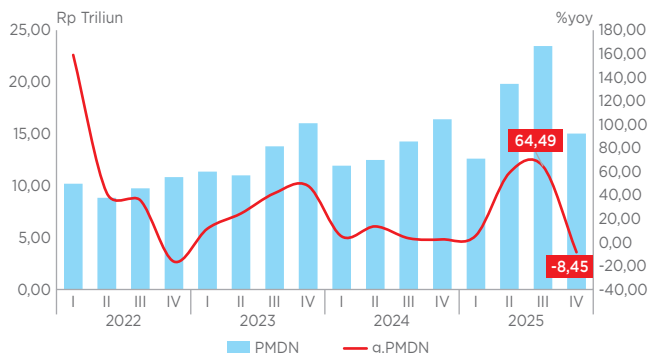


Sumber: BPS, diolah

**Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) - Investasi**

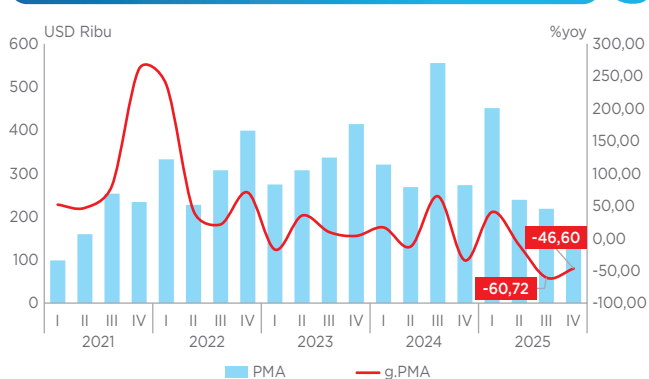
Komponen PMTB Kaltim di triwulan IV 2025 tumbuh termoderasi dibandingkan dengan kondisi pada triwulan sebelumnya seiring penurunan investasi domestik dan asing. Komponen PMTB tercatat 1,25% (yoy), atau lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan di triwulan sebelumnya yang sebesar 2,54% (yoy). Termoderasinya kinerja investasi di Kaltim didorong oleh penurunan investasi domestik (Penanaman Modal Dalam Negeri, PMDN) yang berkontraksi 8,45% (yoy), atau lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 64,49% (yoy) (Grafik I.30). Perlambatan tersebut sejalan dengan kinerja sektor konstruksi seiring penyelesaian proyek strategis di Kaltim. Sementara itu, investasi asing (Penanaman Modal Asing, PMA) berkontraksi 46,60% (yoy), atau membaik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang berkontraksi 60,72% (yoy) (Grafik I.31).

**Grafik I.29 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Kaltim**



Sumber: BKPM, diolah

**Grafik I.30 Penanaman Modal Asing (PMA) Kaltim**

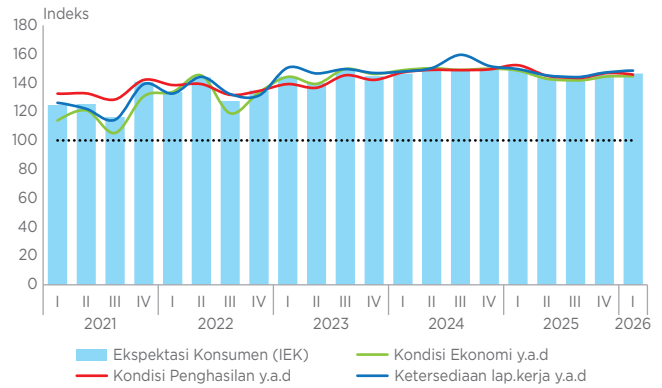


Sumber: BKPM, diolah

### Konsumsi Rumah Tangga

Konsumsi rumah tangga Kaltim pada triwulan IV 2025 termoderasi, sejalan dengan penurunan seluruh indeks di hasil survei Konsumen Bank Indonesia. Konsumsi rumah tangga Kaltim di periode pelaporan tumbuh sebesar 5,67% (yoy), atau lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan di triwulan sebelumnya yang mencapai 4,53% (yoy). Tumbuhnya konsumsi rumah tangga tercermin dari meningkatnya indeks keyakinan konsumen (IKK) yang naik dari 144.22 di triwulan III 2025 menjadi 145,47 pada periode pelaporan. Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) juga mengalami kenaikan dari 142.78 pada triwulan III 2025 menjadi 145.83 pada periode pelaporan. Di sisi lain Indeks Kondisi Ekonomi saat ini (IKE) sedikit termoderasi dari 145.67 pada triwulan III 2025 menjadi 145.11 pada periode pelaporan. Jika ditinjau berdasarkan komponennya, penyebab termoderasinya IKE

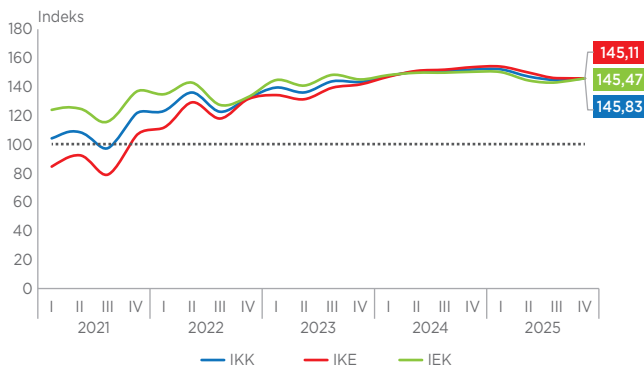
Grafik I.33 Perkembangan Komponen IEK



Sumber: Bank Indonesia, diolah

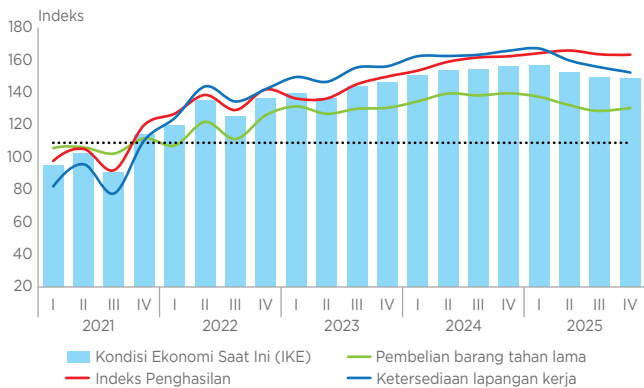
akumulasi dari penurunan indeks penyusunnya terutama dari sisi ketersediaan lapangan kerja di periode laporan (Grafik I.32). Secara keseluruhan, menguatnya IKK mengindikasikan terjaganya daya beli masyarakat yang sejalan dengan kinerja sektor perdagangan pada periode pelaporan.

Grafik I.31 Perkembangan IKK, IEK, dan IKE



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik I.32 Perkembangan Komponen IKE



Sumber: Bank Indonesia, diolah

### Konsumsi Pemerintah

Realisasi belanja pemerintah daerah di triwulan IV 2025 termoderasi sejalan dengan normalisasi realisasi belanja operasional APBD dan Modal. Komponen pengeluaran pemerintah di periode pelaporan terkontraksi 18,92% (yoy), setelah di triwulan sebelumnya hanya tumbuh sebesar 0,91% (yoy). Termoderasinya komponen ini, sejalan dengan belanja APBD Kaltim selain belanja modal yang terkontraksi 6.22% (yoy), namun tidak sedalam kontraksi di triwulan sebelumnya yang sebesar 8,71% (yoy) (Grafik I.34). Menurut komponen belanjanya, belanja operasional tercatat terkontraksi 26.3% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 6,5% (yoy). Sementara itu, belanja transfer membaik menjadi 44.8% (yoy) dari sebelumnya terkontraksi 13,6% (yoy) (Grafik I.35). Jika dirinci lebih lanjut, perlambatan belanja operasional didorong oleh realisasi belanja barang dan jasa yang terkontraksi 11% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 4,82% (yoy) (Grafik I.36). Selain itu, belanja bantuan sosial (bansos)

juga melambat menjadi 31% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 94,2% (yoy) seiring normalisasi penyaluran bantuan pangan nontunai (BPNT), Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), dan Program Keluarga Harapan (PKH) (Grafik I.37).

**Dari sisi realisasi APBN juga termoderasi seiring dengan efisiensi anggaran.** Belanja transfer tercatat tumbuh melambat, yakni dari yang tumbuh tumbuh positif 14,39% (yoy) di triwulan sebelumnya menjadi terkontraksi 4,12% (yoy) di periode laporan. Perlambatan belanja transfer

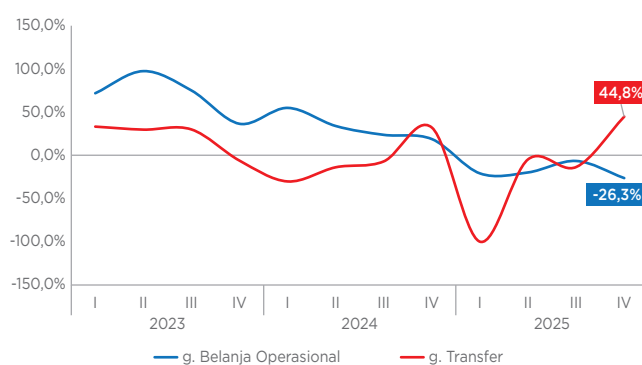
utamanya disebabkan penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) yang terkontraksi -3.10% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 25,23% (yoy). Selain belanja transfer, belanja negara di Kaltim juga melambat, terkontraksi dari 14,84% (yoy) di triwulan sebelumnya menjadi terkontraksi 32,22% (yoy) di periode laporan. Jika ditinjau berdasarkan jenis belanja, belanja pegawai serta belanja bantuan sosial mencatatkan peningkatan pertumbuhan realisasi di periode laporan dibandingkan triwulan sebelumnya (Tabel I.4).

**Grafik I.34 Realisasi belanja APBD Kaltim selain Belanja Modal**



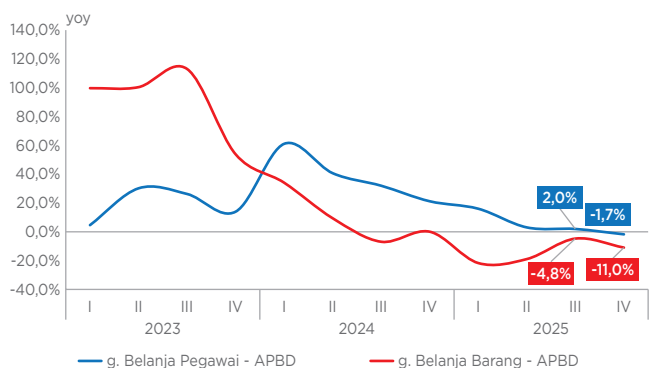
Sumber: BPKAD, diolah

**Grafik I.35 Realisasi belanja Operasional dan Belanja Transfer APBD Kaltim**



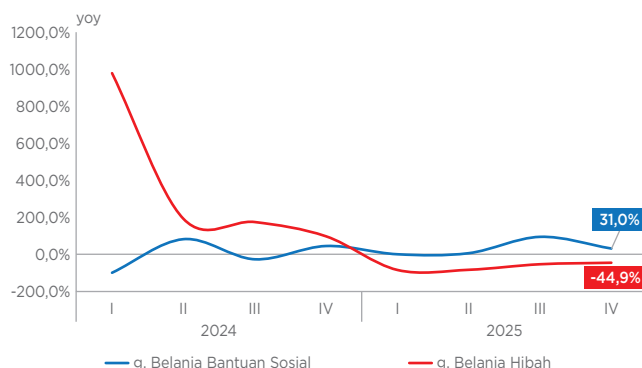
Sumber: BPKAD, diolah

**Grafik I.36 Realisasi belanja pegawai dan Belanja Barang APBD Kaltim**



Sumber: BPKAD, diolah

**Grafik I.37 Realisasi belanja bantuan sosial dan belanja hibah APBD Kaltim**



Sumber: BPKAD, diolah

Tabel I.3 Realisasi Belanja APBD Kaltim

URAIAN APBD	2024				2025			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
<b>Nominal Realisasi</b>								
<b>Belanja</b>	2.167.370	6.712.491	11.784.097	20.463.584	1.010.446	5.379.196	10.230.588	18.840.895
<b>Belanja Operasional</b>	1.262.039	4.004.043	6.702.247	11.137.895	998.931	3.214.022	6.268.857	8.212.314
Belanja Pegawai	537.505	1.519.372	2.261.235	3.225.824	623.699	1.566.120	2.306.484	3.170.104
Belanja Barang	415.644	1.287.524	2.411.196	4.898.722	325.232	1.043.195	2.296.506	4.359.566
Belanja Hibah	308.890	756.130	901.045	1.195.068	50.000	128.441	423.550	658.437
Belanja Subsidi					-	-	-	
Belanja Bantuan sosial		6.635	6.635	17.177	-	7.018	12.885	22.497
Belanja Bantuan Keuangan		434.382	1.122.136	1.801.104	-	469.248	1.229.431	2.045.211
<b>Belanja Modal</b>	160.720	804.021	1.991.039	4.870.010	11.515	349.905	1.290.186	4.216.824
Belanja Tanah	5.618	8.543	24.796	78.009	-	-	405	105.175
Belanja Peralatan Mesin	34.050	126.120	394.180	1.142.602	11.498	62.111	239.619	1.047.366
Belanja Bangunan dan Gedung	52.465	276.852	704.015	1.963.236	-	44.243	186.992	945.344
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	67.930	381.503	843.210	1.612.447	-	243.440	845.774	2.082.006
Belanja Aset Tetap Lainnya		9.453	18.753	41.748	-	-	13.564	15.886
Belanja Aset Lainnya	658	1.549	6.083	31.968	17	110	3.832	21.047
<b>Belanja tidak terduga</b>		-	-	64.231	-	-	-	54.460
Belanja tidak terduga		-	-	64.231	-	-	-	
<b>Transfer</b>	745.190	1.904.428	3.090.812	4.391.449	-	1.815.269	2.671.545	6.357.297
Bagi Hasil Pajak ke Kab/Kota/Desa	745.190	1.904.428	3.090.812	4.391.449	-	1.815.269	2.671.545	4.312.086

Sumber: BPKAD Kaltim, diolah

Tabel I.4 Realisasi Belanja APBN Kaltim

URAIAN	Triwulan III 2025					Triwulan IV 2025				
	Pagu	Realisasi Rp Miliar	%real	g.Pagu	g.Realisasi	Pagu	Realisasi Rp Miliar	%real	g.Pagu	g.Realisasi
<b>Belanja Negara</b>	<b>65.154,89</b>	<b>44.425,14</b>	<b>68,18</b>	<b>-32,07</b>	<b>-14,84</b>	<b>66.203,45</b>	<b>63.403,67</b>	<b>0,96</b>	<b>-30,98</b>	<b>-32,22</b>
<b>Belanja Pemerintah Pusat</b>	<b>22.893,17</b>	<b>13.723,98</b>	<b>59,95</b>	<b>-57,35</b>	<b>-45,82</b>	<b>23.907,94</b>	<b>23.201,58</b>	<b>0,97</b>	<b>-55,46</b>	<b>-55,05</b>
Belanja Pegawai	3.660,57	2.840,88	77,61	5,76	7,89	3.908,90	3.856,42	0,99	12,93	11,81
Belanja Barang	3.633,80	1.731,83	47,66	-41,82	-39,91	3.712,92	3.296,15	0,89	-40,55	-38,88
Belanja Modal	15.588,05	9.145,28	58,67	-64,55	-53,83	16.275,38	16.038,27	0,99	-62,98	-62,50
Belanja Bantuan Sosial	10,74	5,99	55,71	8,81	-26,41	10,74	10,74	1,00	8,81	8,81
<b>Transfer Ke Daerah</b>	<b>42.261,72</b>	<b>30.701,17</b>	<b>72,65</b>	<b>0,06</b>	<b>14,39</b>	<b>42.295,51</b>	<b>40.202,09</b>	<b>0,95</b>	<b>0,14</b>	<b>-4,12</b>
Dana Bagi Hasil	32.388,11	24.094,79	74,39	2,08	25,23	32.388,11	30.743,24	0,95	2,08	-3,10
Dana Alokasi Umum	6.354,13	4.239,43	63,72	-1,03	-14,59	6.387,21	6.181,05	0,97	-0,51	-1,25
Dana Alokasi Khusus Fisik	178,48	66,23	37,11	-79,81	-77,54	178,48	148,78	0,83	-79,81	-82,30
Dana Alokasi Khusus Nonfisik	2.471,47	1.726,49	69,86	10,86	5,21	2.472,18	2.411,87	0,98	10,90	11,54
Dana Insentif Daerah	59,48	29,74	50,00	-63,92	-62,31	59,48	59,48	1,00	-63,92	-54,21
Dana Desa	810,05	544,50	67,22	0,01	-12,10	810,05	657,67	0,81	0,01	-18,65

Sumber: Kanwil DJPb Kaltim, diolah



*Halaman ini sengaja dikosongkan*

# 02

## Keuangan Pemerintahan Daerah





“

- Realisasi belanja pemerintah di Kalimantan Timur pada triwulan laporan bergerak lebih moderat, terutama dipengaruhi oleh penyesuaian belanja pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota, sementara belanja pemerintah provinsi mulai menunjukkan perbaikan.
- Perkembangan belanja tersebut sejalan dengan kebijakan efisiensi fiskal nasional untuk mendukung program prioritas serta adanya penyesuaian anggaran infrastruktur dan peralihan kewenangan pendanaan proyek strategis ke Otorita IKN di tengah penurunan realisasi pendapatan daerah.
- Secara keseluruhan struktur keuangan masih didominasi oleh anggaran pusat dan tingkat kabupaten atau kota. Namun, persentase penyerapan anggaran maupun realisasi pendapatan pada periode ini tercatat lebih rendah dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya.

## 2.1. GAMBARAN UMUM

Sejalan dengan perlambatan kinerja komponen konsumsi pemerintah pada PDRB Provinsi Kalimantan Timur di triwulan IV 2025, realisasi belanja pemerintah secara tahunan juga tercatat menurun pada periode laporan. Realisasi belanja pemerintah (APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kab/Kota) pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar Rp128,16 triliun, lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2024 sebesar Rp169,47 triliun, atau terkontraksi 24,37% (yoy). Meski demikian, dibandingkan triwulan III 2025, realisasi belanja pemerintah meningkat signifikan sebesar Rp80,43 triliun, mencerminkan percepatan penyerapan anggaran pada akhir tahun. Kondisi tersebut disebabkan oleh menurunnya komponen realisasi belanja pemerintah baik kategori APB N dan APBD kabupaten/kota walaupun realisasi belanja pada APBD Provinsi tumbuh membaik<sup>1</sup>. Penurunan realisasi belanja tersebut juga disebabkan oleh menurunnya realisasi pendapatan pemerintah pada periode yang sama<sup>2</sup>. Rincian selengkapnya sebagaimana terangkum pada table II.1.

Lebih lanjut, penurunan realisasi belanja pemerintah pada APBN dan APBD Kab/Kota disebabkan oleh beberapa faktor. Pada realisasi belanja APBN, penurunan realisasi didorong oleh rendahnya realisasi belanja Pemerintah Pusat dibanding triwulan sebelumnya disebabkan oleh penyesuaian alokasi anggaran infrastruktur, *high baseline* proyek IKN tahun 2024, serta pengalihan kewenangan anggaran ke Otorita IKN meskipun serapan pagu IKN sendiri telah mencapai 99,2% (Rp14,73 triliun). Selain itu, Belanja Transfer ke

Daerah (TKD) turut terkontraksi sebesar 14,12% (yoy), berbanding terbalik dengan pertumbuhan 14,39% (yoy) pada triwulan sebelumnya, sejalan dengan kebijakan efisiensi fiskal nasional untuk mendukung program prioritas seperti makan bergizi gratis dan swasembada pangan. Menurunnya realisasi APBD Kab/Kota pada periode laporan diakibatkan oleh kebijakan efisiensi anggaran sesuai Inpres No. 1 Tahun 2025, sejalan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), utamanya dari Kota Bontang yang mencatatkan penurunan terdalam. Disisi lain, Kabupaten Mahakam Ulu yang mampu mencatatkan pertumbuhan positif dan meningkat dibanding triwulan sebelumnya. Sementara itu, Realisasi pertumbuhan APBD Provinsi tumbuh membaik didukung oleh meningkatnya komponen transfer serta perbaikan belanja modal. Secara khusus, sub-komponen belanja tanah tumbuh positif demi mendukung infrastruktur IKN.

**Struktur belanja pemerintah di Provinsi Kalimantan Timur masih didominasi oleh belanja pemerintah dengan anggaran APBN, diikuti oleh APBD Kabupaten/Kota, dan APBD Provinsi.** Persentase realisasi belanja pemerintah pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar 88,85% dari pagu anggaran, ini lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2024 yang tercatat sebesar 91,91%. Turunnya belanja pemerintah ini disebabkan oleh menurunnya persentase realisasi untuk seluruh kategori belanja pemerintah (APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten/Kota).

**Dari sisi pendapatan, struktur pendapatan pemerintah masih didominasi oleh pendapatan kabupaten/Kota, pendapatan APBN, dan pendapatan APBD Provinsi.** Persentase realisasi pendapatan pemerintah pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar 82,37% dari pagu anggaran, lebih rendah dibandingkan realisasi periode yang sama 2024 yang tercatat sebesar 95,87%. Turunnya pendapatan realisasi tersebut disebabkan dari rendahnya persentase realisasi untuk seluruh kategori pendapatan pemerintah.

1. Pertumbuhan realisasi belanja APBN, APBD kabupaten/kota dan APBD Provinsi tercatat pada periode catatan masing-masing turun sebesar 32,2% (yoy); 17,20% (yoy); dan 19,7% (yoy) lebih rendah dibanding triwulan III 2025 yang masing-masing turun sebesar 14,84% (yoy), tumbuh sebesar 1,97% (yoy); dan turun sebesar 13,18% (yoy).
2. Pertumbuhan realisasi pendapatan APBD kabupaten/kota, APBN, dan APBD tercatat pada periode catatan masing-masing turun sebesar 16,23% (yoy); 40,85% (yoy); 19,70% (yoy) turun sebesar 40,12% (yoy), dan 20,14% (yoy) lebih rendah dibanding triwulan III 2025 yang masing-masing turun sebesar tumbuh 7,71% (yoy) turun sebesar 40,12% (yoy), dan 20,14% (yoy).

Tabel II.1. Realisasi Keuangan Pemerintah Daerah Kalimantan Timur

Keterangan	Pagu 2024 (Rp Miliar)	Realisasi Triwulan IV 2024			Pagu 2025 (Rp Miliar)	Realisasi Triwulan III 2025			Realisasi Triwulan IV 2025		
		Nominal (Rp Miliar)	Persentase dari Pagu	Growth Realisasi (yoy)		Nominal (Rp Miliar)	Persentase dari Pagu	Growth Realisasi (yoy)	Nominal (Rp Miliar)	Persentase dari Pagu	Growth Realisasi (yoy)
Total Pendapatan daerah	123,397	118,305	95.87%	34.83%	106,622	63,105	59.80%	-15.89%	87,827	82.37%	-25.76%
APBN	44,024	42,691	96.97%	-10.15%	36,006	16,326	45.68%	-40.12%	25,251	70.13%	-40.85%
APBD Provinsi	21,222	22,084	104.06%	34.88%	19,149	13,398	66.72%	-20.14%	17,734	92.61%	-19.70%
APBD Kabupaten/Kota	58,151	53,530	92.05%	79.54%	51,468	33,381	67.14%	7.71%	44,842	87.13%	-16.23%
Total Belanja daerah	184,392	169,475	91.91%	56.52%	144,248	80,435	57.85%	-9.86%	128,168	88.85%	-24.37%
APBN	95,918	93,548	97.53%	42.54%	66,203	44,425	68.18%	-14.84%	63,404	95.77%	-32.22%
APBD Provinsi	22,198	20,464	92.19%	9.66%	21,697	10,231	48.88%	-13.18%	18,841	86.84%	-7.93%
APBD Kabupaten/Kota	66,275	55,464	83.69%	161.50%	56,348	25,779	48.69%	1.97%	45,924	81.50%	-17.20%

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kaltim dan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kaltim, diolah

## 2.2. REALISASI BELANJA DAN PENDAPATAN PROVINSI

Pertumbuhan realisasi belanja dan pendapatan daerah secara tahunan untuk APBD Pemprov Kaltim pada triwulan IV 2025 membaik dibandingkan periode triwulan III 2025. Perbaikan kinerja belanja didorong utamanya oleh perbaikan pertumbuhan (secara tahunan) terhadap realisasi komponen transfer dan komponen belanja modal dibandingkan dengan triwulan III 2025. Sejalan

dengan itu, realisasi pendapatan daerah tingkat provinsi juga membaik, didukung oleh membaiknya pertumbuhan tahunan pendapatan transfer dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Meski demikian, kinerja pendapatan masih lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, seiring penyesuaian kebijakan pemerintah pusat terkait penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) kepada pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota (Tabel II.2).

Tabel II.2. Realisasi APBD Pemprov Kaltim Triwulan IV 2024 serta Triwulan III dan IV 2025

	2025				2025			
	Pagu	Realisasi Tw-III		Growth (yoy)	Pagu	Realisasi Tw-IV		Growth (yoy)
	Rp juta	Rp juta	%	%	Rp juta	Rp juta	%	%
PENDAPATAN (I+II+III)	20.080.499	13.397.933	66,72	-20,14	19.149.235	17.733.790	92,61	-19,70
I. PAD	10.035.158	6.520.056	64,97	-12,91	9.566.413	8.772.223	91,70	-14,33
II. Pendapatan Transfer	9.843.291	6.592.976	66,98	-27,96	9.277.648	8.672.180	93,47	-25,87
III. Lain-lain Pendapatan yang sah	202.050	284.901	141,01	105,92	305.173	289.387	94,83	98,18

	2025				2025			
	Pagu	Realisasi Tw-III		Growth (yoy)	Pagu	Realisasi Tw-IV		Growth (yoy)
	Rp juta	Rp juta	%	%	Rp juta	Rp juta	%	%
BELANJA (I+II+III+IV)	20.930.499	10.230.588	48,88	-13,18	21.696.885	18.840.895	86,84	-7,93
I. Belanja Operasional	12.095.188	6.268.857	51,83	-6,47	9.956.853	8.212.314	82,48	-12,04
II. Belanja Modal	3.996.899	1.290.186	32,28	-35,20	4.880.766	4.216.824	86,40	-13,41
III. Belanja tidak terduga	174.966	-	0,00	0,00	101.801	54.460	53,50	-15,21
IV. Transfer	4.663.446	2.671.545	57,29	-13,56	6.757.465	6.357.297	94,08	44,77

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kaltim, diolah

**Realisasi Belanja**

**Realisasi belanja daerah Pemprov Kaltim hingga triwulan IV 2025 membaik dibandingkan dengan realisasi belanja daerah triwulan sebelumnya.** Pada triwulan IV 2025, realisasi belanja Pemerintah Provinsi Kaltim terkontraksi 7,93% (yoy), lebih baik dibandingkan dengan periode triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 13,18% (yoy) (Tabel II.3). Membaiknya realisasi belanja daerah Provinsi Kaltim tersebut terutama didukung oleh perbaikan realisasi untuk komponen transfer yang naik cukup signifikan sebesar 44,77% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan realisasi triwulan III 2025 yang turun sebesar 13,56% (yoy). Lebih lanjut, perbaikan realisasi belanja daerah juga didukung oleh perbaikan komponen belanja modal meski masih terkontraksi sebesar 13,41% (yoy), membaik dibandingkan realisasi penurunan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 35,20% (yoy). Membaiknya realisasi belanja transfer pada belanja bantuan keuangan untuk

meningkatkan kualitas desentralisasi fiskal guna mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah terutama ke sektor prioritas yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi seperti infrastruktur, pertanian, dan pariwisata. Sejalan dengan itu, perbaikan realisasi belanja daerah juga didukung oleh membaiknya realisasi belanja modal, terutama untuk sub komponen belanja tanah telah tumbuh positif sebesar 34,82% (yoy), lebih baik dibandingkan dengan triwulan III 2025 yang terkontraksi 98,37% (yoy). Perbaikan realisasi komponen belanja modal tersebut tidak terlepas oleh kebutuhan strategis untuk mengamankan lahan bagi infrastruktur pendukung IKN serta kawasan industri.

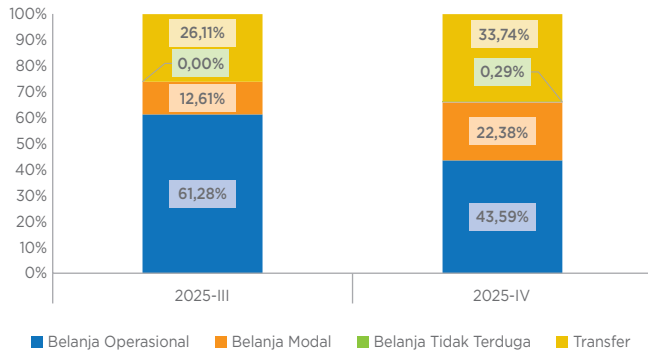
**Dari sisi komponen pembentuknya, struktur belanja daerah masih didominasi oleh komponen belanja operasional.** Pangsa komponen belanja operasional terhadap total realisasi belanja daerah pada triwulan IV 2025 mencapai 43,59%, diikuti oleh komponen belanja transfer sebesar 33,74%, komponen belanja modal sebesar 22,38%, serta

**Tabel II.3. Realisasi Belanja APBD Pemprov Kaltim Triwulan IV 2024 serta Triwulan III dan IV 2025**

	2025				2025			
	Pagu	Realisasi Tw-III			Pagu	Realisasi Tw-IV		
	Rp Juta	Rp juta	% trhdp pagu	% Growth (yoy)	Rp Juta	Rp juta	% trhdp pagu	% Growth (yoy)
<b>BELANJA (I+II+III+IV)</b>	<b>20.930.499</b>	<b>10.230.588</b>	<b>48,88</b>	<b>-13,18</b>	<b>21.696.858</b>	<b>18.840.895</b>	<b>86,84</b>	<b>-7,93</b>
<b>I. Belanja Operasional</b>	<b>12.095.188</b>	<b>6.268.857</b>	<b>51,83</b>	<b>-6,47</b>	<b>9.956.826</b>	<b>8.212.314</b>	<b>82,48</b>	<b>-26,27</b>
Belanja Pegawai	4.626.330	2.306.484	49,86	2,00	3.802.102	3.170.104	83,38	-1,73
Belanja Barang	4.680.831	2.296.506	49,06	-4,76	5.410.502	4.359.566	80,58	-11,01
Belanja Hibah	710.193	423.550	59,64	-52,99	710.046	658.437	92,73	-44,90
Belanja Subsidi	-	-	0,00	-	10.000	1.710	17,10	-
Belanja Bantuan sosial	24.584	12.885	52,41	94,20	24.176	22.497	93,06	30,97
Belanja Bantuan Keuangan	2.053.251	1.229.431	59,88	9,56	-	-	-	-
<b>II. Belanja Modal</b>	<b>3.996.899</b>	<b>1.290.186</b>	<b>32,28</b>	<b>-35,20</b>	<b>4.880.766</b>	<b>4.216.824</b>	<b>86,40</b>	<b>-13,41</b>
Belanja Tanah	118.508	405	0,34	-98,37	120.295	105.175	87,43	34,82
Belanja Peralatan Mesin	741.172	239.619	32,33	-39,21	1.198.746	1.047.366	87,37	-8,33
Belanja Bangunan dan Gedung	1.139.152	186.992	16,42	-73,44	1.229.788	945.344	76,87	-51,85
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.958.143	845.774	43,19	0,30	2.281.998	2.082.006	91,24	29,12
Belanja Aset Tetap Lainnya	20.438	13.564	66,37	-27,67	24.714	15.886	64,28	-61,95
Belanja Aset Lainnya	19.486	3.832	19,67	0,00	25.225	21.047	83,44	-34,16
<b>III. Belanja tidak terduga</b>	<b>174.966</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>101.801</b>	<b>54.460</b>	<b>53,50</b>	<b>-15,21</b>
Belanja tidak terduga	174.966	-	0,00	-	101.801	54.460	53,50	-15,21
<b>IV. Transfer</b>	<b>4.663.446</b>	<b>2.671.545</b>	<b>57,29</b>	<b>-13,56</b>	<b>6.757.465</b>	<b>6.357.297</b>	<b>94,08</b>	<b>44,77</b>
Bagi Hasil Pajak ke Kab/Kota/Desa	4.663.446	2.671.545	57,29	-13,56	4.696.714	4.312.086	91,81	-1,81
Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-	2.060.751	2.045.211	99,25	-

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kaltim, diolah

**Grafik II.1 Komponen Realisasi Belanja APBD Pemprov Kaltim Triwulan IV 2024 dan 2025 (dalam %)**



Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kaltim, diolah

komponen belanja tidak terduga sebesar 0,29%. Struktur proporsi belanja daerah ini relatif sejalan dengan realisasi triwulan sebelumnya, dengan komponen belanja operasional masih menjadi yang dominan yaitu sebesar 61,28% (Grafik II.1).

### Realisasi Pendapatan

**Realisasi pendapatan daerah Provinsi Kaltim hingga triwulan IV 2025 membaik dibandingkan dengan realisasi pendapatan triwulan sebelumnya.** Pada triwulan IV 2025, realisasi

pendapatan daerah Provinsi Kaltim berkontraksi sebesar 19,70% (yoy), membaik dibandingkan dengan periode triwulan sebelumnya yang tercatat berkontraksi sebesar 20,14% (yoy) (Tabel II.4). Perbaikan realisasi pendapatan daerah tersebut, didorong utamanya oleh realisasi komponen pendapatan transfer, terutama pada sub komponen penerimaan bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak & dana alokasi umum/khusus, yang turun tidak sedalam periode sebelumnya. Perbaikan realisasi komponen pendapatan transfer didukung oleh kebijakan pemerintah pusat yang meningkatkan realisasi penyaluran TKD sebagai stimulus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

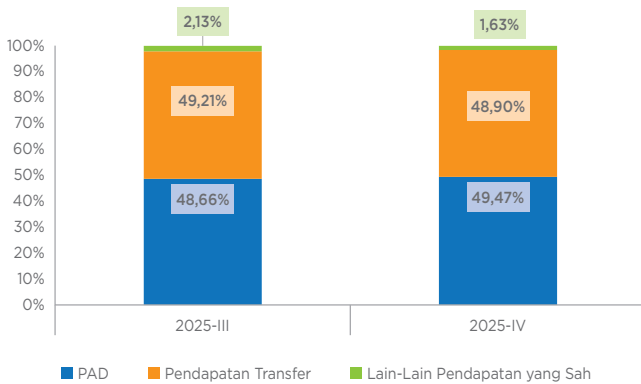
**Dari sisi komponen pembentuk pendapatan daerah, komponen PAD memiliki pangsa terbesar dibandingkan komponen lainnya.** Pada triwulan IV 2025, pangsa PAD tercatat sebesar 49,47%, diikuti oleh pendapatan transfer sebesar 48,90%, serta lain-lain pendapatan yang sah sebesar 1,63%. Komposisi tersebut relatif sejalan dengan triwulan III 2025, dimana pangsa PAD tercatat sebesar 48,66%, pendapatan transfer 49,21%, dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar 2,13% (Grafik II.2).

**Tabel II.4. Realisasi Pendapatan APBD Pemprov Kaltim Triwulan IV 2024 serta Triwulan III dan IV 2025**

	2025				2025			
	Pagu	Realisasi Tw-III		Pagu-P	Realisasi Tw-IV		% Growth (yoy)	
		Rp Juta	Rp juta		% trhdp pagu	Rp juta		Rp juta
<b>PENDAPATAN (I+II+III)</b>	20,080,499	13.397.933	66,72	-20,14	19.149.235	17.733.790	92,61	-19,70
<b>I. PAD</b>	10,035,158	6.520.056	64,97	-12,91	9.566.413	8.772.223	91,70	-14,33
Pajak daerah	8,400,000	5.085.477	60,54	-20,24	7.937.566	6.888.345	86,78	-19,64
Retribusi daerah	1,070,333	896.911	83,80	27,45	1.114.869	1.245.385	111,71	13,13
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yg dipisahkan	449,310	319.280	71,06	91,36	377.458	368.026	97,50	54,83
Lain-lain PAD yang sah	115,515	218.389	189,06	-9,02	136.519	270.467	198,12	-17,91
<b>II. Pendapatan Transfer (a+b)</b>	9,843,291	6.592.976	66,98	-27,96	9.277.648	8.672.180	93,47	-25,87
a. Dana Perimbangan	9,843,291	6.592.976	66,98	-27,96	9.277.648	8.672.180	93,47	-25,87
Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak & Dana Alokasi Umum/Khusus	9,843,291	6.592.976	66,98	-27,96	9.277.648	8.672.180	93,47	-25,87
b. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
Dana Penyesuaian	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. Lain-lain Pendapatan yang sah</b>	202,050	284.901	141,01	105,92	305.173	289.387	94,83	98,18
Pendapatan Hibah	13,864	14.186	102,32	-0,56	28.361	18.671	65,83	-18,23
Pendapatan Lainnya	188,186	270.715	143,86	-	276.812	270.715	97,80	119,76

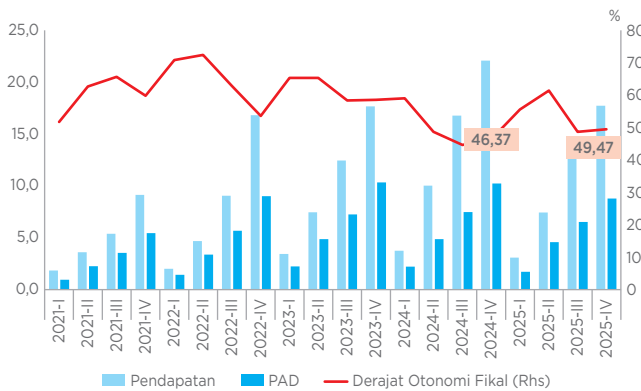
Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kaltim, diolah

**Grafik II.2 Komponen Realisasi Pendapatan APBD Pemprov Kaltim (dalam %)**



Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kaltim, diolah

**Grafik II.3 Derajat Otonomi Fiskal Pemprov Kaltim**



Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kaltim, diolah

Selanjutnya, derajat otonomi fiskal (DOF) APBD Provinsi Kalimantan Timur hingga realisasi triwulan IV 2025 berada pada 49,47% yang mencerminkan tingkat kemandirian fiskal yang relatif terjaga. Nilai tersebut mencerminkan bahwa kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah berada pada level yang hampir seimbang dengan pendapatan transfer. Kinerja pada periode laporan mengalami perbaikan dibandingkan triwulan III 2025 yang sebesar 48,66%. Hal tersebut mencerminkan bahwa kemampuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam membiayai belanjanya cukup kuat, dan tidak bergantung pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Secara tahunan, Kinerja pada periode laporan mengalami peningkatan bila dibandingkan periode yang sama tahun 2024 yang sebesar 46,37%, sehingga menunjukkan upaya Pemerintah

Provinsi Kalimantan Timur untuk terus mendorong kemandirian fiskal dengan memperkuat dan mendorong peningkatan realisasi PAD telah mulai memberikan hasil dan dampak positif terhadap perbaikan kemandirian fiskal daerah (Grafik II.3).

### 2.3. REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN/KOTA

#### Realisasi Belanja

Pertumbuhan secara tahunan dari realisasi belanja daerah pada tingkat kabupaten/kota pada triwulan IV 2025 lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Realisasi belanja daerah pada tingkat kabupaten/kota pada periode laporan tercatat sebesar Rp44,82 triliun atau 79,54% dari pagu 2025, turun 19,19% (yoy) lebih dalam dibandingkan dengan periode triwulan III 2025 yang tumbuh sebesar 1,97% (yoy). Penurunan ini mencerminkan adanya perlambatan belanja pada sebagian besar kabupaten/kota dengan pagu besar diantaranya Kota Samarinda, Kota Bontang, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Barat, Kab. Kutai Timur, Kab. Paser, Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Berau. Kondisi ini disebabkan oleh penerapan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran belanja pemerintah baik pusat maupun daerah ditengah realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota yang juga menurun. Kebijakan efisiensi anggaran tersebut menurunkan anggaran belanja terutama pada belanja barang dan belanja modal.

Secara spasial, realisasi belanja daerah terendah adalah Kabupaten Bontang dengan nilai nominal Rp1,55 triliun atau 86,47% dari pagu 2025 serta terkontraksi paling dalam sebesar 49,85% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 0,36% (yoy). Sementara itu, hanya Kabupaten Mahakam Ulu mencatatkan pertumbuhan realisasi belanja daerah positif dengan nilai nominal sebesar Rp1,95 triliun atau 79,09% dari pagu 2025, serta tumbuh 34,38% (yoy) (Tabel II.5).

Tabel II.5. Realisasi Belanja APBD Kabupaten /Kota Kaltim Triwulan IV 2024 serta Triwulan III dan IV 2025

Kabupaten/Kota	Tw-IV 2024				Tw-III 2025				Tw-IV 2025			
	Pagu	Realisasi		Growth (yoy)	Pagu	Realisasi		Growth (yoy)	Pagu	Realisasi Tw-III		Growth (yoy)
	Rp Miliar	Rp Miliar	% trhdp pagu	%	Rp Miliar	Rp Miliar	% trhdp pagu	%	Rp Miliar	Rp Miliar	% trhdp pagu	%
<b>BELANJA</b>												
Kota Samarinda	5.726,58	5.328,06	93,04	21,29	5.827,68	3.074,49	52,76	6,80	5.800,54	5.130,85	88,45	-3,70
Kota Balikpapan	4.545,98	3.770,75	82,95	3,73	4.755,01	2.184,82	45,95	5,30	4.755,01	4.111,67	86,47	9,04
Kota Bontang	3.360,93	3.085,12	91,79	40,68	3.172,71	1.503,79	47,40	0,36	3.173,02	1.547,34	48,77	-49,85
Kab. Kutai Kartanegara	14.531,00	12.576,14	86,55	24,79	11.665,91	5.901,95	50,59	-7,86	11.351,03	8.987,75	79,18	-28,53
Kab. Kutai Barat	4.955,50	3.478,43	70,19	8,27	3.736,58	1.609,23	43,07	-18,50	4.875,56	2.994,68	61,42	-13,91
Kab. Kutai Timur	14.801,33	11.894,83	80,36	45,42	8.413,10	4.188,41	49,78	15,55	9.994,42	8.262,25	82,67	-30,54
Kab. Paser	5.388,19	4.300,65	79,82	9,74	4.937,62	1.946,17	39,42	9,72	4.937,62	3.954,79	80,10	-8,04
Kab. Penajam Paser Utara	3.199,58	2.981,55	93,19	44,34	2.403,72	1.228,32	51,10	-18,62	2.443,61	2.056,06	84,14	-31,04
Kab. Berau	6.999,19	6.296,77	89,96	40,34	5.174,23	2.586,60	49,99	-6,57	6.041,36	5.420,80	89,73	-13,91
Kab. Mahakam Ulu	2.767,00	1.751,28	63,29	5,94	2.858,37	1.555,59	54,42	101,09	2.975,63	2.353,31	79,09	34,38
<b>Total Kab/Kota Kaltim</b>	<b>66.275,29</b>	<b>55.463,58</b>	<b>83,69</b>	<b>26,58</b>	<b>52.944,92</b>	<b>25.779,37</b>	<b>48,69</b>	<b>1,97</b>	<b>56.347,81</b>	<b>44.819,51</b>	<b>79,54</b>	<b>-19,19</b>

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kaltim, diolah

### Realisasi Pendapatan

Realisasi pendapatan daerah pada tingkat kabupaten/kota di Wilayah Kalimantan Timur pada triwulan IV 2026 termoderasi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Realisasi pendapatan daerah di tingkat kabupaten/kota pada triwulan laporan tercatat sebesar Rp42,01 triliun atau 81,63% dari pagu 2025, turun 21,52% (yoy) lebih dalam dibandingkan dengan periode

triwulan III 2025 yang tumbuh 7,71% (yoy). Secara spasial, penurunan realisasi belanja daerah terjadi di seluruh daerah kabupaten kota se-Kalimantan Timur selain Kota Balikpapan dan Kab. Kutai Barat. realisasi pendapatan daerah ini tidak terlepas dari dampak kebijakan pemerintah pusat dalam implementasi kebijakan efisiensi dan realokasi anggaran untuk program prioritas pemerintah pusat sehingga berdampak pada

Tabel II.6 Realisasi Pendapatan APBD Kabupaten/Kota Kaltim Triwulan IV 2024 serta Triwulan III dan IV 2025

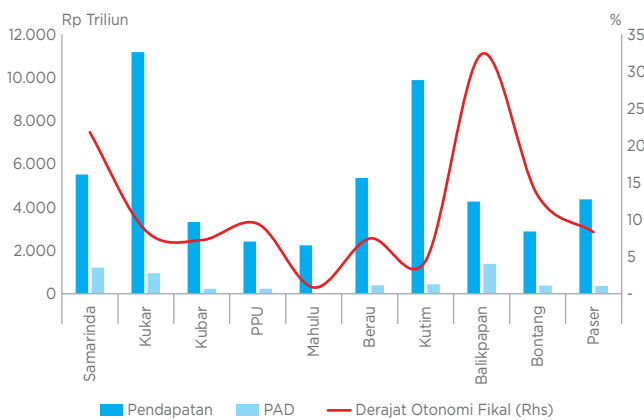
Kabupaten/Kota	Tw-IV 2024				Tw-III 2025				Tw-IV 2025			
	Pagu	Realisasi		Growth (yoy)	Pagu	Realisasi		Growth (yoy)	Pagu	Realisasi		Growth (yoy)
	Rp Miliar	Rp Miliar	% trhdp pagu	%	Rp Miliar	Rp Miliar	% trhdp pagu	%	Rp Miliar	Rp Miliar	% trhdp pagu	%
<b>PENDAPATAN</b>												
Kota Samarinda	5.140,94	5.095,47	99,12	26,64	5.327,68	3.511,48	65,91	1,34	5.516,19	4.933,53	89,44	-3,18
Kota Balikpapan	4.009,36	3.811,57	95,07	14,58	4.262,78	2.813,21	65,99	23,41	4.262,78	4.034,42	94,64	-68,45
Kota Bontang	2.780,74	2.775,76	99,82	14,24	2.889,34	2.176,34	75,32	93,82	2.890,86	2.752,31	95,21	-0,84
Kab. Kutai Kartanegara	14.312,02	12.539,40	87,61	63,33	11.500,00	7.026,02	61,10	-18,40	11.185,09	9.067,51	81,07	-27,69
Kab. Kutai Barat	3.173,88	3.328,20	104,86	-19,17	3.646,58	2.162,08	59,29	7,76	3.320,34	3.352,50	100,97	0,73
Kab. Kutai Timur	13.066,94	10.347,32	79,19	22,86	8.425,45	6.329,40	75,12	19,82	9.895,42	8.370,09	84,59	-19,11
Kab. Paser	4.727,10	4.673,36	98,86	49,94	4.366,15	2.777,30	63,61	-6,60	4.366,15	3.436,97	78,72	-26,46
Kab. Penajam Paser Utara	2.954,87	2.853,28	96,56	27,81	2.404,18	1.559,93	64,88	-3,24	2.413,45	2.057,73	85,26	-27,88
Kab. Berau	6.107,98	6.190,42	101,35	32,31	4.686,23	3.828,89	81,71	50,13	5.367,93	5.047,58	94,03	-18,46
Kab. Mahakam Ulu	1.877,26	1.914,75	102,00	-11,89	2.208,38	1.196,47	54,18	9,84	2.249,30	1.789,60	79,56	-6,54
<b>Total Kab/Kota Kaltim</b>	<b>58.151,09</b>	<b>53.529,54</b>	<b>92,05</b>	<b>26,85</b>	<b>49.716,76</b>	<b>33.381,12</b>	<b>67,14</b>	<b>7,71</b>	<b>51.467,53</b>	<b>44.842,25</b>	<b>87,13</b>	<b>-16,23</b>

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kaltim, diolah

penurunan realisasi TKD. Kabupaten Mahakam Ulu mencatatkan realisasi pendapatan daerah terendah dengan nilai nominal sebesar Rp1,7 triliun atau 79,56% dari pagu 2025, serta tumbuh lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Sementara itu, realisasi pendapatan daerah tertinggi dicapai oleh Kota Balikpapan dengan realisasi 4,03 triliun atau 94,64% dari pagu dengan pertumbuhan tetap terjaga (Tabel II.6).

**Tingkat kemandirian fiskal pada triwulan IV 2025 pada Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur secara keseluruhan termasuk ke dalam kategori kapasitas Fiskal Lemah<sup>3</sup>.** Kota Mahakam Ulu memiliki tingkat kemandirian fiskal paling rendah dibanding Kabupaten/Kota lain yaitu sebesar 0,85%. Sementara itu, Pemda tingkat I di Wilayah Provinsi Kaltim memiliki tingkat kemandirian fiskal tertinggi secara berurutan yaitu pada Kota Balikpapan dan Kota Samarinda dengan tingkat kemandirian fiskal masing-masing sebesar 32,37% dan 21,81%. Kondisi ini tidak jauh berbeda bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dengan kondisi kemandirian fiskal di level kabupaten/kota (Grafik II.4).

**Grafik II.4 Derajat Otonomi Fiskal Pemerintah Kab/ Kota**



Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kaltim, diolah

## 2.4. REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA APBN WILAYAH KALTIM

Pertumbuhan realisasi belanja dan pendapatan APBN pada triwulan IV 2025 termoderasi dibandingkan pertumbuhan realisasi triwulan IV 2025. Lebih lanjut, perkembangan realisasi belanja APBN di Wilayah Provinsi Kaltim pada periode laporan tercatat turun sebesar 32,22% (yoy), lebih dalam dibanding pertumbuhan realisasi periode triwulan III 2025 yang turun sebesar 14,84% (yoy). Sementara itu, bila ditinjau dari sisi pendapatan, realisasi pendapatan APBN tercatat berkontraksi sebesar 40,85% (yoy), lebih dalam dibanding pada triwulan III 2025 yang berkontraksi sebesar 40,12% (Tabel II.7).

### Kinerja Belanja APBN Kalimantan Timur

Pertumbuhan realisasi belanja APBN Provinsi Kaltim pada triwulan IV 2025 termoderasi dibandingkan dengan realisasi belanja pada periode triwulan sebelumnya. Realisasi belanja APBN Provinsi Kaltim secara nominal adalah Rp63.4 triliun miliar atau secara pertumbuhan turun sebesar 32,22% (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2024. Namun, lebih tinggi dari realisasi periode triwulan III 2025 yang sebesar Rp44.4 triliun. Kondisi tersebut, disebabkan oleh turunnya realisasi belanja pada komponen belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah. Belanja Pemerintah Pusat juga turun sebesar 55,05% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang turun 45,82% (yoy). Hal ini disebabkan oleh penurunan pada sub komponen belanja modal, sejalan dengan penyesuaian pelaksanaan anggaran pada sejumlah proyek infrastruktur Kementerian/ Lembaga di Kalimantan Timur, termasuk yang terkait dengan pembangunan IKN.

3. Pendapatan Daerah bergantung dengan Pendapatan Transfer Pusat.

Tabel II.7. Realisasi Pendapatan dan Belanja APBN di Kalimantan Timur Triwulan IV 2024, serta Triwulan III dan IV 2025

	Tw-III 2025				Tw-IV 2025			
	Pagu	Realisasi		Growth (yoy)	Pagu	Realisasi		Growth (yoy)
	Rp Miliar	Rp Miliar	% trhdp pagu	%	Rp Miliar	Rp Miliar	% trhdp pagu	%
Pendapatan Negara	35.735,19	16.325,56	45,68	-40,12	36.005,52	25.251,38	70,13	-40,85
Penerimaan Perpajakan	33.591,60	14.065,53	41,87	-43,23	33.652,19	22.288,20	66,23	-43,22
<b>a. Pajak Dalam Negeri</b>	<b>32.031,56</b>	<b>11.987,19</b>	<b>37,42</b>	<b>-49,27</b>	<b>32.029,86</b>	<b>19.499,84</b>	<b>60,88</b>	<b>-47,33</b>
i. Pajak Penghasilan	13.048,16	4.730,88	36,26	-62,57	13.048,16	8.048,26	61,68	-52,84
ii. Pajak Pertambahan Nilai	18.480,36	3.835,48	20,75	-57,57	18.480,36	8.258,33	44,69	-47,07
iii. Pajak Bumi dan Bangunan	480,13	367,74	76,59	-79,95	480,13	732,58	152,58	-82,51
iv. Cukai	1,93	0,95	49,38	-66,43	20,98	2.458,99	11720,64	1425,71
v. Pajak Lainnya	20,98	3.052,13	14.547,88	2626,58	0,23	1,68	730,43	-52,68
<b>b. Pajak Perdagangan Internasional</b>	<b>1.560,05</b>	<b>2.078,34</b>	<b>133,22</b>	<b>81,11</b>	<b>1.622,33</b>	<b>2.788,36</b>	<b>171,87</b>	<b>24,84</b>
i. Bea Masuk	1.153,17	809,09	70,16	-6,34	1.320,59	1.058,60	80,16	-9,76
ii. Bea Keluar/Pungutan Ekspor	406,88	1.269,24	311,95	347,40	301,74	1.729,76	573,26	63,10
Penerimaan Negara Bukan Pajak	2.143,59	2.260,03	105,43	-9,10	2.353,33	2.963,18	125,91	-13,77
a. PNBP Lainnya	1.639,33	1.718,67	104,84	-16,73	1.667,57	2.264,61	135,80	-21,08
b. Pendapatan Badan Layanan Umum	504,26	541,36	107,36	28,21	685,76	698,57	101,87	23,28
Belanja Negara	65.154,89	44.425,14	68,18	-14,84	66.203,45	63.403,67	95,77	-32,22
Belanja Pemerintah Pusat	22.893,17	13.723,98	59,95	-45,82	23.907,94	23.201,58	97,05	-55,05
Belanja Pegawai	3.660,57	2.840,88	77,61	7,89	3.908,90	3.856,42	98,66	11,81
Belanja Barang	3.633,80	1.731,83	47,66	-39,91	3.712,92	3.296,15	88,78	-38,88
Belanja Modal	15.588,05	9.145,28	58,67	-53,83	16.275,38	16.038,27	98,54	-62,50
Belanja Bantuan Sosial	10,74	5,99	55,71	-26,41	10,74	10,74	100,00	8,81
Transfer Ke Daerah	42.261,72	30.701,17	72,65	14,39	42.295,51	40.202,09	95,05	-4,12
Dana Bagi Hasil	32.388,11	24.094,79	74,39	25,23	6.387,21	6.181,05	96,77	-80,52
Dana Alokasi Umum	6.354,13	4.239,43	63,72	-14,59	178,48	148,78	83,36	-97,62
Dana Alokasi Khusus Fisik	178,48	66,23	37,11	-77,54	2.472,18	2.411,87	97,56	186,95
Dana Alokasi Khusus Nonfisik	2.471,47	1.726,49	69,86	5,21	32.388,11	30.743,24	94,92	1321,73
Dana Insentif Daerah	59,48	29,74	50,00	-62,31	59,48	59,48	100,00	-54,21
Dana Desa	810,05	544,50	67,22	-12,10	810,05	657,67	81,19	-18,65
Surplus/(Defisit Anggaran)	(29.419,70)	(28.099,58)	95,51	12,82	(30.197,93)	(38.152,29)	126,34	(24,98)

Sumber: Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kaltim, diolah

**Realisasi belanja modal APBN di Kalimantan Timur pada triwulan IV 2025 tercatat lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.** Kondisi ini antara lain dipengaruhi oleh tingginya realisasi belanja modal pada triwulan IV 2024 seiring percepatan pembangunan sejumlah proyek strategis, khususnya yang terkait dengan pengembangan IKN, sehingga menciptakan basis yang relatif tinggi (*high baseline*). Selain itu, peralihan sebagian kewenangan dan eksekusi anggaran proyek IKN ke Otorita IKN (OIKN) sebagai Pengguna Anggaran (PA) tersendiri (di luar anggaran belanja modal APBN Kaltim) di tahun 2025 ini juga turut mempengaruhi

perhitungan realisasi belanja modal APBN Kaltim. Lebih lanjut, pagu belanja untuk IKN yang tercatat di periode pelaporan mencapai Rp14,79 triliun atau 61,86% dari total pagu Kaltim sebesar Rp23,91 triliun, dengan realisasi hingga triwulan IV sebesar Rp14,73 triliun atau sebesar 99,2% dari pagu IKN.

**Belanja Transfer ke Daerah (TKD) di periode laporan turun sebesar 4,12% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya meningkat sebesar 14,39% (yoy).** Penurunan ini disebabkan oleh penurunan seluruh komponen TKD selain Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik seiring kebijakan efisiensi fiskal nasional untuk program

prioritas nasional (makan bergizi gratis, sekolah rakyat, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, swasembada pangan).

### Kinerja Pendapatan APBN Kalimantan Timur

**Kinerja pendapatan APBN pada triwulan IV 2025 tercatat lebih rendah sejalan dengan penurunan realisasi belanja pemerintah.** Pertumbuhan realisasi pendapatan pemerintah pada periode laporan berkontraksi sebesar 40,85% (yoy), dengan nominal realisasi sebesar Rp16,3 triliun atau 45,68% dari pagu atau sedikit lebih dalam dibandingkan kontraksi triwulan III 2025 sebesar 40,12% (yoy). Kondisi ini disebabkan oleh menurunnya penerimaan perpajakan di wilayah Kalimantan Timur, yang berkontraksi sebesar 43,22% (yoy) pada triwulan IV 2025. Hal ini sejalan dengan penyesuaian sistem administrasi perpajakan nasional yaitu penerapan *coretax* yang mengalihkan pencatatan pajak bagi Wajib Pajak bernominal besar ke pusat. Selain itu, beban restitusi yang mencapai Rp7,76 triliun serta rampungnya proyek kilang minyak turut berdampak pada penerimaan. Secara komposisi, PPN Dalam Negeri masih mendominasi pendapatan wilayah dengan kontribusi 41,32%, disusul sektor Administrasi Pemerintahan yang menyumbang 36,10%. Lebih lanjut, penerimaan kepabeanan tumbuh sebesar 24,84% (yoy) melambat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 81,11% akibat menurunnya aktivitas impor komponen mesin serta dampak dari berkurangnya jumlah penindakan kasus pelanggaran cukai yang berujung pada denda administrasi, sejalan dengan implementasi PMK Nomor 237/PMK.04/2022.

**Lebih lanjut, pertumbuhan realisasi setoran PNBPN di Provinsi Kalimantan Timur pada periode laporan lebih rendah dibandingkan triwulan III**

**2025.** Realisasi PNBPN mencapai Rp2,26 triliun berkontraksi sebesar 13,77% (yoy) lebih dalam dibanding triwulan sebelumnya yang berkontraksi 9,10% (yoy). Penurunan realisasi komponen ini disebabkan oleh pendapatan jasa kepelabuhan yang turun 6,36% (yoy) akibat penurunan volume logistik laut dan oleh rendahnya penerimaan jasa rumah sakit serta administrasi kendaraan (STNK dan BPKB).

### Transfer ke Daerah dan Dana Desa

**Sampai dengan triwulan IV 2025, penyaluran Dana Desa di Kalimantan Timur secara keseluruhan menunjukkan realisasi mencapai Rp657,67 miliar atau 81,19% dari jumlah alokasi sebanyak Rp810 miliar.** Dari total 841 desa penerima *earmark*, tercatat sebanyak 829 desa telah menerima penyaluran tahap I dengan realisasi mencapai Rp252,39 miliar dan pada tahap II sebesar Rp167,47 miliar. Sementara itu, penyaluran untuk Dana Desa reguler telah terealisasi kepada 827 desa dengan nilai Rp178,66 miliar pada tahap I dan Rp59,14 miliar pada tahap II (Tabel II.8).

**Secara spasial, Kabupaten Kutai Timur menjadi wilayah dengan realisasi dana desa tertinggi dengan nilai Rp134,98 miliar atau 89,80% dari pagu 2025 pada seluruh desa baik reguler maupun *earmark*.** Diikuti oleh Kabupaten PPU, Kabupaten Berau, Kabupaten Paser, dan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan realisasi mencapai lebih dari 80% dari alokasi dana desa keseluruhan. Sementara itu, Kabupaten Mahakam Ulu memiliki realisasi paling rendah dengan realisasi sebesar 64,16% atau sebesar Rp33,51 miliar. Realisasi anggaran Dana Desa *earmark* digunakan untuk bantuan pangan sebesar 45,93%, diikuti oleh BLT dan *stunting* yang masing-masing sebesar 22,61% dan 19,91%.

Tabel II.8 Realisasi Penyaluran Dana Desa per Pemerintah Daerah di Kalimantan Timur Triwulan III 2025

Nama Pemda	Jml Desa	Alokasi Dana Desa 2025 Rp Juta	Reguler						Earmark				Total Rp Juta %	
			Desa	Tahap I		Tahap II		Desa	Tahap I		Tahap II			
				Rp Juta	%	Rp Juta	%		Rp Juta	%	Rp Juta	%	Rp Juta	%
Kab. Paser	139	124.533	139	27.745,06	22,28	8.643	6,94	139	39.653,16	31,84	26.435	21,23	102.477	82,29%
Kab. Berau	100	101.531	100	21.685,39	21,36	9.220	9,08	100	31.808,06	31,33	20.911	20,60	83.624	82,36%
Kab. Kutai Barat	190	151.377	189	40.539,79	26,78	12.779	8,44	189	38.465,23	25,41	25.479	16,83	117.263	77,46%
Kab. Kutai Timur	139	150.314	139	24.267,62	16,14	15.581	10,37	139	57.276,26	38,10	37.855	25,18	134.980	89,80%
Kab. PPU	30	29.478	30	7.758,63	26,32	1.649	5,59	30	9.343,19	31,70	6.229	21,13	24.979	84,74%
Kab. Kutai Kartanegara	193	200.571	191	49.644,98	24,75	10.801	5,39	193	60.226,32	30,03	40.151	20,02	160.824	80,18%
Kab. Mahakam Ulu	50	52.246	39	7.018,18	13,43	468	0,90	39	15.619,52	29,90	10.413	19,93	33.519	64,16%
<b>JUMLAH</b>	<b>841</b>	<b>810.051</b>	<b>827</b>	<b>178.659,64</b>	<b>22,06</b>	<b>59.141,49</b>	<b>7,30</b>	<b>829</b>	<b>252.391,74</b>	<b>31,16</b>	<b>167.472</b>	<b>20,67</b>	<b>657.665</b>	<b>81,19%</b>

Sumber: Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kaltim, diolah

# 03

## Perkembangan Inflasi di Daerah





“

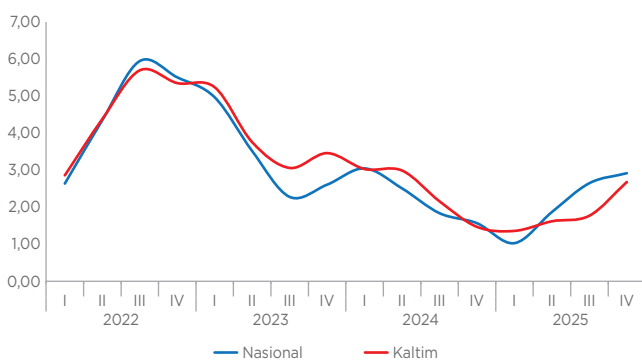
- Realisasi Inflasi Kalimantan Timur (Kaltim) pada triwulan IV 2025 tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan III 2025 yang disebabkan oleh peningkatan tekanan harga komoditas bahan makanan serta emas perhiasan. Lebih lanjut, cuaca ekstrem juga berpengaruh terhadap penurunan produktivitas dan kelancaran distribusi beberapa komoditas, khususnya bahan makanan. Namun demikian, laju inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan tekanan kelompok pakaian dan alas kaki.
- Secara spasial, realisasi kota sampel IHK Kaltim tertinggi pada triwulan IV 2025 terjadi di Kabupaten Berau tercatat sebesar 2,82% (yoy), serta terendah berada di Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar 2,08% (yoy). Tren laju inflasi di seluruh Kabupaten/Kota tercatat meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya terkecuali untuk Kabupaten Penajam Paser Utara.

### 3.1. GAMBARAN UMUM

Realisasi inflasi Kalimantan Timur (Kaltim) di triwulan IV 2025 tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Kondisi tersebut disebabkan oleh peningkatan laju inflasi kelompok bahan makanan, minuman, dan tembakau serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Inflasi pada periode laporan tercatat sebesar 2,68% (yoy), atau lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 1,77% (yoy) (Grafik III.1). Inflasi tersebut didorong oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau yang tercatat memiliki laju inflasi sebesar 4,72% (yoy) dengan andil inflasi yakni 1,40% (yoy). Selain itu, peningkatan laju inflasi Kaltim juga diakibatkan oleh inflasi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 12,55% (yoy) dengan andil sebesar 0,82% (yoy). Meskipun demikian kenaikan laju inflasi tahunan yang lebih tinggi tertahan oleh deflasi kelompok pakaian dan alas kaki serta kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga dengan laju deflasi masing masing sebesar 1,43% (yoy) dan 1,22% (yoy).

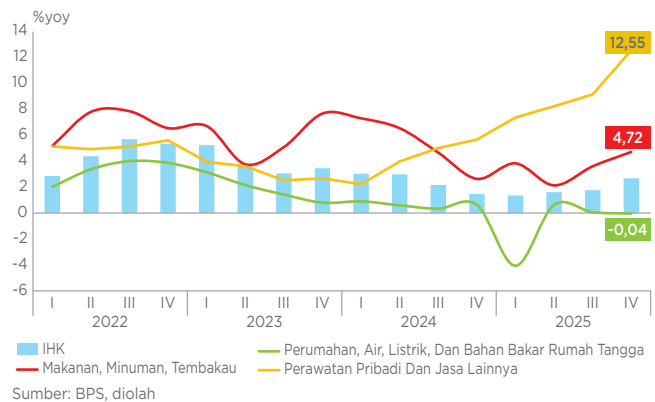
Peningkatan tekanan inflasi Kaltim didorong oleh meningkatnya sisi *demand* karena memasuki periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru) serta kenaikan harga emas perhiasan. Selain itu, peningkatan tekanan juga dipengaruhi sisi pasokan seiring dengan anomali cuaca. Kenaikan inflasi pada periode pelaporan khususnya kelompok bahan makanan lebih disebabkan oleh peningkatan

Grafik III.1 Inflasi Kaltim dan Nasional



Sumber: BPS, diolah

Grafik III.2 Kelompok Utama Pendorong Inflasi Kaltim



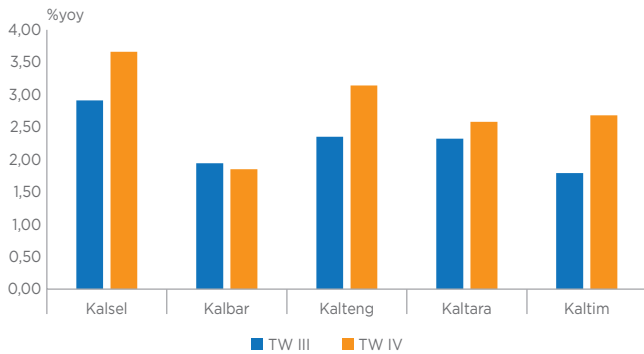
Sumber: BPS, diolah

*demand* karena aktivitas belanja masyarakat yang mengalami peningkatan menjelang perayaan Natal dan Tahun baru. Disamping itu, terdapat tekanan dari harga emas perhiasan sebagai dampak peningkatan harga emas global. Komoditas ini konsisten menjadi penyumbang inflasi tahunan secara 3 bulan berturut-turut pada periode laporan. Selain itu, dari sisi pasokan terdapat penurunan pasokan dari daerah sentra karena anomali cuaca yang berpengaruh pada proses produksi maupun kelancaran distribusi beberapa komoditas seperti bawang merah dan cabai rawit pada triwulan IV 2025.

Secara regional Kalimantan, rata - rata semua provinsi di Kalimantan mengalami peningkatan inflasi pada triwulan IV 2025 kecuali Provinsi Kalimantan Barat. Inflasi terendah hingga tertinggi provinsi di regional Kalimantan secara berturut turut terjadi pada Kalimantan Barat sebesar 1,85% (yoy), Kalimantan Utara sebesar 2,58% (yoy), Kalimantan Timur sebesar 2,68% (yoy), Kalimantan Tengah sebesar 3,14% (yoy), Kalimantan Selatan sebesar 3,66% (Grafik III.3).

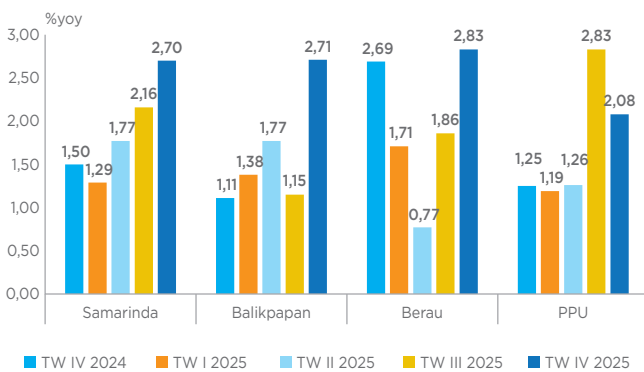
Secara spasial, inflasi di seluruh Kabupaten/Kota IHK di Kaltim tercatat meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya kecuali Kabupaten Penajam Paser Utara. Adapun peningkatan tekanan inflasi yang terjadi pada periode laporan lebih disebabkan oleh meningkatnya tekanan inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Pada triwulan IV 2025, inflasi tertinggi masing-masing tercatat di Kabupaten Berau sebesar 2,82% (yoy), Kota Balikpapan sebesar 2,71%

**Grafik III.3 Perbandingan Inflasi Gabungan Kota IHK di seluruh Provinsi di Kalimantan, triwulan III 2025 dan triwulan IV 2025**



Sumber: BPS, diolah

**Grafik III.4 Inflasi Samarinda, Balikpapan, Berau, dan PPU**



Sumber: BPS, diolah

(yoy) dan Kota Samarinda sebesar 2,70% (yoy). Adapun inflasi terendah pada periode laporan terjadi di Kabupaten Penajam Paser Utara dengan laju inflasi 2,08% (yoy) (Grafik III.4).

**3.1.1. Perkembangan Inflasi Daerah Berdasarkan Kelompok Pengeluaran**

Berdasarkan andilnya, inflasi Kaltim utamanya berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau, diikuti oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Pada triwulan IV 2025, kelompok makanan, minuman, dan tembakau tercatat mengalami tekanan inflasi sebesar 4,72% (yoy) dengan andil 1,40% (yoy). Selanjutnya kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya menjadi kontributor penyumbang inflasi tertinggi kedua dengan andil sebesar 0,82% (yoy) dan laju inflasi sebesar 12,55% (yoy). Realisasi kelompok ini lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, yakni sebesar 9,16% (yoy). Sementara itu, kelompok pakaian dan alas kaki tercatat mengalami deflasi lebih dalam sebesar 1,43% (yoy) dengan andil 0,06% (yoy), mengalami penurunan lebih dalam dibandingkan periode sebelumnya yang mengalami deflasi sebesar 1,02% (yoy) (Tabel III.1).

**Tabel III.1 Kelompok Barang Pembentuk Inflasi Kaltim (yoy)**

No	Kelompok Barang	Laju Inflasi Tahun 2024 (%yoy)				Andil Inflasi 2024 (%yoy)				Laju Inflasi Tahun 2025 (%yoy)				Andil Inflasi Tahun 2025 (%yoy)			
		Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
	<b>UMUM / TOTAL</b>	3,04	2,99	2,16	1,47	3,04	2,99	2,16	1,47	1,36	1,62	1,77	2,68	1,36	1,62	1,77	2,68
1	Makanan, Minuman Dan Tembakau	7,31	6,55	4,67	2,64	2,09	1,89	1,35	0,77	3,84	2,15	3,61	4,72	1,14	0,64	1,08	1,40
2	Pakaian Dan Alas Kaki	1,56	1,64	2,37	2,12	0,07	0,07	0,11	0,09	0,42	0,44	-1,02	-1,43	0,02	0,02	-0,05	-0,06
3	Perumahan, Air, Listrik, Dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,90	0,60	0,34	0,64	0,16	0,10	0,06	0,11	-4,06	0,63	0,07	-0,04	-0,69	0,11	0,01	-0,01
4	Perlengkapan, Peralatan Dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	-0,29	-0,76	(0,20)	-0,06	-0,01	-0,03	-0,01	0,00	-0,40	-0,84	-0,83	-1,23	-0,02	-0,04	-0,04	-0,05
5	Kesehatan	4,43	4,90	5,57	5,20	0,13	0,14	0,16	0,15	1,99	1,55	1,38	1,42	0,06	0,05	0,04	0,04
6	Transportasi	2,03	2,90	(0,40)	-2,03	0,27	0,39	-0,06	-0,28	0,88	-0,27	-1,36	1,79	0,12	-0,04	-0,18	0,24
7	Informasi, Komunikasi, Dan Jasa Keuangan	0,08	-0,34	(0,41)	-0,62	0,00	-0,02	-0,02	-0,03	-0,64	-0,17	-0,50	-0,32	-0,03	-0,01	-0,03	-0,02
8	Rekreasi, Olahraga, Dan Budaya	1,70	1,41	1,60	1,65	0,03	0,02	0,03	0,03	1,64	2,37	1,45	1,33	0,03	0,04	0,02	0,02
9	Pendidikan	1,08	0,81	1,71	1,71	0,05	0,04	0,08	0,07	1,38	2,37	2,67	2,80	0,06	0,10	0,12	0,12
10	Penyediaan Makanan Dan Minuman/ Restoran	1,22	0,80	1,48	1,92	0,07	0,04	0,03	0,20	0,74	2,14	2,03	1,65	0,04	0,22	0,21	0,18
11	Perawatan Pribadi Dan Jasa Lainnya	2,22	4,00	5,01	5,67	0,14	0,25	0,32	0,36	7,37	8,24	9,16	12,55	0,46	0,53	0,59	0,82

Sumber: BPS, diolah

Berdasarkan komoditasnya, emas perhiasan, beras, dan ikan layang tercatat konsisten menjadi andil penyumbang inflasi tahunan selama triwulan IV 2025. Kondisi ketidakpastian ekonomi global yang meningkat dan mendorong harga emas dunia yang terus melonjak. Adapun kenaikan komoditas beras konsisten menyumbang inflasi, hal ini disebabkan karena secara nasional defisit proyeksi produksi jika dibandingkan dengan konsumsi, kenaikan harga gabah petani, faktor musim dan iklim, permintaan cadangan beras pemerintah, serta inefisiensi distribusi. Adapun kecenderungan Provinsi Kalimantan Timur sebagai daerah konsumen sangat bergantung pada daerah sentra, sehingga ketika terdapat lonjakan harga beras, maka akan berdampak signifikan kepada peningkatan harga beras di Kalimantan Timur. Adapun komoditas ikan layang/ikan benggol juga konsisten mengalami inflasi karena gangguan cuaca yang memengaruhi hasil perikanan tangkap. Selain itu, komoditas dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau seperti Sigaret Kretek Mesin (SKM) juga turut menjadi komoditas penyumbang andil inflasi di triwulan IV 2025 karena faktor distribusi yang terganggu sehingga harga jual eceran mengalami kenaikan (Tabel III.2).

Komoditas baju muslim wanita mengalami penurunan tekanan harga dan menjadi penyebab deflasi kelompok pakaian dan alas kaki pada periode laporan. Penurunan harga komoditas

baju muslim wanita seiring dengan pemberian diskon pada tingkat konsumen untuk menjaga daya saing antar produsen. Di sisi lain, komoditas bahan bakar rumah tangga juga turut mengalami penurunan seiring dengan penyesuaian harga BBM non subsidi.

### 3.1.2. Perkembangan Inflasi Daerah Berdasarkan Kabupaten/Kota IHK

Seluruh Kabupaten/Kota IHK di Kaltim mengalami laju inflasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya kecuali Kabupaten Penajam Paser Utara. Pada triwulan IV 2025, inflasi tertinggi tercatat di Kabupaten Berau dengan laju sebesar 2,83% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 1,86% (yoy). Selanjutnya, inflasi di masing-masing Kab/Kota tercatat sebesar 2,71% (yoy) untuk Kota Balikpapan, 2,70% (yoy) untuk Kota Samarinda, dan Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar 2,08% (yoy) (Tabel III.3). Peningkatan tekanan inflasi di 3 kota IHK didorong oleh kenaikan andil inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Adapun penurunan tekanan inflasi di Kabupaten Penajam Paser Utara didorong terutama oleh deflasi kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan yang memberikan andil tertinggi deflasi di Kabupaten Penajam Paser Utara (Tabel III.4).

Tabel III.2 Komoditas Utama Penyumbang Inflasi dan Deflasi Tahunan Provinsi Kaltim Triwulan IV 2025

Okt-25	Nov-25	Des-25
Komoditas Inflasi	Komoditas Inflasi	Komoditas Inflasi
EMAS PERHIASAN	EMAS PERHIASAN	EMAS PERHIASAN
BERAS	BERAS	BERAS
SIGARET KRETEK MESIN (SKM)	IKAN LAYANG/IKAN BENGGOL	IKAN LAYANG/IKAN BENGGOL
IKAN LAYANG/IKAN BENGGOL	SIGARET KRETEK MESIN (SKM)	SIGARET KRETEK MESIN (SKM)
KOPI BUBUK	KOPI BUBUK	ANGKUTAN UDARA
Komoditas Deflasi	Komoditas Deflasi	Komoditas Deflasi
ANGKUTAN UDARA	ANGKUTAN UDARA	BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA
SABUN DETERGEN BUBUK	SABUN DETERGEN BUBUK	SABUN DETERGEN BUBUK
TELEPON SELULER	BAJU MUSLIM WANITA	BAJU MUSLIM WANITA
PENGHARUM CUCIAN/PELEMBUT	TELEPON SELULER	TELEPON SELULER
SABUN CAIR/CUCI PIRING	PENGHARUM CUCIAN/PELEMBUT	PENGHARUM CUCIAN/PELEMBUT

Sumber: BPS, diolah

Tabel III.3 Inflasi Kaltim dan Kota Pembentuk (% yoy)

Wilayah	2022				2023				2024				2025			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Nasional	2,64	4,35	5,95	5,51	4,97	3,52	2,28	2,61	3,05	2,51	1,84	1,57	1,03	1,87	2,65	2,92
Kaltim	2,86	4,38	5,69	5,35	5,24	3,76	3,06	3,46	3,03	2,99	2,16	1,47	1,36	1,62	1,77	2,68
Samarinda	2,58	3,97	5,27	5,22	5,03	3,67	3,14	3,37	2,84	2,88	1,79	1,50	1,29	1,77	2,16	2,70
Balikpapan	3,23	4,93	6,26	5,52	5,51	3,87	2,96	3,60	2,95	3,00	2,31	1,11	1,38	1,77	1,15	2,71
Berau									4,05	3,67	3,34	2,69	1,71	0,77	1,86	2,83
PPU									3,18	2,36	1,73	1,25	1,19	1,26	2,83	2,08

Sumber : BPS, diolah

Tabel III.4 Inflasi Kabupaten/Kota Pembentuk IHK di Kaltim Menurut Kelompok Barang

Kelompok Pengeluaran	Laju Inflasi															
	2025-I	2025-II	2025-III	2025-IV	2025-I	2025-II	2025-III	2025-IV	2025-I	2025-II	2025-III	2025-IV	2025-I	2025-II	2025-III	2025-IV
	Samarinda (%yoy)	Samarinda (%yoy)	Samarinda (%yoy)	Samarinda (%yoy)	Balikpapan (%yoy)	Balikpapan (%yoy)	Balikpapan (%yoy)	Balikpapan (%yoy)	Berau (%yoy)	Berau (%yoy)	Berau (%yoy)	Berau (%yoy)	PPU (%yoy)	PPU (%yoy)	PPU (%yoy)	PPU (%yoy)
UMUM / T O T A L	1,29	1,77	2,16	2,70	1,38	1,77	1,15	2,71	1,71	0,77	1,86	2,82	1,19	1,26	2,83	2,08
Makanan, Minuman Dan Tembakau	3,20	1,97	3,94	4,58	4,37	2,95	2,74	4,57	4,66	0,56	4,26	6,83	3,23	1,25	5,56	3,04
Pakaian Dan Alas Kaki	2,27	1,21	0,36	-0,87	-2,27	-0,68	-3,61	-3,34	2,07	0,80	0,81	0,58	1,17	1,45	1,59	1,63
Perumahan, Air, Listrik, Dan Bahan Bakar Rumah Tangga	-4,85	0,27	0,44	0,22	-3,79	1,17	-0,53	-0,48	-1,70	0,48	0,32	0,17	-4,42	0,35	0,28	0,28
Perlengkapan, Peralatan Dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	-0,62	-1,14	-1,18	-1,47	-0,91	-1,32	-1,26	-1,67	1,09	0,51	0,50	-0,37	1,36	1,11	1,23	1,18
Kesehatan	2,77	1,75	0,84	0,79	1,25	1,41	1,87	1,93	0,48	0,52	2,47	2,86	-	3,27	0,81	0,82
Transportasi	0,83	-0,01	-1,27	1,58	1,33	-0,25	-1,43	3,30	-0,22	-1,42	-2,01	-2,14	-	0,06	0,28	0,58
Informasi, Komunikasi, Dan Jasa Keuangan	-1,00	-0,23	-0,96	-0,70	-0,20	-0,15	-0,06	-0,06	-0,48	-0,05	-0,26	0,20	0,01	-0,13	-0,06	-0,14
Rekreasi, Olahraga, Dan Budaya	1,48	1,87	0,73	0,89	1,54	3,10	3,17	2,65	1,24	1,11	-1,29	-1,29	-	3,85	0,41	0,44
Pendidikan	1,26	1,46	3,50	3,71	1,45	3,70	2,75	2,84	1,69	1,69	-0,03	-0,03	-	1,21	0,64	0,65
Penyediaan Makanan Dan Minuman/Restoran	3,60	3,10	1,59	1,70	0,35	0,99	1,13	1,15	2,09	1,78	3,85	3,24	-	2,40	2,22	3,09
Perawatan Pribadi Dan Jasa Lainnya	8,37	10,04	9,65	13,29	7,92	7,33	7,66	13,09	3,95	5,91	6,62	10,88	0,01	3,84	3,84	5,95

Sumber : BPS, diolah

Jika dibandingkan berdasarkan kelompok pengeluarannya, kelompok makanan, minuman dan tembakau memegang andil inflasi tertinggi secara spasial di Provinsi Kaltim. Kelompok ini tercatat mengalami tekanan inflasi di seluruh kabupaten/ kota di wilayah Kaltim. Adapun sejumlah komoditas yang mengalami peningkatan tekanan harga secara spasial diantaranya beras dan aneka cabai. Sejumlah komoditas tersebut mengalami peningkatan tekanan inflasi didorong oleh peningkatan permintaan seiring dengan periode HBKN Nataru. Adapun dari sisi pasokan, terdapat gangguan cuaca yang menurunkan produksi komoditas pangan di daerah sentra produksi seperti aneka cabai, dan komoditas hortikultura.

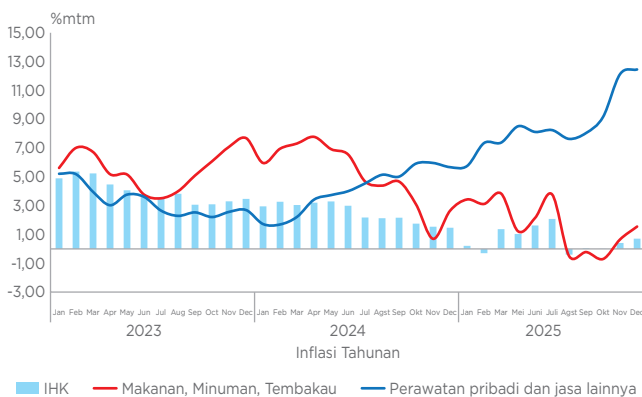
Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya juga memberikan andil yang cukup tinggi pada tekanan IHK secara spasial di triwulan laporan. Kenaikan harga emas perhiasan yang terjadi di seluruh Kabupaten/Kota menjadi penyebab tingginya tekanan inflasi pada kelompok ini. Kondisi ketidakpastian ekonomi nasional dan global yang tinggi mendorong adanya peningkatan permintaan dari masyarakat untuk pembelian emas sebagai alternatif simpanan masa depan. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami laju inflasi yang lebih tinggi di hampir seluruh Kabupaten/Kota IHK di Kaltim.

### 3.2. TRACKING INFLASI TRIWULAN I 2026

Pada Januari 2026, inflasi Provinsi Kaltim secara tahunan tercatat meningkat dibandingkan dengan pada bulan sebelumnya. Pada bulan Januari 2026 inflasi tahunan tercatat sebesar 3,76% (yoy) atau meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang sebesar 2,68% (yoy) (Grafik III.5). Sementara itu, inflasi bulanan pada periode yang sama tercatat sebesar 0,04% (mtm), atau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya yang mencapai 0,71%(mtm) (Grafik III.6).

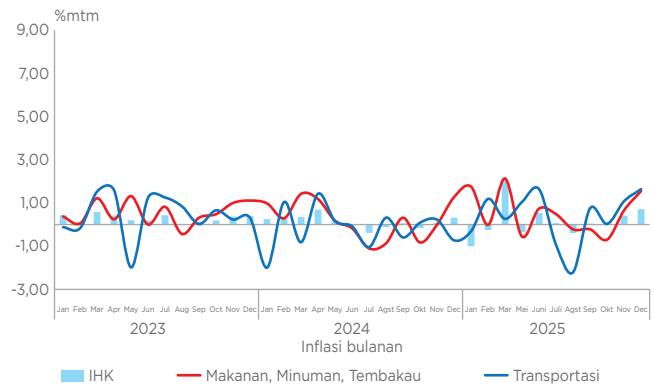
Jika dilihat berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi pada bulan Januari 2026 didominasi oleh Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga. Inflasi kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga memiliki andil sebesar 1,58% (yoy) dengan laju inflasi sebesar 10,06% (yoy) (Tabel III.5). Tingginya andil inflasi kelompok ini didorong oleh normalisasi tarif listrik pasca implementasi kebijakan diskon tarif listrik pada bulan Januari dan Februari 2025. Lebih lanjut, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya turut menyumbang andil sebesar 1,05% (yoy) dengan laju inflasi sebesar 15,91% (mtm). Kenaikan pada kelompok ini disebabkan tekanan harga emas perhiasan yang konsisten mengalami peningkatan hingga bulan Januari 2026.

Grafik III.5 Inflasi Tahunan (year-on-year, yoy) Kaltim



Sumber: BPS, diolah

Grafik III.6 Inflasi Bulanan (month-to-month, mtm) Kaltim



Sumber: BPS, diolah

Jika dilihat berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi pada bulan Januari 2026 didominasi oleh Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga. Inflasi kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga memiliki andil sebesar 1,58% (yoy) dengan laju inflasi sebesar 10,06% (yoy) (Tabel III.5). Tingginya andil inflasi kelompok ini didorong oleh normalnya tarif listrik karena pemberian diskon tarif listrik pada bulan Januari dan Februari 2025. Lebih lanjut, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya turut menyumbang andil sebesar 1,05% (yoy) dengan laju inflasi sebesar 15,91% (mtm). Kenaikan pada kelompok ini disebabkan tekanan harga emas perhiasan yang konsisten mengalami kenaikan hingga bulan Januari 2026.

Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga menjadi penahan laju inflasi yang lebih tinggi pada Januari 2026. Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga memiliki pangsa sebesar 0,06% (yoy) dan mengalami laju deflasi sebesar 1,37% (yoy) (Tabel III.5). Deflasi yang terjadi pada kelompok ini disebabkan karena penurunan harga pada komoditas sabun detergen bubuk.

Tabel III.5 Inflasi Kaltim Menurut Kelompok Barang

Keterangan	Des-25				Jan-26			
	Andil Inflasi (%mtm)	Laju Inflasi (%mtm)	Andil Inflasi (%yoy)	Laju Inflasi (%yoy)	Andil Inflasi (%mtm)	Laju Inflasi (%mtm)	Andil Inflasi (%yoy)	Laju Inflasi (%yoy)
UMUM	0,71	0,71	2,68	2,68	0,04	0,04	3,76	3,76
MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU	0,47	1,55	1,40	4,72	-0,05	-0,16	0,84	2,74
PAKAIAN DAN ALAS KAKI	-0,01	-0,20	-0,06	-1,43	0,02	0,44	-0,05	-1,01
PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, DAN BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA	0,00	0,00	-0,01	-0,04	0,02	0,14	1,58	10,06
PERLENGKAPAN, PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN RUMAH TANGGA	0,00	0,00	-0,05	-1,22	0,00	0,00	-0,06	-1,37
KESEHATAN	0,00	0,10	0,04	1,41	0,00	0,08	0,04	1,33
TRANSPORTASI	0,21	1,64	0,24	1,79	-0,18	-1,39	0,09	0,70
INFORMASI, KOMUNIKASI, DAN JASA KEUANGAN	0,00	0,00	-0,02	-0,32	0,00	0,00	-0,02	-0,35
REKREASI, OLAHRAGA, DAN BUDAYA	0,00	0,01	0,02	1,33	0,00	0,26	0,03	1,59
PENDIDIKAN	0,00	0,00	0,12	2,80	-0,01	-0,27	0,11	2,46
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN/RESTORAN	0,01	0,05	0,18	1,68	0,01	0,06	0,15	1,41
PERAWATAN PRIBADI DAN JASA LAINNYA	0,03	0,44	0,82	12,55	0,23	3,17	1,05	15,91

Sumber: BPS, diolah

Tabel III.6 Komoditas Utama Penyumbang Inflasi dan Deflasi Kaltim Januari 2026

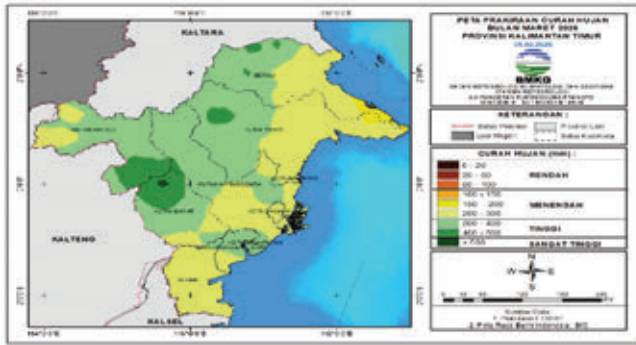
Jan-26	Jan-26
Komoditas Inflasi (mtm)	Komoditas Inflasi (yoy)
EMAS PERHIASAN	TARIF LISTRIK
POPOK BAYI SEKALI PAKAI	EMAS PERHIASAN
SEWA RUMAH	IKAN LAYANG/IKAN BENGGOL
BAJU MUSLIM ANAK	BERAS
BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA	SIGARET KRETEK MESIN (SKM)
Komoditas Deflasi (mtm)	Komoditas Deflasi (yoy)
ANGKUTAN UDARA	SABUN DETERGEN BUBUK
BENSIN	TELEPON SELULER
CABAI RAWIT	PENGHARUM CUCIAN/PELEMBUT
BAWANG MERAH	BAJU MUSLIM WANITA
CABAI MERAH	KEMEJA PENDEK KATUN PRIA

Sumber: BPS, diolah

Berdasarkan *tracking* terkini (pasca bulan Januari 2026), inflasi triwulan I 2026 diperkirakan akan berada pada rentang target sasaran dan berada dalam tren peningkatan. Inflasi pada triwulan I 2026 diperkirakan akan lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya seiring adanya HBKN Ramadan dan Idul Fitri 2026 yang diperkirakan dapat meningkatkan tekanan harga kelompok bahan pangan. Lebih lanjut, kenaikan harga emas perhiasan diperkirakan akan meningkatkan tekanan inflasi di Kaltim. Selanjutnya, juga terdapat *low base effect* pada komoditas tarif listrik karena pemberian diskon listrik pada tahun 2025 yang mendorong tekanan inflasi di triwulan I 2026. Meskipun demikian, terdapat beberapa *downside risk* yang berpotensi menurunkan tekanan inflasi

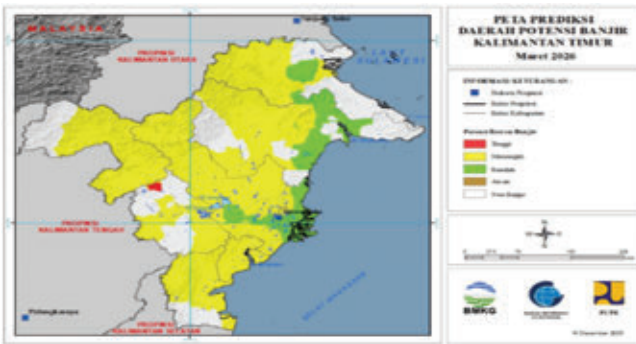
Kaltim di triwulan I 2026, terutama dari sisi *supply*, seiring dengan masifnya penyaluran beras SPHP hingga bulan Februari 2026 yang mencapai 16,5 juta kg. Lebih lanjut, komoditas cabai merah, cabai rawit, bawang merah mengalami masa panen di triwulan I 2026 di beberapa daerah sentra seperti Jawa dan Sulawesi sehingga menurunkan tekanan harga komoditas. Adapun menurut prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada Februari 2026, sebagian besar wilayah Kaltim akan mengalami curah hujan intensitas menengah hingga tinggi (200-500 mm per bulan) (Gambar III.1), serta berpotensi mengalami banjir dengan intensitas rendah hingga menengah (Gambar III.2). Hal tersebut tidak terlepas dari hasil monitoring pada Dasarian

Gambar III.1 Peta Prakiraan Curah Hujan Kaltim Maret 2026



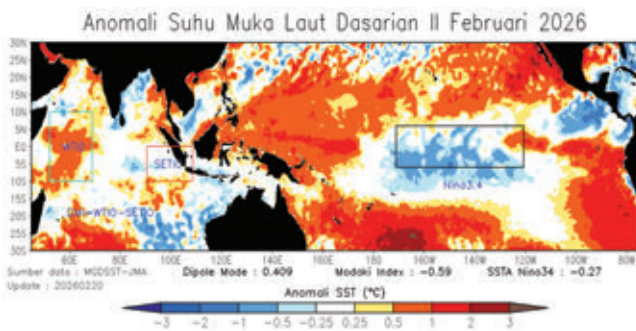
Sumber: BMKG Stasiun Meteorologi Kelas III APT Pranoto - Samarinda

Gambar III.2 Peta Prakiraan Daerah Potensi Banjir Kaltim Maret 2026



Sumber: BMKG Stasiun Meteorologi Kelas III APT Pranoto - Samarinda

Gambar III.3 Peta Anomali Suhu Muka Laut Dasarian II Februari 2026



Sumber: BMKG

II Februari 2026 yang menunjukkan indeks IOD dasarian (indeks bulanan) sebesar  $-0,41$  ( $0,01$ ) yang mengindikasikan fenomena IOD normal. Sedangkan indeks ENSO Dasarian (indeks ENSO bulanan) teramati sebesar  $-0,27$  ( $-0,56$ ) menunjukkan mulai meluruhnya fenomena La Nina lemah menuju kondisi Netral. Adapun fase Netral diprediksi mulai Februari-Maret 2026 dan bertahan hingga pertengahan tahun 2026.

### 3.3. PROGRAM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

Koordinasi dalam kerangka Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di wilayah Kalimantan Timur terus dilakukan baik di level Provinsi maupun Kabupaten/Kota guna merumuskan berbagai langkah pengendalian inflasi di daerah. Secara nasional, strategi pengendalian inflasi dirumuskan dengan kerangka 4K, yaitu menciptakan kestabilan harga, menjamin ketersediaan pasokan, memastikan kelancaran distribusi, dan melakukan komunikasi efektif untuk menjaga ekspektasi inflasi masyarakat. Upaya pengendalian inflasi pangan juga dilaksanakan berdasarkan 7 (tujuh) program unggulan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) tahun 2025 yang meliputi penguatan ketahanan komoditas pangan strategis, penguatan kapasitas budidaya pangan mandiri, optimalisasi Kerjasama Antar Daerah (KAD), dukungan fasilitas distribusi pangan, penguatan digitalisasi dan data pangan, dukungan optimalisasi Operasi Pasar/Pasar Murah/SPHP/GPM, serta penguatan koordinasi dan komunikasi. Adapun beberapa program pengendalian inflasi yang dilakukan sepanjang triwulan IV 2025 antara lain sebagai berikut.

#### 3.3.1. Keterjangkauan Harga

Dalam rangka menjaga stabilitas harga komoditas pangan strategis, Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota terus bersinergi dan berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk pelaksanaan program program strategis dalam rangka meminimalisir lonjakan harga, mengelola permintaan, dan mencapai ketahanan pangan. Beberapa program yang telah dilakukan diantaranya Gerakan Pangan Murah dan Pasar Murah dengan frekuensi 200 kali sepanjang triwulan IV 2025 dan berlokasi hampir di seluruh wilayah Kaltim.

Komitmen TPID dalam upaya pengendalian harga dan menjaga ketersediaan pasokan di masyarakat maka sejak tahun 2025, TPID Provinsi Kaltim menginisiasi MANDAU (Mekanisme Pengendalian

Komoditas Utama) yang mengendalikan inflasi secara preventif dan kuratif, serta melakukan asesmen proyeksi inflasi untuk memperoleh rekomendasi tindak lanjut pengendalian inflasi ke depan agar berada pada kisaran target nasional  $2,5\% \pm 1\%$ .

### 3.3.2. Ketersediaan Pasokan

Ketersediaan pasokan merupakan salah satu langkah penting dalam mengendalikan inflasi dari sisi *supply*. Hal ini dikarenakan karakteristik pasokan menjadi peran krusial dalam Provinsi Kalimantan Timur sebagai daerah bukan sentra produksi. Untuk itu menjaga ketersediaan pasokan dan didukung dengan sinergi dan kerjasama untuk mendatangkan komoditas dari luar wilayah Kaltim menjadi strategi dalam mengendalikan inflasi. Adapun saat ini dalam upaya mendukung ketersediaan, telah dilaksanakan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dengan beberapa wilayah seperti Kabupaten Ngawi dengan Kabupaten Kutai Timur, Kota Batu dengan Kabupaten Kutai Timur, Kota dan Kabupaten Enrekang dengan Kota Samarinda, serta antar Provinsi yaitu dengan Provinsi Gorontalo. Lebih lanjut, bentuk kerjasama ini merupakan B2B dengan komoditas berupa beras, telur ayam, sayur, buah, dan daging sapi.

### 3.3.3. Kelancaran Distribusi

Dalam rangka memantau kelancaran distribusi, TPID wilayah Kalimantan Timur melakukan pemberian subsidi ongkos angkut skala mikro

pada kegiatan Pasar Murah dan Pasar Tani. Pada triwulan IV 2025, pemberian bantuan subsidi ongkos angkut memiliki frekuensi sebanyak 7 kali. Adapun subsidi ongkos ini difokuskan untuk komoditas pangan strategis, seperti aneka cabai, dan komoditas hortikultura. Adapun dukungan dalam bentuk subsidi ongkos angkut telah diberikan kepada KWT Wanita Mandiri Kukar, Poktan Kedoyan Kukar, Petani Mariyasih, dalam rangka Gerakan Pangan Murah.

### 3.3.4. Komunikasi Efektif

Untuk mendukung komunikasi efektif, TPID Kalimantan Timur telah melakukan beberapa kegiatan yang meliputi peningkatan koordinasi, kapasitas SDM TPID, serta pengendalian ekspektasi masyarakat terhadap inflasi. Selama triwulan IV 2025, telah dilakukan 7 (tujuh) kali *High Level Meeting* (HLM) TPID, yaitu oleh TPID Provinsi Kalimantan Timur, TPID Kota Samarinda, TPID Kab. Kutai Barat, TPID Kota Bontang, TPID Kab. Mahulu, dan TPID Kab. Kutai Kartanegara. Selain itu, juga telah dilaksanakan secara rutin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi dengan Kemendagri yang dilakukan mingguan dan dilanjutkan dengan rapat koordinasi internal masing masing TPID Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM TPID juga telah dilakukan 1 (satu) kali *capacity building*, yakni dalam rangka Finalisasi dan Diseminasi Peta Jalan Pengendalian Inflasi Kaltim Tahun 2025 - 2027, Penjajakan Potensi KAD serta *High Level Meeting* Mandau Kaltim.

Tabel III.7. Program Pengendalian Inflasi Daerah Kaltim Periode Oktober - Desember 2025

KEGIATAN	FREKUENSI	KETERANGAN
<i>High Level Meeting</i>	7	<i>High Level Meeting</i> yang telah dilaksanakan oleh TPID Provinsi Kalimantan Timur serta 6 Kabupaten / Kota diantaranya Kota Samarinda, Kab. Kutai Barat, Kota Bontang, Kab. Mahulu, dan Kab. Kutai Kartanegara. HLM membahas mengenai persiapan menjelang HBKN Nataru 2026.
Pasar Murah, Gerakan Pangan Murah, dan Operasi Pasar	175	Pasar Murah, Gerakan Pangan Murah, dan Operasi pasar yang dilakukan oleh TPID Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk memastikan ketersediaan pasokan serta untuk menjamin keterjangkauan harga pangan dan bapokting untuk pengendalian harga pangan selama Triwulan IV 2025.
<i>Capacity Building</i>	1	Telah dilaksanakan <i>Capacity Building</i> dalam rangka Finalisasi dan Diseminasi Peta Jalan Pengendalian Inflasi Kaltim Tahun 2025 - 2027, Penjajakan Potensi KAD serta <i>High Level Meeting</i> Mandau Kaltim

Sumber: TPID Wilayah Kalimantan Timur



# BOKS 1

## MANDAU KALTIM – Pengendalian Inflasi berbasis *artificial intelligence*

### Karakteristik Inflasi di Indonesia

Dalam teori klasik, inflasi dipahami sebagai fenomena moneter. Ketika harga meningkat, bank sentral menaikkan suku bunga, kredit melambat, konsumsi tertahan, dan tekanan harga mereda. Mekanisme ini relatif efektif di negara dengan struktur ekonomi matang serta sistem distribusi yang efisien. Namun, realitas Indonesia menunjukkan dinamika yang lebih kompleks. Kajian Solikin M. Juhro (2007) menegaskan bahwa mayoritas tekanan inflasi Indonesia justru bersumber dari sisi penawaran. Sekitar 55 - 60 persen inflasi dipicu oleh guncangan non-moneter, terutama kelompok *administered prices* dan *volatile food*, sementara hanya 40 - 45 persen berasal dari sisi permintaan atau *core inflation*.

Di sinilah dilema klasik negara berkembang muncul, kebijakan moneter saja tidak cukup menjadi “obat” pengendali inflasi. Suku bunga dapat menahan permintaan, tetapi tidak dapat mempercepat distribusi pangan, menambah pasokan energi, ataupun mengatasi gangguan produksi. Indonesia kemudian mengakui realitas tersebut dan mendesain ulang kerangka pengendalian inflasi. Inflasi dipandang sebagai fenomena lintas sektor yang memerlukan koordinasi kebijakan, bukan sekadar respons moneter. Pada tahun 2005, pemerintah bersama Bank Indonesia membentuk Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP), yang kemudian menjadi cikal bakal pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di berbagai wilayah.

### Tantangan Pengendalian Inflasi di Kalimantan Timur

Karakter inflasi berbasis pasokan semakin terasa di daerah seperti Kalimantan Timur. Struktur ekonomi provinsi ini didominasi sektor ekstraktif, terutama pertambangan, sementara kapasitas produksi pangan relatif terbatas. Data Neraca Pangan Badan Pangan Nasional menunjukkan lebih dari 50 persen kebutuhan pangan dipenuhi melalui pasokan antar daerah. Kalimantan Timur, dalam konteks ini, adalah *net consumer*.

Konsekuensinya jelas, stabilitas harga sangat bergantung pada kelancaran produksi dan distribusi di luar wilayah. Gangguan cuaca di Sulawesi, hambatan logistik di Jawa, atau kenaikan biaya transportasi antarpulau dapat segera menjelma menjadi tekanan inflasi di pasar-pasar lokal. Inflasi menjadi fenomena yang ditransmisikan, bukan semata diciptakan oleh permintaan domestik. Pemerintah daerah melalui TPID Provinsi Kalimantan Timur telah merespons tantangan tersebut dengan sejumlah langkah struktural. Implementasi *digital farming* di Kutai Kartanegara berhasil meningkatkan produktivitas sawah secara signifikan. Penerapan *early warning system* (EWS) memperkuat deteksi dini terhadap kenaikan harga. Skema SIGAP Inflasi Kaltim mengintegrasikan pemantauan harga dengan toko penyeimbang sebagai instrumen stabilisasi, yang turut mengantarkan provinsi ini meraih penghargaan TPID terbaik wilayah Kalimantan pada 2024.



Namun, capaian tersebut belum sepenuhnya menjawab kebutuhan jangka panjang. Instrumen yang ada relatif kuat pada aspek kuratif, meredam gejala ketika harga telah meningkat, tetapi belum sepenuhnya preventif. Tantangan geografis, fragmentasi wilayah, dan ketergantungan distribusi antarpulau menjadikan stabilitas pasokan sebagai isu struktural. Urgensi ini semakin mengemuka setelah Kalimantan Timur ditetapkan sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara. Transformasi menjadi pusat pemerintahan nasional akan mendorong peningkatan populasi, aktivitas ekonomi, dan permintaan pangan.

### Lahirnya MANDAU KALTIM

Dalam konteks tersebut, TPID Provinsi Kalimantan Timur mengembangkan MANDAU KALTIM (Mekanisme Pengendalian Komoditas Utama Kalimantan Timur) sebagai evolusi pendekatan pengendalian inflasi. Skema ini tidak sekadar memperkuat pemantauan harga, melainkan membangun arsitektur pengambilan keputusan terintegrasi yang menghubungkan data harga, pasokan, distribusi, cuaca, dan proyeksi kebutuhan dalam satu sistem analitik.

Secara konseptual, MANDAU KALTIM menggeser paradigma dari *price stabilization* menuju *supply management*. Pengendalian inflasi tidak lagi dimulai ketika harga melonjak, melainkan ketika potensi gangguan pasokan mulai terdeteksi. Sistem ini menjalankan tiga fungsi utama. Pertama, deteksi dini tekanan harga melalui EWS terintegrasi yang mengonsolidasikan berbagai sumber pemantauan harga untuk menilai kewajaran pergerakan serta memproyeksikan kecenderungan ke depan. Kedua, penyusunan neraca pangan prediktif untuk mengidentifikasi potensi defisit sebelum kelangkaan terjadi. Ketiga, *command center* yang mengolah seluruh indikator menjadi rekomendasi kebijakan operasional, mulai dari operasi pasar, kerja sama antar daerah, hingga intervensi distribusi.

Dalam implementasinya, MANDAU KALTIM diperkuat dengan teknologi *artificial intelligence* dan *machine learning*. Seluruh indikator seperti harga harian, arus distribusi, data cuaca, hingga pola konsumsi, diproses secara simultan dalam sistem yang mampu mendeteksi anomali, membaca pola historis, serta mengukur risiko tekanan inflasi. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah daerah tidak hanya memahami kondisi aktual, tetapi juga memproyeksikan dinamika ke depan. Sebagai *decision support system* mengubah data menjadi proyeksi, dan proyeksi menjadi kebijakan yang lebih presisi.

Dengan demikian, kebijakan tidak lagi bersifat reaktif. Operasi pasar dilakukan sebelum harga melonjak tajam. Kerja sama antar daerah dibangun ketika neraca pangan menunjukkan potensi defisit. Intervensi distribusi dilakukan saat risiko logistik teridentifikasi. Data diolah menjadi proyeksi, dan proyeksi diterjemahkan menjadi keputusan yang presisi. MANDAU KALTIM berfungsi sebagai *decision support system* yang menggeser pengendalian inflasi dari respons kebijakan menuju manajemen risiko ekonomi.

Pengalaman Kalimantan Timur menunjukkan bahwa pengendalian inflasi di era modern tidak lagi cukup mengandalkan ketegasan kebijakan, tetapi memerlukan kecerdasan sistem. Otoritas tidak dapat terus berperan sebagai pemadam kebakaran setiap kali harga melonjak. Yang dibutuhkan adalah kemampuan membaca risiko sebelum tekanan muncul. MANDAU KALTIM menawarkan arah baru tersebut. Stabilitas harga dibangun dari kepastian pasokan, kepastian pasokan bertumpu pada kualitas data, dan kualitas data bermuara pada ketepatan keputusan. Jika pendekatan ini dikembangkan secara konsisten, pengendalian inflasi tidak lagi identik dengan intervensi sesaat, melainkan menjadi praktik manajemen risiko berbasis informasi.

# 04

**Pembiayaan Daerah  
serta Pengembangan  
Akses Keuangan  
dan UMKM**



“

- Kinerja fungsi intermediasi perbankan di Kaltim meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, tercermin dari adanya peningkatan penyaluran kredit dan pembiayaan. Tingkat risiko kredit perbankan Kaltim juga terjaga rendah ditengah peningkatan pertumbuhan yang terjadi.
- Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) di Kaltim tercatat masih mengalami kontraksi seiring dengan penurunan yang terjadi pada seluruh komponen.
- Kredit UMKM mengalami perbaikan sementara pembiayaan syariah tercatat melambat, meski demikian keduanya tetap menunjukkan tingkat risiko yang terkendali pada level rendah.

## 4.1. GAMBARAN UMUM

### Penyaluran kredit Kalimantan Timur (Kaltim) melanjutkan pertumbuhan positif dan meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Penyaluran kredit Kaltim pada triwulan IV 2025 tercatat tumbuh positif dan meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Peningkatan yang terjadi sejalan dengan akselerasi pertumbuhan ekonomi Kaltim yang juga meningkat di akhir tahun 2025. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penguatan pembiayaan perbankan turut mendukung dan berkontribusi pada aktivitas usaha di daerah. Adapun secara sektoral, peningkatan kredit Kaltim pada periode laporan didorong utamanya oleh peningkatan kredit konstruksi dan perbaikan kredit sektor pertambangan. Secara spasial, penyaluran kredit pada sebagian kabupaten/kota Kaltim menunjukkan pertumbuhan positif, dan masih terkonsentrasi di Kota Balikpapan dan Samarinda. Penyaluran kredit yang tumbuh positif turut didukung oleh risiko kredit yang terjaga rendah, tercermin dari rasio *non performing loan* (NPL) yang berada di bawah *threshold* 5%. Rasio NPL di Kaltim yang rendah ini tidak terlepas dari upaya penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko oleh sektor perbankan.

Di sisi lain, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) Kaltim tercatat mengalami kontraksi lebih dalam dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Di tengah peningkatan pertumbuhan kredit secara umum, DPK Kaltim mengalami kontraksi yang mengindikasikan bahwa likuiditas perbankan cenderung lebih ketat pada periode laporan. Kondisi ini disebabkan utamanya oleh peningkatan aktivitas ekonomi pada periode festive season akhir tahun yang mendorong masyarakat memanfaatkan simpanannya untuk kebutuhan konsumsi, dibandingkan dengan menggunakan kredit konsumsi, sebagaimana tercermin dari penurunan kredit konsumsi pada periode laporan. Lebih lanjut, DPK pemerintah mencatatkan kontraksi paling dalam seiring dengan kebijakan efisiensi yang masih berlanjut dan realokasi anggaran dalam rangka program prioritas pemerintah. Di sisi lain, DPK Syariah

tercatat tetap tumbuh positif mengindikasikan kepercayaan terhadap perbankan syariah serta potensi penguatan intermediasi syariah Kaltim ke depan.

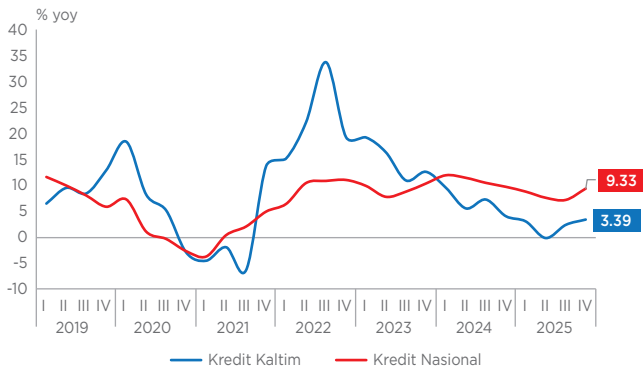
## 4.2. PERKEMBANGAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN DAERAH

### 4.2.1. Perkembangan Penyaluran Kredit dan Dana Pihak Ketiga

Kinerja penyaluran kredit Kaltim meningkat sejalan dengan peningkatan pertumbuhan kredit nasional. Pada triwulan IV 2025, penyaluran kredit Kaltim tumbuh positif sebesar 3,39% (yoy), atau meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 2,37% (yoy). Adapun kinerja pembiayaan nasional juga tercatat meningkat mencapai 9,33% (yoy) dari 7,16% (yoy) pada triwulan sebelumnya (Grafik IV.1). Pertumbuhan kredit Kaltim yang lebih rendah dibandingkan nasional mulai tercatat sejak awal tahun 2024, setelah sebelumnya selalu melampaui capaian pertumbuhan nasional.

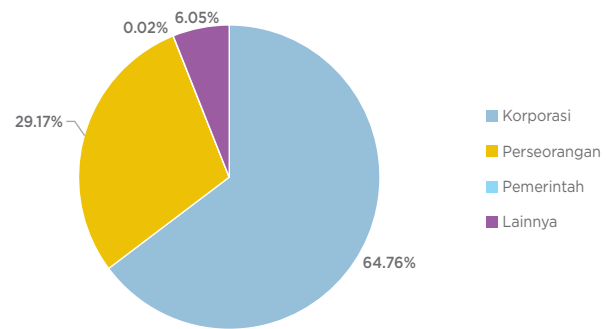
Berdasarkan jenis penggunaan, peningkatan kredit Kaltim didorong utamanya oleh kinerja kredit modal kerja yang tumbuh menguat. Pada triwulan IV 2025, kredit modal kerja tumbuh sebesar 2,50% (yoy), setelah mengalami kontraksi pada periode sebelumnya sebesar -2,29% (yoy). Kondisi ini mengindikasikan terjadi peningkatan kebutuhan pembiayaan untuk aktivitas usaha yang turut menjadi pendorong perbaikan pertumbuhan ekonomi pada periode laporan. Di sisi lain, kredit investasi dan konsumsi tercatat mengalami perlambatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Kredit investasi mencatatkan pertumbuhan sebesar 2,50% (yoy) setelah tumbuh sebesar 3,51% (yoy) pada triwulan sebelumnya, sedangkan kredit konsumsi tumbuh dari 8,40% (yoy) menjadi 6,21% (yoy) (Grafik IV.2). Berdasarkan golongan debitur, korporasi masih mendominasi pangsa penyaluran kredit yang mencapai 64,76% dari total kredit, disusul oleh perseorangan dan pemerintah dengan pangsa masing masing sebesar 29,17% dan 0,02% (Grafik IV.3).

Grafik IV.1 Perkembangan Kredit Kaltim dan Nasional



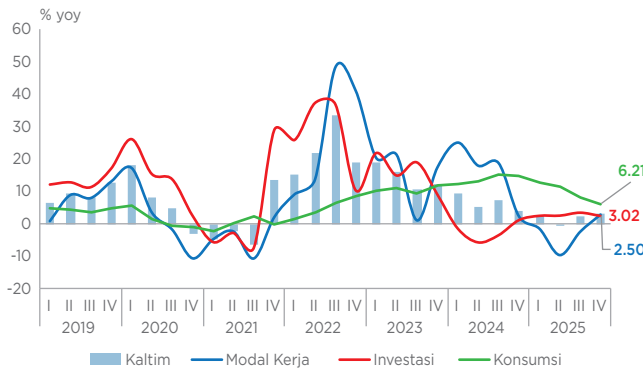
Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik IV.3 Pangsa Penyaluran Kredit Berdasarkan Debitur



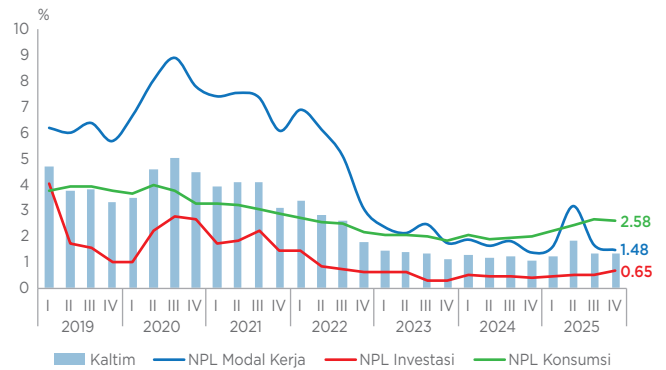
Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik IV.2 Perkembangan Kredit Kaltim Berdasarkan Penggunaannya



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik IV.4 Perkembangan NPL Kredit Kaltim Berdasarkan Penggunaannya



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

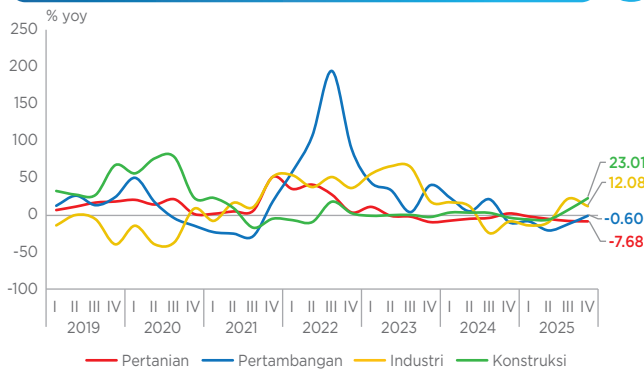
Peningkatan kinerja fungsi intermediasi perbankan di Kaltim turut didukung oleh tingkat risiko yang terjaga rendah. Pada triwulan IV 2025, rasio *non performing loan* (NPL) di Kaltim tercatat sebesar 1,33%, atau menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Kondisi tersebut didorong oleh penurunan rasio NPL pada kredit modal kerja dan konsumsi menjadi masing-masing sebesar 1,48% dan 2,58%. Di sisi lain, rasio NPL kredit investasi tercatat sebesar 0,65% mengalami sedikit peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Adapun, secara keseluruhan rasio NPL di Kaltim terjaga di level yang rendah serta masih berada di bawah *threshold* 5%, didukung oleh upaya penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko oleh pihak perbankan (Grafik IV.4).

#### 4.2.1.1. Kinerja Penyaluran Kredit Sektoral di Kaltim

Penyaluran kredit pada sektor utama Kaltim turut mencatatkan peningkatan. Secara sektoral, kinerja kredit Kaltim didorong utamanya oleh peningkatan kredit pada sektor utama meliputi konstruksi dan pertambangan. Kredit sektor konstruksi tercatat mengalami pertumbuhan paling tinggi sebesar 23,01% (yoy), atau meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 6,99% (yoy). Selain itu, walau masih tercatat kontraksi kredit sektor pertambangan mengalami perbaikan dari kontraksi sebesar -11,99% (yoy) menjadi 0,60% (yoy) sekaligus mencatatkan kinerja paling baik sejak awal tahun 2025 (Grafik IV.5). Kondisi ini sejalan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor

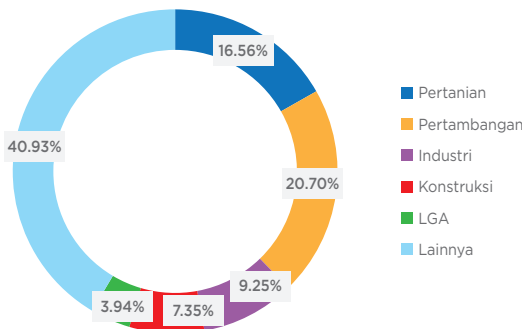
pertambahan yang didorong utamanya oleh peningkatan volume ekspor batu bara. Di sisi lain, kredit sektor industri pengolahan tercatat sebesar 12,08% (yoy), atau menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 22,20% (yoy). Sementara itu, kredit pada sektor pertambangan masih mendominasi penyaluran kredit di Kaltim dengan pangsa mencapai 20,70% dari total kredit yang disalurkan (Grafik IV.6).

Grafik IV.5 Perkembangan Kredit Sektoral Kaltim



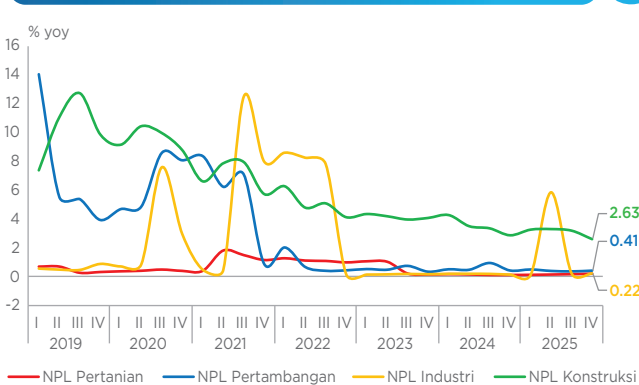
Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik IV.6 Share Kredit Kaltim Berdasarkan Sektor



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik IV.7 Perkembangan NPL Kaltim Berdasarkan Sektor



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Perbaikan kinerja kredit sektor utama Kaltim turut didukung oleh rasio NPL yang terjaga rendah. Rasio *Non Performing Loan* (NPL) sektor utama Kaltim tercatat berada pada level yang rendah di bawah *threshold* 5%. Adapun rasio NPL sektor pertanian, pertambangan, dan industri pengolahan terjaga rendah di bawah 1%, masing masing sebesar 0,19%, 0,41%, dan 0,22%. Di sisi lain, NPL sektor konstruksi tercatat paling tinggi dibandingkan dengan sektor utama lainnya yakni sebesar 2,63% (Grafik IV.7).

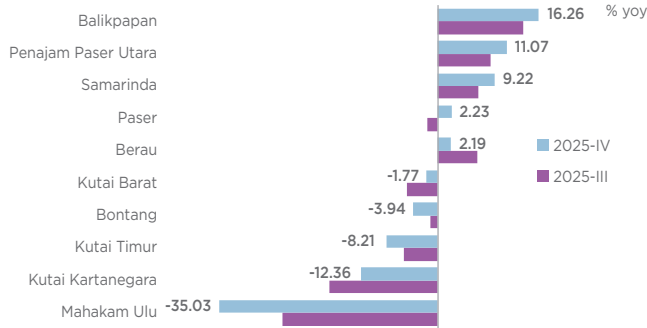
#### 4.2.1.2. Kinerja Penyaluran Kredit Secara Spasial

Secara spasial, penyaluran kredit pada sebagian kabupaten/kota di Kaltim tumbuh positif. Kabupaten/kota dengan pertumbuhan kredit tertinggi di triwulan IV 2025 adalah Kota Balikpapan yang tercatat sebesar 16,26% (yoy), disusul oleh Kabupaten Penajam Paser Utara dengan 11,07% (yoy) (Grafik IV.8). Sementara itu, di beberapa wilayah Kaltim lain khususnya Kabupaten Mahakam Ulu dan Kutai Kartanegara tercatat mengalami kontraksi yang cukup dalam masing-masing sebesar 35,03% (yoy) dan 12,36% (yoy) (Grafik IV.8).

Pertumbuhan positif penyaluran kredit spasial juga diiringi dengan NPL yang terjaga rendah. Seluruh kabupaten/kota di Kaltim mencatatkan rasio NPL yang rendah dan berada di bawah *threshold* 5%. Adapun Kabupaten Mahakam Ulu mencatatkan NPL paling rendah sebesar 0,03% sedangkan NPL tertinggi tercatat di Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 2,44% (Grafik IV.9).

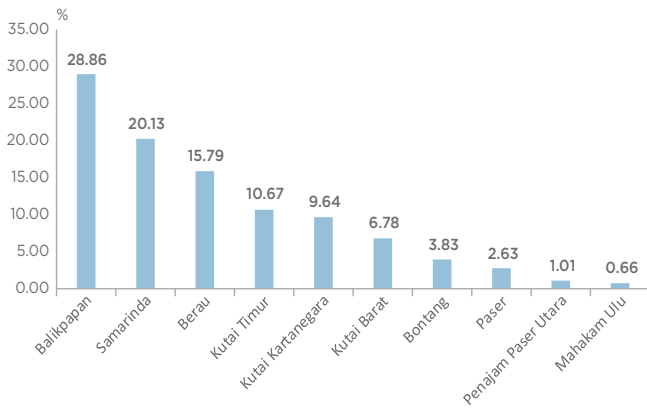
Pada triwulan IV 2025, penyaluran kredit Kaltim masih terkonsentrasi di Kota Balikpapan dan Samarinda. Sebesar 48,99% dari total kredit yang disalurkan di Kaltim tercatat mengalir ke Kota Balikpapan dan Samarinda. Besarnya pangsa penyaluran kredit di kedua kota tersebut tidak terlepas dari perannya sebagai pusat kegiatan ekonomi di Kaltim. Sebaliknya, Kabupaten Mahakam Ulu menempati posisi terendah dengan pangsa terhadap kredit Kaltim hanya sebesar 0,66% (Grafik IV.10).

**Grafik IV.8 Pertumbuhan Kredit Spasial Kabupaten/Kota di Wilayah Kaltim**



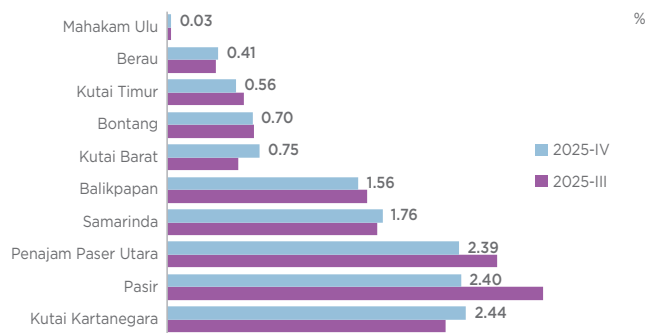
Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

**Grafik IV.9 Perkembangan NPL Spasial Kabupaten/Kota di Wilayah Kaltim**



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

**Grafik IV.10 Pangsa Kredit Spasial Kabupaten/Kota di Kaltim**



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

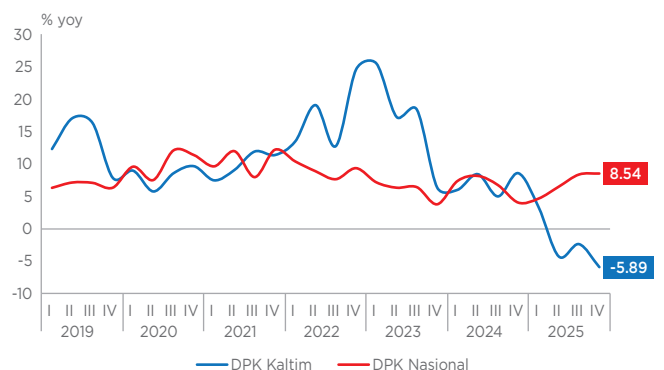
#### 4.2.1.3. Perkembangan Dana Pihak Ketiga di Kalimantan Timur

Dana Pihak Ketiga (DPK) Kaltim masih mengalami kontraksi pada triwulan IV 2025, disebabkan oleh penurunan pada seluruh komponen. Pada triwulan IV 2025, penghimpunan DPK Kaltim tercatat mengalami kontraksi sebesar 5,89% (yoy), atau lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada

triwulan sebelumnya sebesar 2,33% (yoy). Di sisi lain, DPK nasional masih tumbuh stabil pada level 8% (yoy), atau sedikit meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (Grafik IV.11). Kontraksi DPK Kaltim pada periode laporan, terjadi seiring dengan penurunan pada seluruh komponen utamanya DPK giro yang mengalami kontraksi paling dalam sebesar 15,40% (yoy). Lebih lanjut, DPK deposito mengalami kontraksi sebesar 8,14% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi triwulan sebelumnya. Walau masih tumbuh positif DPK tabungan turut mengalami penurunan menjadi sebesar 2,10% (yoy) dari 4,56% (yoy) (Grafik IV.12). Berdasarkan pangsaanya, DPK Kaltim masih didominasi oleh tabungan dengan pangsa mencapai 47,77%, diikuti oleh DPK giro dan deposito dengan pangsa masing-masing sebesar 27,97% (yoy) dan 24,26% (yoy) (Grafik IV.13).

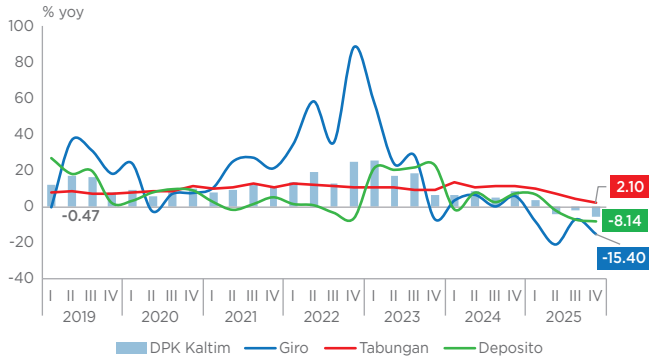
Berdasarkan golongan nasabah, DPK Kaltim didominasi oleh nasabah perseorangan. Pada triwulan IV 2025, pangsa DPK perseorangan mencapai 57,77% dari total DPK Kaltim, disusul oleh korporasi dan pemerintah dengan pangsa sebesar 35,41% dan 3,94% (Grafik IV.14). Adapun DPK perseorangan Kaltim tercatat mengalami kontraksi sebesar 1,31% (yoy), setelah tumbuh positif pada periode sebelumnya (Grafik IV.15). Kondisi ini mengindikasikan bahwa likuiditas perbankan di Kaltim cenderung lebih terbatas di tengah meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pada periode *festive season* di akhir tahun.

**Grafik IV.11 Perkembangan DPK Kaltim dan Nasional**



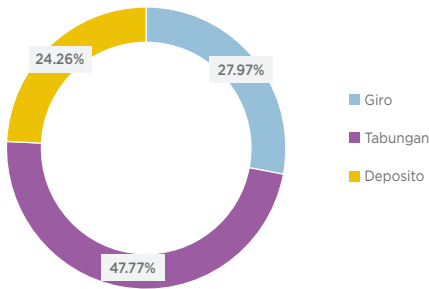
Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

**Grafik IV.12 Perkembangan DPK Kaltim Berdasarkan Sumbernya**



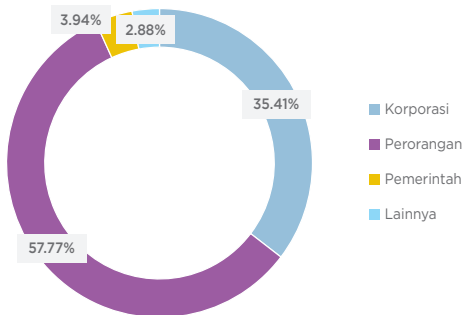
Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

**Grafik IV.13 Pangsa DPK Kaltim Berdasarkan Sumber**



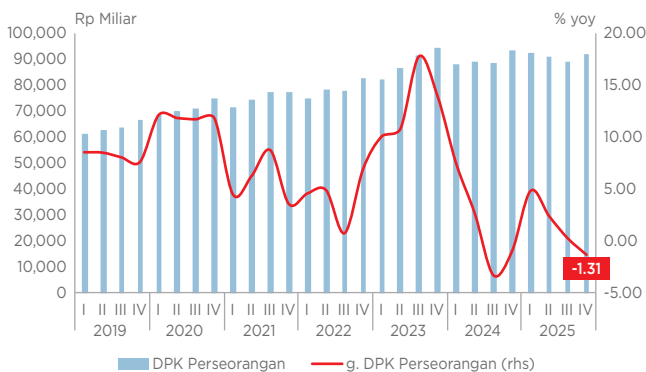
Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

**Grafik IV.14 Pangsa DPK Kaltim Berdasarkan Golongan Nasabah**



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

**Grafik IV.15 Perkembangan DPK Perseorangan Kaltim**

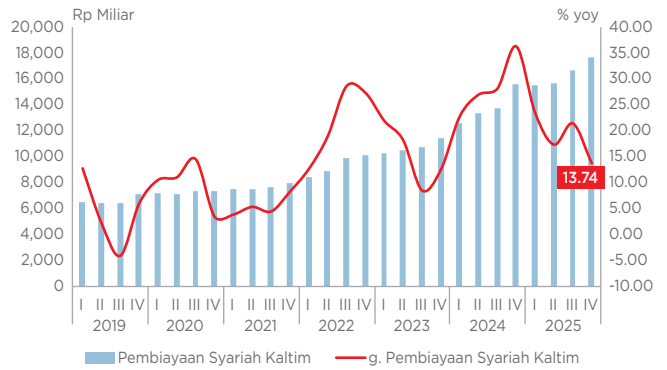


Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

## 4.2.2. Perkembangan Pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga Syariah

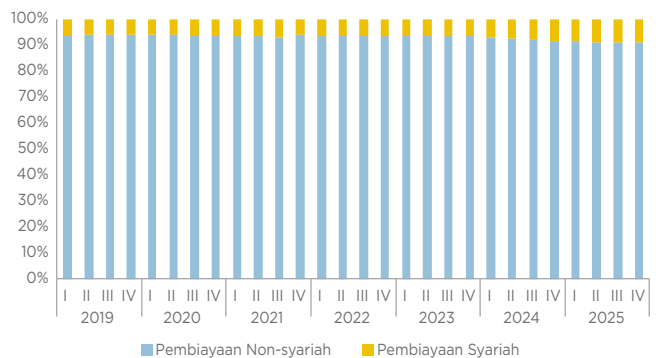
Kinerja pembiayaan syariah Kaltim masih tumbuh positif dan secara konsisten mengalami peningkatan pangsa terhadap total pembiayaan Kaltim. Pada triwulan IV 2025, pembiayaan syariah tumbuh positif sebesar 13,74% (yoy), walau mengalami perlambatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (Grafik IV.16). Adapun pangsa pembiayaan syariah terhadap total penyaluran pembiayaan di Kaltim terus melanjutkan tren peningkatan mencapai sebesar 8,90% dari 8,28% pada awal tahun 2025 (Grafik IV.17). Hal ini mengindikasikan tren peningkatan preferensi masyarakat terhadap pembiayaan syariah di Kaltim yang terus berkembang. Berdasarkan jenis penggunaan, pembiayaan syariah untuk investasi mencatatkan pertumbuhan paling tinggi sebesar

**Grafik IV.16 Perkembangan Pembiayaan Syariah Kaltim**



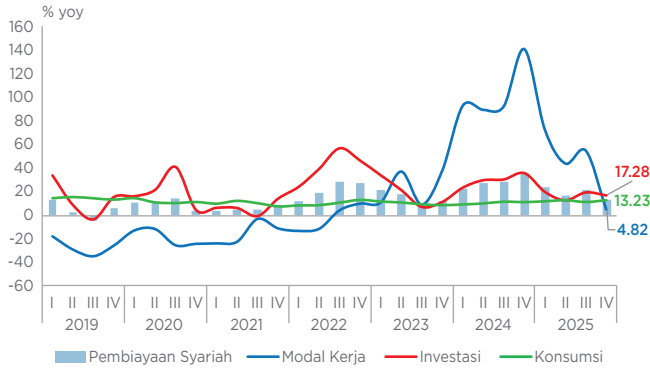
Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

**Grafik IV.17 Perkembangan Pangsa Pembiayaan Syariah Kaltim**



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

**Grafik IV.18 Perkembangan Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Jenis Penggunaan**

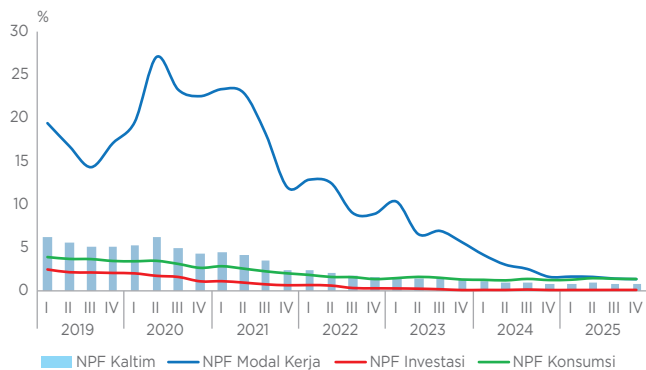


Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

17,28% (yoy), diikuti oleh pembiayaan konsumsi sebesar 13,23% (yoy). Di sisi lain, pembiayaan modal kerja menunjukkan perlambatan yang signifikan dari 54,97% (yoy) menjadi 4,82% (yoy), seiring dengan moderasi kebutuhan pembiayaan pelaku usaha pada periode laporan (Grafik IV.18).

**Kinerja baik pembiayaan syariah di Kaltim juga tercermin dari rasio *Non Performing Financing (NPF)* yang terjaga rendah.** Rasio NPF Kaltim pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar 0,79%, menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Rendahnya rasio NPF ini menggambarkan risiko pembiayaan syariah di Kaltim yang terkendali. Jika ditinjau berdasarkan penggunaannya, rasio NPF pada pembiayaan konsumsi, modal kerja, dan investasi masing masing tercatat sebesar 1,36%, 1,35%, dan 0,21% (Grafik IV.19).

**Grafik IV.19 Perkembangan NPF Kaltim Berdasarkan Penggunaannya**



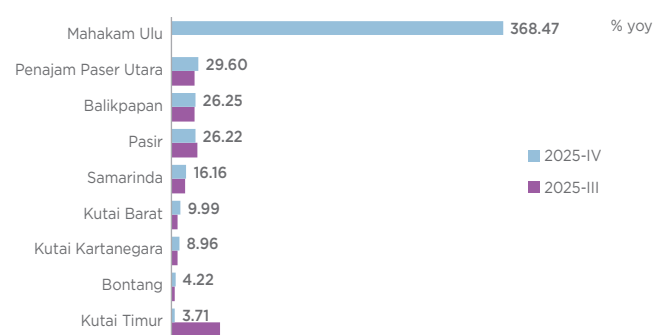
Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

### 4.2.2.1. Kinerja Pembiayaan Syariah Secara Spasial

Secara spasial, pertumbuhan positif pembiayaan syariah Kaltim didorong oleh kinerja sebagian besar kabupaten/kota. Pada triwulan IV 2025, penyaluran pembiayaan syariah di sebagian besar kabupaten/kota Kaltim meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Adapun pertumbuhan pembiayaan syariah tertinggi tercatat di Kabupaten Mahakam Ulu sebesar 368,47% (yoy), yang sekaligus menjadi realisasi pembiayaan syariah tertinggi secara historis di wilayah tersebut. Hal ini sejalan dengan semakin luasnya akses layanan keuangan syariah di seluruh daerah Kaltim. Sementara itu, penyaluran pembiayaan syariah di Kabupaten Berau mengalami kontraksi sebesar 0,59% (yoy) dan menjadi pertumbuhan paling rendah dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya (Grafik IV.20).

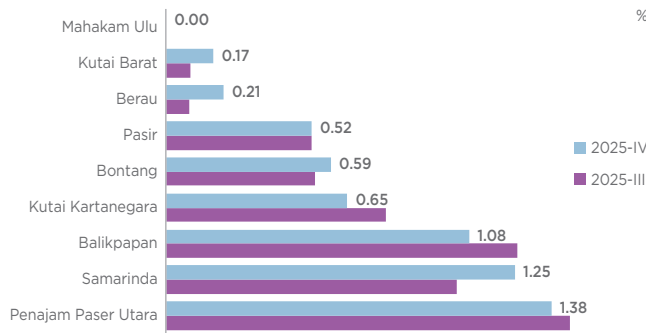
**Kinerja positif pembiayaan syariah spasial juga diiringi dengan rasio NPF yang terjaga rendah.** Secara umum, risiko pembiayaan syariah di kabupaten/kota Kaltim terjaga, dengan NPF terendah terjadi di Kabupaten Mahakam Ulu sebesar 0,00%. Selain itu, sebagian kabupaten/kota Kaltim mengalami penurunan rasio NPF dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, serta masih terjaga di bawah *threshold* 5% (Grafik IV.21).

**Grafik IV.20 Pertumbuhan Pembiayaan Syariah Spasial Kabupaten/Kota di Wilayah Kaltim**



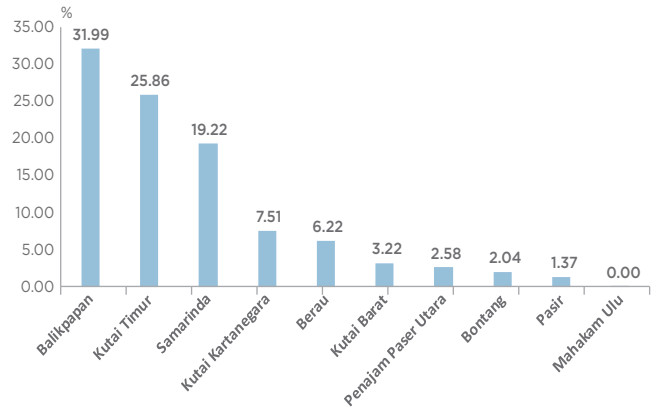
Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

**Grafik IV.21 Perkembangan NPF Spasial Kabupaten/Kota di Wilayah Kaltim**



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

**Grafik IV.22 Pangsa Pembiayaan Syariah Spasial Kabupaten/Kota di Kaltim**



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Hal ini menunjukkan bahwa stabilitas pembiayaan syariah di Kaltim masih terjaga, memberikan ruang bagi peningkatan intermediasi keuangan syariah ke depan.

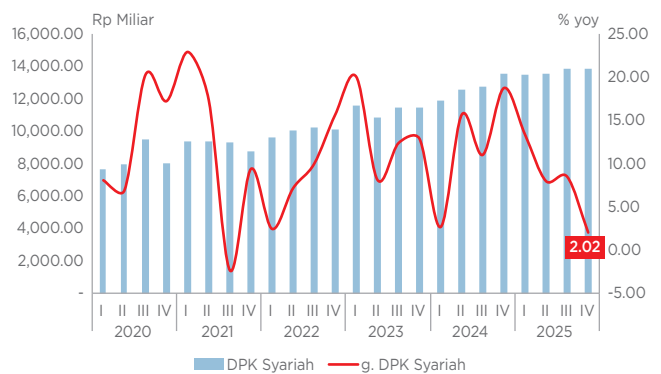
**Berdasarkan sebarannya, penyaluran pembiayaan syariah Kaltim terkonsentrasi di Kota Balikpapan dan Kabupaten Kutai Timur.** Pada triwulan IV 2025, Kota Balikpapan masih memegang pangsa pembiayaan syariah terbesar yakni 31,99%. Lebih lanjut, sejalan dengan perkembangan pangsa pada periode sebelumnya, Kabupaten Kutai Timur menjadi penyumbang pembiayaan syariah tertinggi kedua sebesar 25,86%, melebihi pangsa Kota Samarinda (Grafik IV.22). Adapun Kondisi ini menunjukkan minat atas pembiayaan syariah yang mulai merata di beberapa wilayah Kaltim lainnya selain dua kota besar (Balikpapan dan Samarinda).

tersebut disebabkan utamanya oleh penurunan kinerja deposito yang mengalami kontraksi sebesar 6,52% (yoy) setelah tumbuh positif pada triwulan sebelumnya. Selain itu, komponen giro turut mengalami perlambatan dari 9,04% (yoy) menjadi 2,27% (yoy) (Grafik IV.24). Berdasarkan pangasanya, tabungan masih mendominasi DPK syariah dengan pangsa mencapai 55,60%, disusul oleh deposito dengan pangsa sebesar 31,32% dan giro sebesar 13,08% (Grafik IV.25). Sejalan dengan pangsa pembiayaannya, pangsa DPK syariah Kaltim turut menunjukkan tren peningkatan dan mencapai sebesar 8,71% pada periode laporan (Grafik IV. 26). Hal ini mengindikasikan meningkatnya kepercayaan terhadap perbankan syariah serta potensi penguatan intermediasi syariah di Kaltim.

**4.2.2.2. Perkembangan Dana Pihak Ketiga Syariah Kaltim**

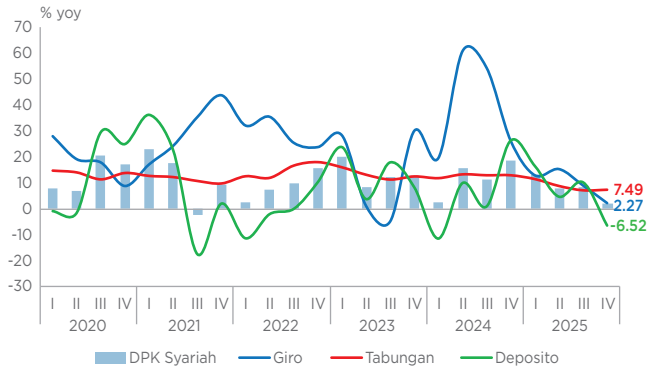
**Mendukung pertumbuhan kreditnya, Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) syariah Kaltim tumbuh positif.** Pada triwulan IV 2025, penghimpunan DPK syariah Kaltim tercatat tumbuh positif sebesar 2,02% (yoy), meski melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya (Grafik IV.23). Kondisi

**Grafik IV.23 Perkembangan DPK Syariah Kaltim**



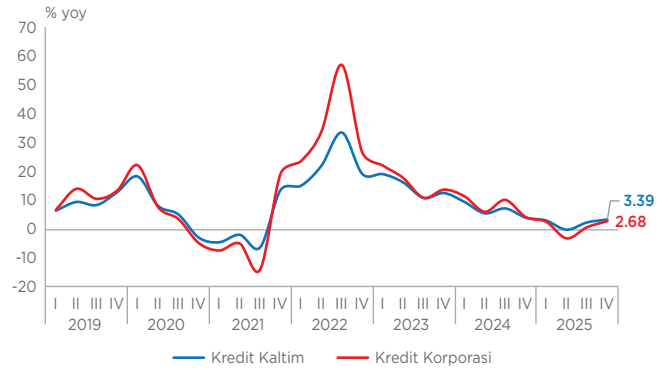
Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

**Grafik IV.24 Perkembangan DPK Syariah Kaltim berdasarkan Komponen Pembentuk**



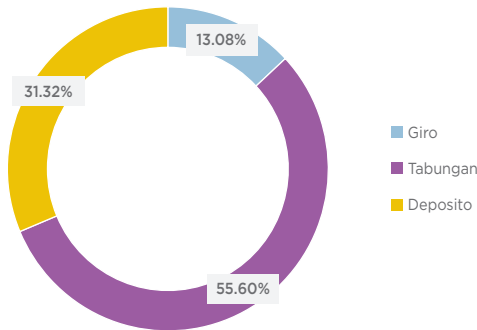
Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

**Grafik IV.27 Perkembangan Kredit Korporasi Kaltim**



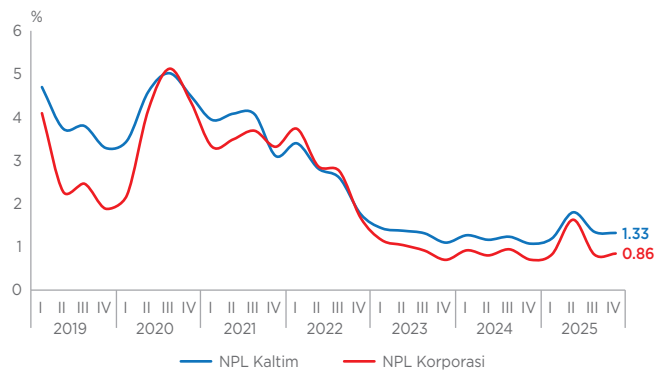
Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

**Grafik IV.25 Pangsa DPK Syariah Kaltim berdasarkan Komponen Pembentuk**



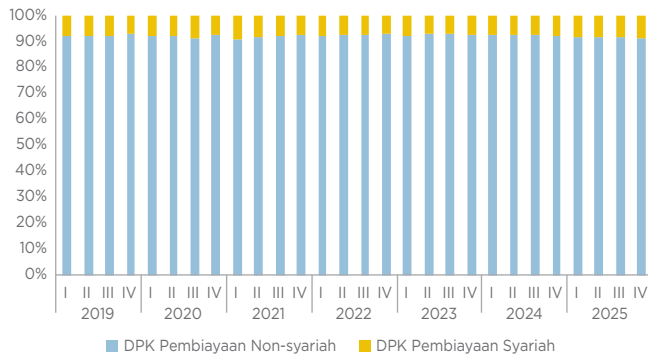
Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

**Grafik IV.28 Perkembangan NPL Korporasi Kaltim**



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

**Grafik IV.26 Pangsa DPK Syariah dan Non Syariah Kaltim**



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

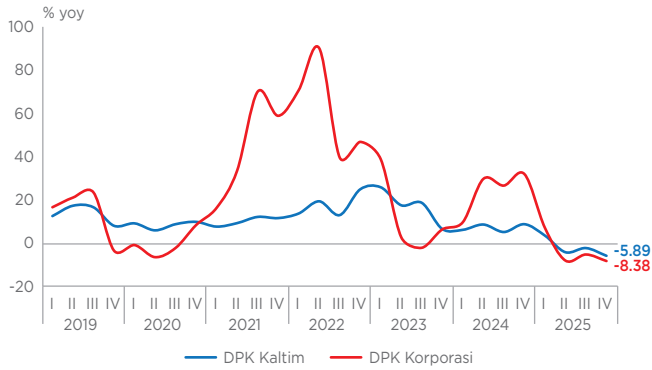
### 4.2.3. Asesmen Stabilitas Keuangan Korporasi di Kaltim

Penyaluran kredit korporasi Kaltim tercatat meningkat seiring dengan kinerja kredit sejumlah sektor utama Kaltim. Sejalan dengan penyaluran kredit pada beberapa sektor utama Kaltim, penyaluran kredit korporasi pada triwulan IV 2025 tumbuh sebesar 2,68% (yoy), atau meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang

juga sejalan dengan dengan peningkatan kredit agregatnya (Grafik IV.27). Selain itu, peningkatan kinerja kredit korporasi turut didukung oleh rasio NPLnya yang terjaga rendah sebesar 0,86% (Grafik IV.28).

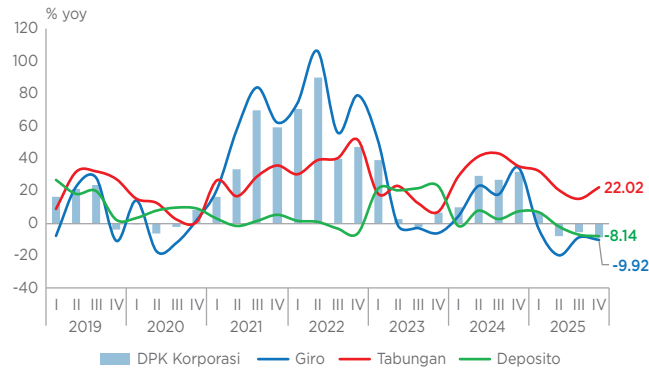
**Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) korporasi mengalami kontraksi sejalan dengan DPK secara umum.** Pada triwulan IV 2025, kinerja DPK korporasi Kaltim mengalami kontraksi lebih dalam dengan triwulan sebelumnya, dari sebesar 5,35% (yoy) menjadi 8,38% (yoy) (Grafik IV.29). Penurunan tersebut terjadi disebabkan utamanya oleh kontraksi pada giro dan deposito yang lebih dalam dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, menjadi masing-masing 9,92% (yoy) dari 13,93% (yoy) (Grafik IV.30). Adapun berdasarkan pangsaanya, giro menyumbang pangsa terbesar terhadap DPK korporasi yakni 64,30%, diikuti oleh deposito dan tabungan masing masing sebesar 24,85% dan 10,85% (Grafik IV.31).

Grafik IV.29 Perkembangan DPK Korporasi Kaltim



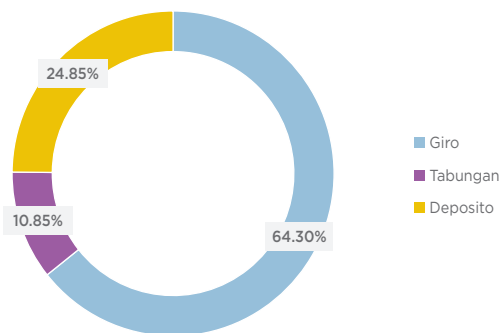
Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik IV.30 Perkembangan DPK Korporasi Kaltim Berdasarkan Komponennya



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik IV.31 Pangsa DPK Korporasi Kaltim



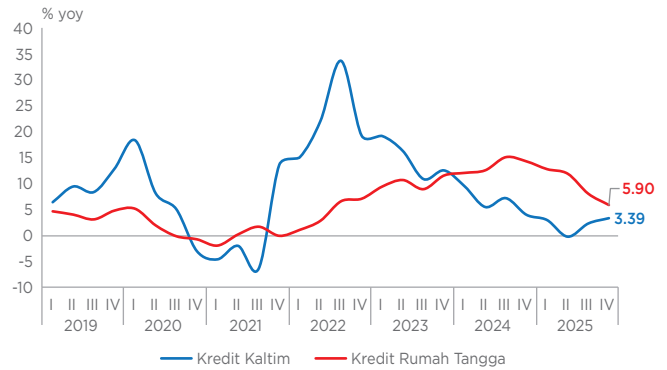
Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

#### 4.2.4. Asesmen Stabilitas Keuangan Rumah Tangga

Kredit rumah tangga Kaltim tumbuh positif dengan rasio NPL yang terjaga rendah. Pertumbuhan kredit rumah tangga pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar 5,90% (yoy), atau melambat dibandingkan dengan triwulan

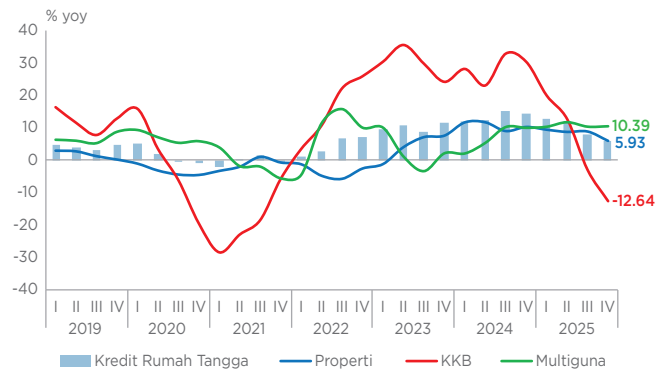
sebelumnya (Grafik IV.32). Perlambatan tersebut didorong utamanya oleh penurunan kinerja kredit kendaraan bermotor dan properti. Di sisi lain, pertumbuhan kredit multiguna tercatat sedikit meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (Grafik IV.33).

Grafik IV.32 Perkembangan Kredit Rumah Tangga Kaltim



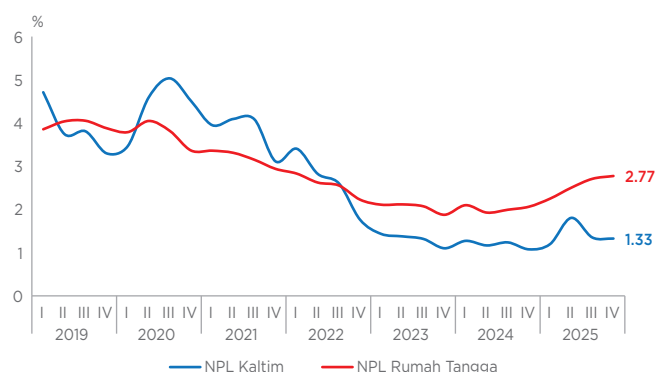
Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik IV.33 Perkembangan Kredit Rumah Tangga Kaltim Berdasarkan Jenis Penggunaannya



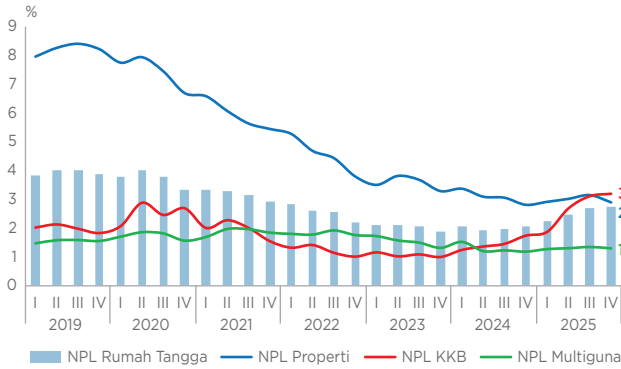
Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik IV.34 NPL Kredit Rumah Tangga Kaltim



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

**Grafik IV.35 NPL Kredit Rumah Tangga Kaltim Berdasarkan Jenis Penggunaannya**



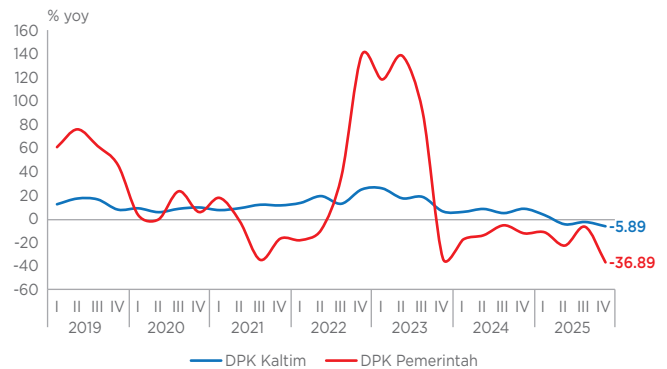
Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Penyaluran kredit rumah tangga yang tumbuh positif diiringi oleh risiko kredit yang rendah. Rasio NPL kredit rumah tangga Kaltim pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar 2,77%, atau lebih tinggi dibandingkan dengan rasio NPL kredit Kaltim secara umum (Grafik IV.34). Jika ditinjau berdasarkan penggunaannya, kredit multiguna mencatatkan rasio NPL yang paling rendah sebesar 1,31% (yoy). Selain itu, terjadi penurunan rasio NPL pada kredit properti dari 3,16% menjadi 2,91% pada periode laporan (Grafik IV.35).

#### 4.2.5. Perkembangan Dana Pihak Ketiga Pemerintah Daerah

Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) Pemerintah terkontraksi lebih dalam seiring dengan realokasi anggaran program prioritas pemerintah. Pada triwulan IV 2025, DPK pemerintah daerah Kaltim tercatat mengalami kontraksi sebesar 36,89% (yoy), atau lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada triwulan sebelumnya. Perlambatan tersebut didorong utamanya oleh kontraksi pada giro sebesar 40,77% (yoy) dari 2,46% (yoy) seiring dengan realokasi anggaran pemerintah untuk sejumlah program prioritas. Sementara itu, tabungan dan deposito pemerintah tercatat mengalami perbaikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, mengindikasikan optimalisasi penggunaan dana oleh pemerintah di tengah efisiensi anggaran melalui pemindahan dana ke

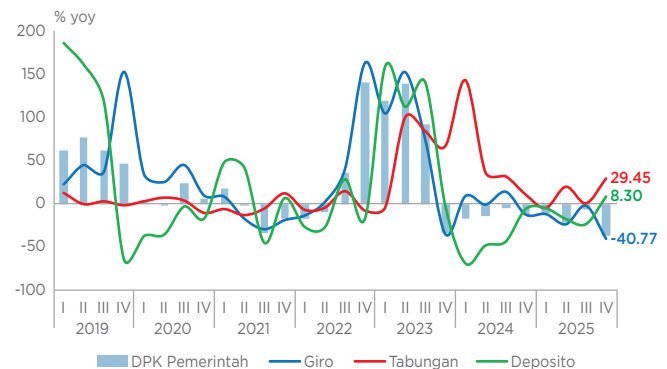
**Grafik IV.36 Perkembangan DPK Pemerintah Daerah Kaltim**



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

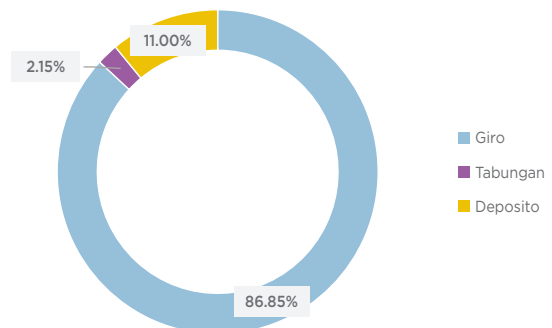
instrumen yang lebih produktif (deposito), sambil tetap menjaga likuiditas (tabungan) (Grafik IV.37). Adapun di antara ketiga komponen tersebut, dana pemerintah sebagian besar disimpan dalam bentuk giro dengan pangsa mencapai 86,85% (Grafik IV.38).

**Grafik IV.37 Perkembangan DPK Pemerintah Daerah Kaltim Berdasarkan Komponennya**



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

**Grafik IV.38 Pangsa DPK Pemerintah Daerah Kaltim Berdasarkan Komponennya**

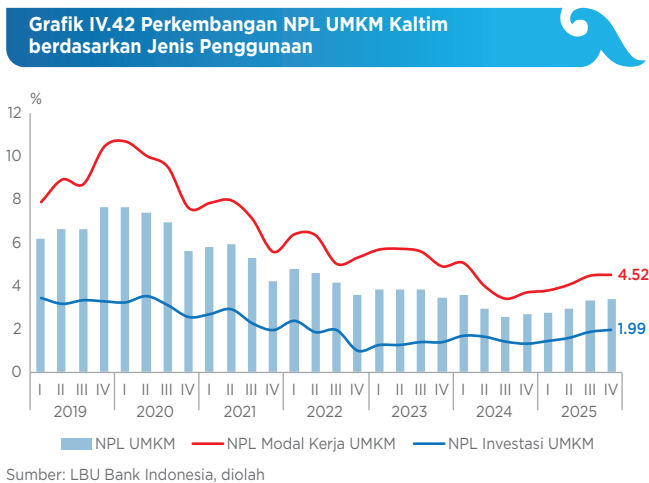
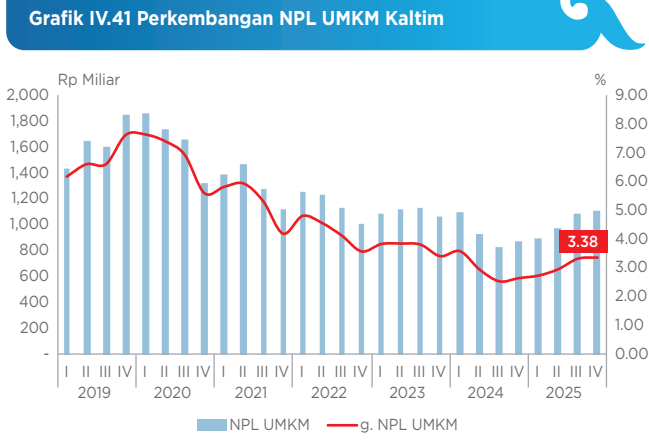
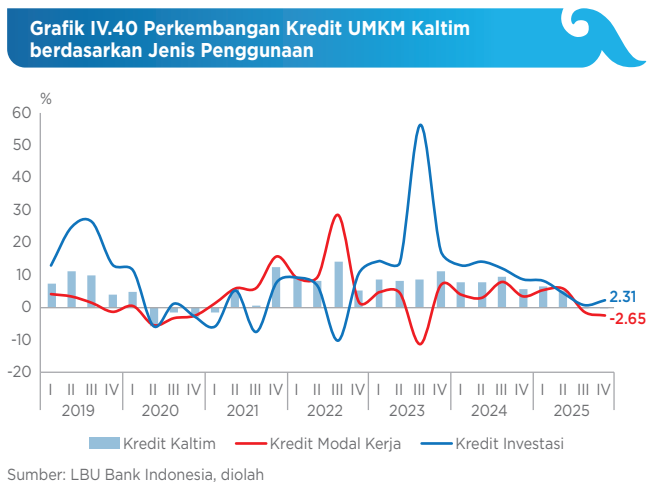
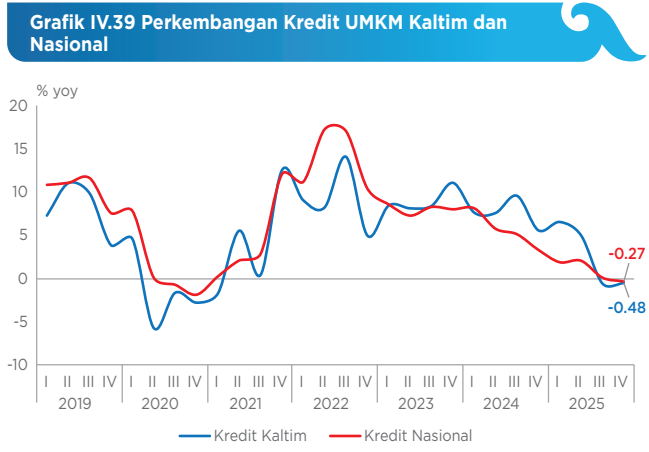


Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

### 4.3. PERKEMBANGAN PENYALURAN KREDIT UMKM

Kredit UMKM Kaltim mengalami perbaikan sejalan dengan kinerja kredit investasinya. Pada triwulan IV 2025, walau masih mengalami kontraksi pertumbuhan kredit UMKM Kaltim mengalami perbaikan dari 0,54% (yoy) menjadi 0,48% (yoy). Sementara itu, kredit UMKM Nasional turut mengalami kontraksi sebesar 0,27% (yoy) setelah tumbuh positif pada triwulan sebelumnya (Grafik IV.39). Adapun berdasarkan jenis penggunaannya, perbaikan penyaluran kredit UMKM Kaltim bersumber dari kinerja kredit investasi yang tumbuh sebesar 2,31% (yoy) dari 0,78% (yoy) (Grafik IV.40). Kondisi ini mengindikasikan adanya ekspansi usaha UMKM di tengah peningkatan konsumsi masyarakat pada *festive event* di akhir tahun.

Perbaikan kredit UMKM Kaltim turut didukung oleh tingkat risiko kredit yang rendah. Pada triwulan IV 2025, rasio NPL UMKM Kaltim tercatat sebesar 3,38%, atau sedikit meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya namun masih berada di bawah *threshold* 5% (Grafik IV.41). Sementara itu, berdasarkan jenis penggunaan, kualitas kredit investasi UMKM tercatat lebih baik dibandingkan kredit modal kerja, tercermin dari rasio NPLnya yang lebih rendah (Grafik IV.42). Kondisi ini mengindikasikan bahwa kredit UMKM yang diarahkan untuk tujuan produktif jangka panjang cenderung memiliki risiko lebih terkendali, sementara kredit modal kerja masih menghadapi tekanan khususnya akibat terbatasnya permintaan.



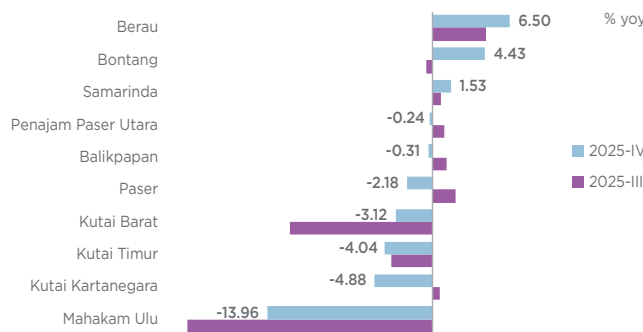
### 4.3.1. Perkembangan Kredit UMKM Spasial

Secara spasial, penyaluran kredit UMKM di sebagian kabupaten/kota di Kaltim mengalami perbaikan. Pada triwulan IV 2025, penyaluran kredit UMKM pada sebagian kabupaten/kota di Kaltim mengalami perbaikan, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi di Kabupaten Berau sebesar 6,50% (yoy) diikuti oleh Kota Bontang sebesar 4,43% (yoy). Sementara itu, walau kredit UMKM di Kabupaten Mahakam Ulu masih mencatatkan pertumbuhan paling rendah, terjadi perbaikan kinerja dari kontraksi sebesar 20,68% (yoy) menjadi 13,96% (yoy) pada periode laporan (Grafik IV.43).

Penyaluran kredit UMKM spasial Kaltim yang positif, diiringi dengan tingkat risiko yang relatif rendah. Secara spasial, rasio NPL kredit UMKM di kabupaten/kota Kaltim relatif rendah, dengan rasio NPL paling kecil tercatat di Kabupaten Mahakam Ulu (0,03%) dan paling besar di Kabupaten Paser (5,00%). Adapun secara umum, risiko kredit UMKM di kabupaten/kota Kaltim mengalami penurunan dibandingkan dengan periode sebelumnya (Grafik IV.44).

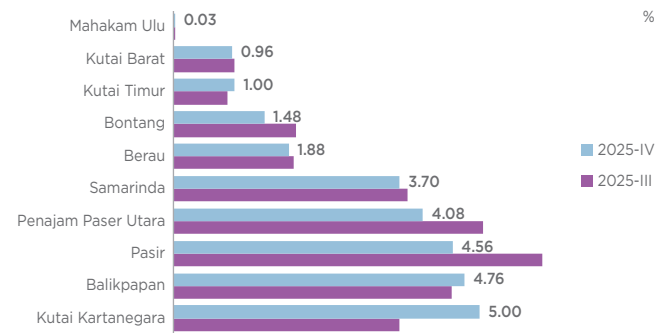
Penyaluran kredit UMKM Kaltim masih terkonsentrasi di Kota Balikpapan dan Samarinda. Melanjutkan data historis, Kota Balikpapan dan Samarinda masih menjadi penyumbang kredit UMKM tertinggi dengan total pangsa kedua kota tersebut mencapai 49,50%. Besarnya pangsa penyaluran kredit pada kedua kota tersebut tidak terlepas dari kondisi bahwa kedua kota tersebut merupakan pusat kegiatan ekonomi di Kaltim yang memiliki jumlah UMKM *bankable* yang cenderung lebih banyak. Di sisi lain, Kabupaten Mahakam Ulu menempati posisi terendah dalam pangsa kredit UMKM Kaltim yakni sebesar 0,80% (Grafik IV.45).

Grafik IV.43 Pertumbuhan Kredit UMKM Spasial Kabupaten/Kota di Wilayah Kaltim



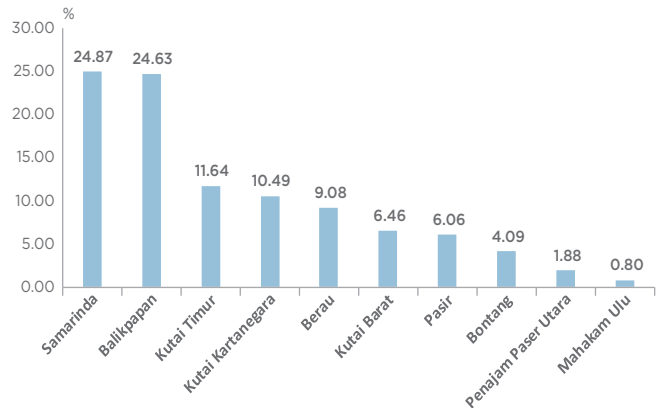
Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik IV.44 Perkembangan NPL UMKM Spasial Kabupaten/Kota di Wilayah Kaltim



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik IV.45 Pangsa Kredit UMKM Spasial Kabupaten/Kota di Kaltim



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

# 05

## Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah



“

- Pada triwulan IV 2025 kinerja transaksi sistem pembayaran melalui infrastruktur Bank Indonesia tumbuh positif.
- Pembayaran nontunai retail melalui Uang Elektronik (UE) dan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) mengalami pertumbuhan positif baik dari sisi nominal maupun volume transaksi.
- Aliran uang kartal berada pada posisi *net outflow*, didorong oleh peningkatan konsumsi masyarakat menjelang HBKN serta percepatan realisasi belanja pemerintah pada akhir tahun dalam rangka penutupan tahun anggaran.
- Aliran uang kartal berada pada posisi *net outflow*, didorong oleh peningkatan konsumsi masyarakat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru), serta percepatan realisasi belanja pemerintah pada akhir tahun dalam rangka penutupan tahun anggaran.

**QRIS** QR Code Standar  
Pembayaran Nasional



SERAUNG COFFEE  
NMID: ID2024310184864  
A01



SATU QRIS UNTUK SEMUA  
Cek aplikasi penyelenggara  
di: [www.aspi-qrnis.id](http://www.aspi-qrnis.id)

Bank oleh: 93600014  
Cetak: 10-2024-01-12

Cara pakai Aspi QRIS



## 5.1. GAMBARAN UMUM

**Transaksi sistem pembayaran di Kalimantan Timur pada triwulan IV 2025 tetap menunjukkan kinerja yang baik.** Dari sisi nominal, transaksi sistem pembayaran melalui infrastruktur Bank Indonesia pada triwulan IV 2025 tumbuh sebesar 15,04% (yoy) dengan nominal Rp121,14 triliun, atau lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Dari sisi volume, transaksi melalui infrastruktur Bank Indonesia juga mengalami pertumbuhan positif sebesar 6,14% (yoy) atau dengan total volume 26,93 juta transaksi. Perkembangan ini mencerminkan aktivitas ekonomi daerah yang tetap berlangsung dengan baik serta meningkatnya pemanfaatan instrumen pembayaran non tunai oleh masyarakat.

Pertumbuhan tersebut ditopang oleh transaksi BI-FAST yang menjadi kontributor terbesar dalam sistem pembayaran ritel. BI-FAST menyumbang pangsa sebesar 53% dari total nominal transaksi dan tumbuh 1,52% (yoy). Kontribusi tersebut menunjukkan bahwa layanan transfer dana yang *real-time* dan berbiaya rendah semakin menjadi pilihan utama dalam mendukung kebutuhan transaksi sehari-hari, baik untuk konsumsi rumah tangga maupun aktivitas usaha. Sementara itu, transaksi melalui RTGS dan SKNBI secara nominal masing-masing berkontraksi 29,8% (yoy) dan 20,10% (yoy). Perkembangan ini mencerminkan penyesuaian komposisi antar instrumen pembayaran, seiring dengan pergeseran kebutuhan transaksi ke layanan sistem pembayaran ritel yang lebih cepat dan efisien. Dari sisi instrumen pembayaran non tunai ritel, QRIS mencatat pertumbuhan yang signifikan dengan kenaikan nominal sebesar 88% (yoy) dan volume sebesar 108% (yoy). Pertumbuhan tersebut mengindikasikan semakin luasnya akseptasi QRIS, khususnya pada sektor UMKM dan transaksi bernilai kecil hingga menengah. Transaksi Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) juga tetap menunjukkan kinerja positif dari sisi nominal sebesar 7,28% (yoy), sementara volume APMK relatif stabil dengan kontraksi tipis sebesar 0,10% (yoy). Dinamika ini mengindikasikan bahwa konsumsi masyarakat tetap berlangsung

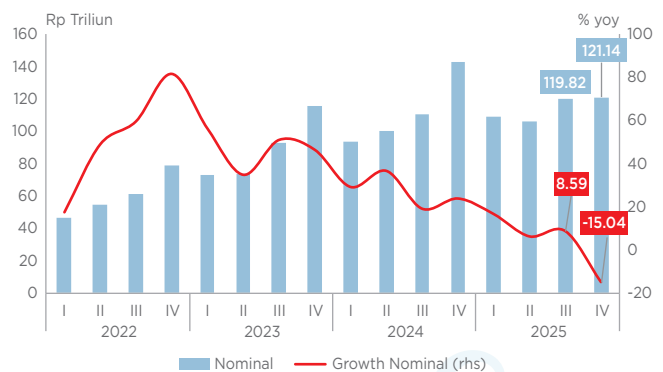
dengan baik di tengah semakin beragamnya pilihan instrumen pembayaran.

Dari sisi transaksi tunai, aliran uang kartal pada triwulan IV tahun 2025 mencatatkan posisi *net outflow*, sejalan dengan konsumsi *outflow*, didorong oleh peningkatan konsumsi masyarakat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru), serta percepatan realisasi belanja pemerintah pada akhir tahun dalam rangka penutupan tahun anggaran. Secara nominal, nilai uang kartal yang masuk ke Bank Indonesia (*inflow*) tercatat sebesar Rp 1,96 triliun, sementara nilai uang kartal yang diedarkan oleh Bank Indonesia (*outflow*) sebesar Rp 7,18 triliun. Dengan kondisi tersebut, aliran uang kartal berada pada posisi *net outflow* sebesar Rp 5,23 triliun.

## 5.2. SISTEM PEMBAYARAN YANG DISELENGGARAKAN BANK INDONESIA

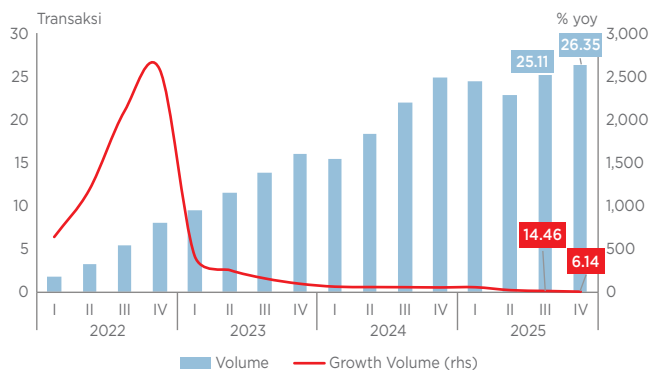
Pada triwulan IV 2025, nominal transaksi sistem pembayaran melalui infrastruktur Bank Indonesia mengalami peningkatan pertumbuhan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Nominal transaksi sistem pembayaran melalui infrastruktur Bank Indonesia mencapai sebesar Rp121,14 triliun, atau tumbuh positif sebesar 15,04% (yoy) (Grafik V.1). Dari sisi volume, transaksi sistem pembayaran melalui infrastruktur Bank Indonesia tumbuh sebesar 6,14% (yoy), dengan volume transaksi sebesar 26,35 juta kali transaksi. Kondisi

**Grafik V.1 Perkembangan Nominal Transaksi Melalui Sistem Pembayaran Bank Indonesia di Provinsi Kaltim**



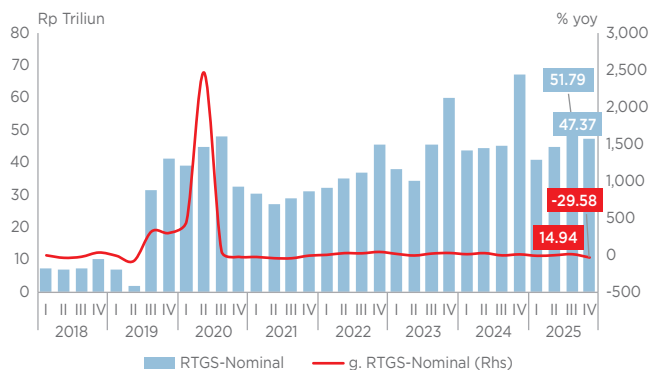
Sumber: Bank Indonesia, diolah

**Grafik V.2 Perkembangan Volume Transaksi Melalui Sistem Pembayaran Bank Indonesia di Provinsi Kaltim (% yoy)**



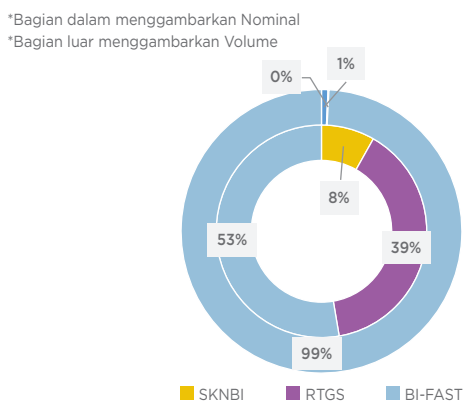
Sumber: Bank Indonesia, diolah

**Grafik V.4 Perkembangan Nominal Transaksi RTGS di Provinsi Kaltim**



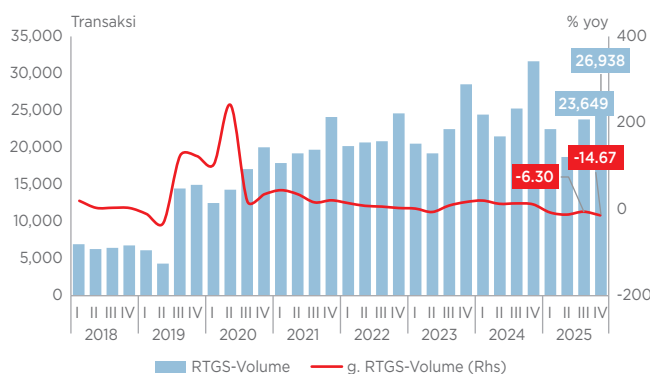
Sumber: Bank Indonesia, diolah

**Grafik V.3 Transaksi Melalui Sistem Pembayaran Bank Indonesia di Kaltim Berdasarkan Infrastruktur**



Sumber: Bank Indonesia, diolah

**Grafik V.5 Perkembangan Volume Transaksi RTGS di Provinsi Kaltim**



Sumber: Bank Indonesia, diolah

ini tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi di triwulan sebelumnya (Grafik V.2). Hal ini sejalan dengan kondisi pertumbuhan ekonomi Kaltim yang juga meningkat di akhir tahun 2025.

**Transaksi sistem pembayaran melalui infrastruktur Bank Indonesia didominasi oleh transaksi BI-FAST, baik dari sisi nominal maupun volume.** Transaksi BI-FAST berkontribusi sebesar 53% dari total nominal transaksi. Dari sisi volume, transaksi BI-FAST berkontribusi sebesar 99% dari total volume transaksi yang tercatat (Grafik V.3).

### 5.2.1. Perkembangan Transaksi Real Time Gross Settlement (RTGS)

**Transaksi RTGS pada triwulan IV 2025 mengalami kontraksi, baik dari sisi nominal maupun volume.** Pada triwulan IV 2025, pertumbuhan nominal

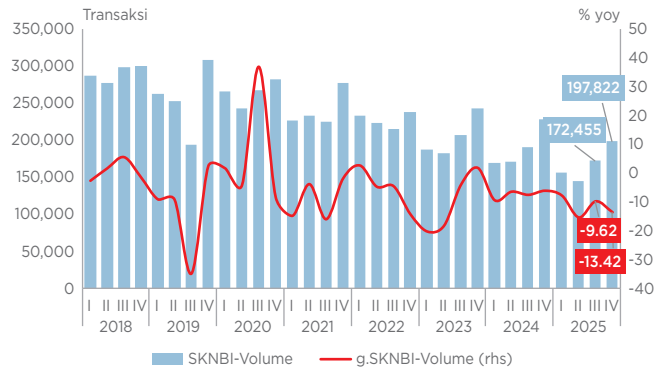
transaksi RTGS terkontraksi sebesar 29,8% (yoy), atau lebih rendah dibandingkan dengan triwulan III 2025 yang mengalami tumbuh sebesar 14,94% (yoy). Nominal transaksi RTGS triwulan IV 2025 tercatat sebesar Rp47,37 triliun, juga lebih rendah dibandingkan dengan triwulan III 2025 yang tercatat sebesar Rp51,79 triliun (Grafik V.4). Lebih lanjut, volume transaksi RTGS pada periode laporan tercatat turut mengalami kontraksi. Volume RTGS mengalami kontraksi sebesar 14,67% (yoy), atau lebih dalam dibandingkan dengan triwulan III 2025 yang terkontraksi sebesar 6,30% (yoy). Kondisi ini diperkirakan disebabkan oleh peralihan transaksi dengan nominal sedang dari RTGS ke BI-FAST. Volume transaksi RTGS triwulan IV 2025 tercatat sebanyak 26.938 transaksi, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan III 2025 yang tercatat sebanyak 23.649 transaksi (Grafik V.5).

### 5.2.2. Perkembangan Transaksi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)

Transaksi SKNBI pada triwulan IV 2025 menunjukkan dinamika penyesuaian sejalan dengan transformasi sistem pembayaran nasional. Secara tahunan, nominal transaksi SKNBI tercatat terkontraksi sebesar 20,10% (yoy), atau sedikit lebih dalam dibandingkan dengan triwulan III 2025 yang terkontraksi sebesar 16,49% (yoy). Meski demikian, secara triwulanan nominal transaksi mengalami peningkatan menjadi Rp9,94 triliun dari Rp8,70 triliun pada triwulan III 2025 (Grafik V.6), mencerminkan tetap terjaganya aktivitas transaksi antarbank melalui kanal SKNBI.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, volume transaksi SKNBI pada triwulan IV 2025 juga tercatat terkontraksi sebesar 13,42% (yoy), atau lebih dalam dibandingkan dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 9,62% (yoy). Namun demikian, volume transaksi triwulan IV 2025 meningkat menjadi 197.822 transaksi, dari sebelumnya hanya 172.455 transaksi pada triwulan III 2025 (Grafik V.7). Kondisi ini mengindikasikan adanya perbaikan aktivitas transaksi dibandingkan dengan periode sebelumnya. Perkembangan ini merupakan bagian dari proses transisi dan diversifikasi instrumen pembayaran, di mana preferensi masyarakat semakin beralih ke layanan transfer ritel berbasis BI-FAST. Pergeseran tersebut mencerminkan respons positif terhadap inovasi sistem pembayaran yang lebih cepat dan efisien.

Grafik V.7 Perkembangan Volume Transaksi SKNBI di Provinsi Kaltim

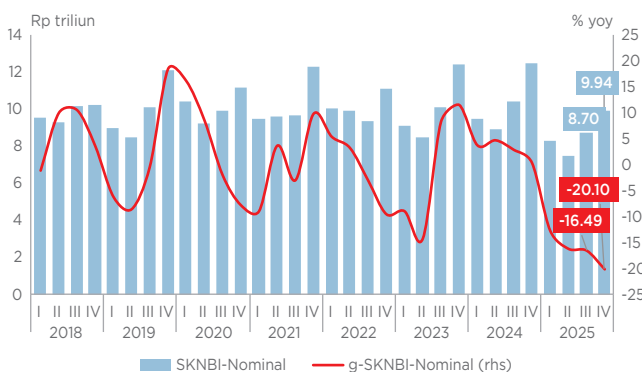


Sumber: Bank Indonesia, diolah

### 5.2.3. Perkembangan Transaksi BI-FAST

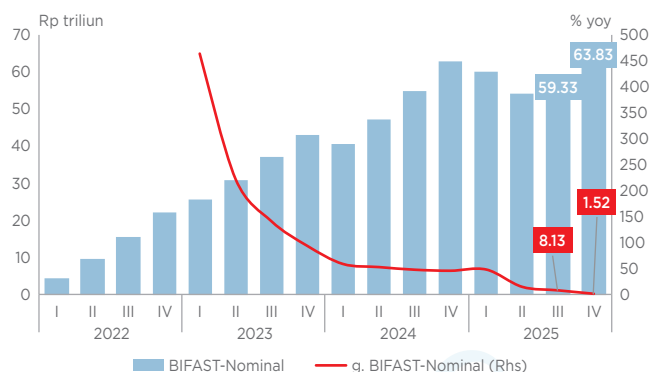
Transaksi BI-FAST pada triwulan IV 2025 tetap menunjukkan kinerja yang baik dari sisi nominal maupun volume. Pada triwulan IV 2025, nominal transaksi BI-FAST tumbuh sebesar 1,52% (yoy), atau melanjutkan tren ekspansi meskipun dengan laju yang lebih moderat dibandingkan triwulan III 2025 yang sebesar 8,13% (yoy). Secara nominal, transaksi BI-FAST pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar Rp 63,83 triliun (Grafik V.8), atau mencerminkan tingginya utilisasi layanan transfer ritel berbasis BI-FAST di wilayah Kaltim. Sejalan dengan hal tersebut, volume transaksi BI-FAST juga tetap berada pada tren pertumbuhan positif sebesar 6,34% (yoy), setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh sebesar 14,70% (yoy). Total volume transaksi pada triwulan IV 2025 mencapai 26,12 juta transaksi (Grafik V.9), menunjukkan

Grafik V.6 Perkembangan Nominal Transaksi SKNBI di Provinsi Kaltim



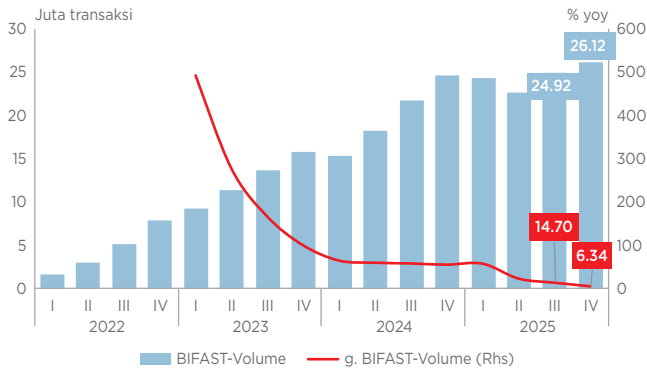
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik V.8 Perkembangan Nominal Transaksi BI-FAST di Provinsi Kaltim



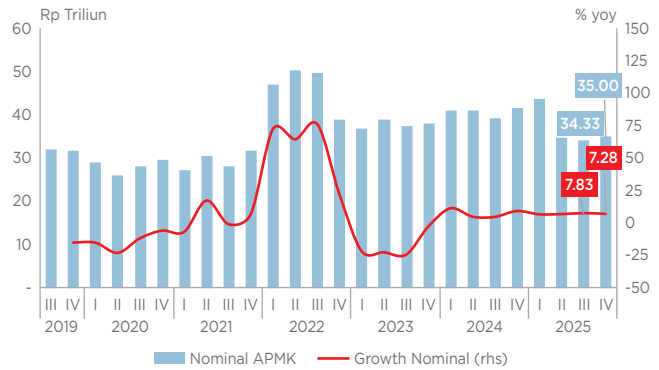
Sumber: Bank Indonesia, diolah

**Grafik V.9 Perkembangan Volume Transaksi SKNBI di Provinsi Kaltim**



Sumber: Bank Indonesia, diolah

**Grafik V.10 Perkembangan Nominal Transaksi APMK di Provinsi Kaltim**



Sumber: Bank Indonesia, diolah

keberlanjutan preferensi masyarakat terhadap instrumen pembayaran yang cepat dan efisien. Kinerja tersebut mencerminkan semakin menguatnya adopsi BI-FAST sebagai kanal utama transfer ritel, sejalan dengan perubahan preferensi masyarakat serta tetap terjaganya aktivitas ekonomi di Kaltim pada triwulan IV 2025.

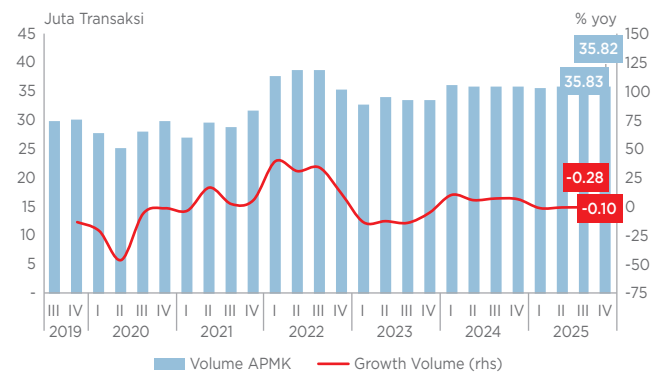
### 5.3. SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI RITEL

Sistem pembayaran non tunai ritel yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia merupakan mekanisme pembayaran elektronik yang digunakan untuk transaksi masyarakat sehari-hari dengan nilai kecil. Sistem ini terdiri dari beberapa instrumen utama, yaitu Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) yang terdiri dari Kartu Debit/ATM dan Kartu Kredit, Uang Elektronik (UE), dan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS).

#### 5.3.1. Perkembangan Transaksi APMK

**Transaksi Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) pada triwulan IV 2025 menunjukkan dinamika pertumbuhan.** Nominal transaksi melalui APMK tercatat tumbuh sebesar 7,28% (yoy), atau sedikit menurun dibandingkan triwulan III 2025

**Grafik V.11 Perkembangan Volume Transaksi APMK di Provinsi Kaltim**



Sumber: Bank Indonesia, diolah

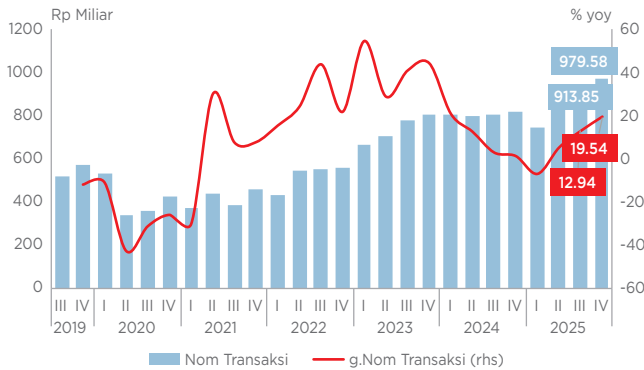
yang tumbuh sebesar 7,28% (yoy). Meski demikian, secara nominal transaksi APMK pada triwulan IV 2025 tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dengan nominal sebesar Rp 35 triliun (Grafik V.10), menunjukkan bahwa penggunaan kartu sebagai instrumen pembayaran non tunai masih terjaga. Dari sisi volume, transaksi APMK berkontraksi sebesar -0,10% (yoy), atau lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar -0,28% (yoy). Volume transaksi pada triwulan IV 2025 tercatat mencapai 35,82 juta transaksi (Grafik V.11), yang mencerminkan aktivitas konsumsi masyarakat yang tetap berlangsung dengan baik meskipun laju pertumbuhannya lebih terbatas dibandingkan periode sebelumnya.

5.3.1.1. APMK Kartu Kredit

Transaksi kartu kredit mengalami pertumbuhan dari sisi nominal dan volume. Nominal transaksi APMK Kartu Kredit pada triwulan IV 2025 mengalami pertumbuhan positif sebesar 19,54% (yoy), atau lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan III 2025 yang tumbuh hanya sebesar 12,94% (yoy). Nominal transaksi kartu kredit triwulan IV 2025 tercatat sebesar Rp 979,58 miliar (Grafik V.12). Transaksi kartu kredit dari sisi volume pada triwulan IV 2025 juga mengalami kenaikan yaitu sebesar 26,53% (yoy), atau lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi triwulan III 2025 yang tumbuh sebesar 14,25% (yoy). Volume transaksi kartu kredit triwulan IV 2025 tercatat 990.459 transaksi di Provinsi Kaltim (Grafik V.13).

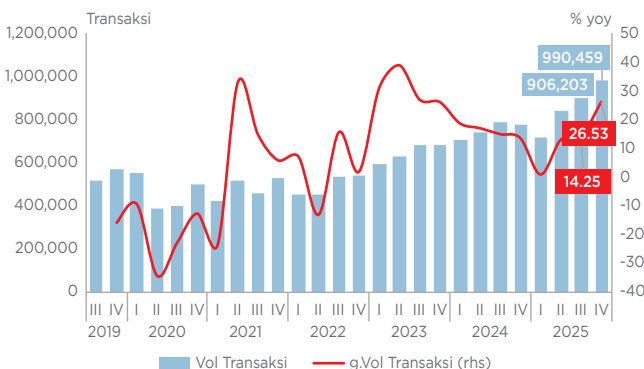
Kota Balikpapan dan Kota Samarinda menjadi penggerak utama pertumbuhan transaksi kartu kredit di Provinsi Kaltim. Berdasarkan nominal transaksi, Kota Balikpapan dan Kota

Grafik V.12 Perkembangan Nominal Transaksi Kartu Kredit di Provinsi Kaltim



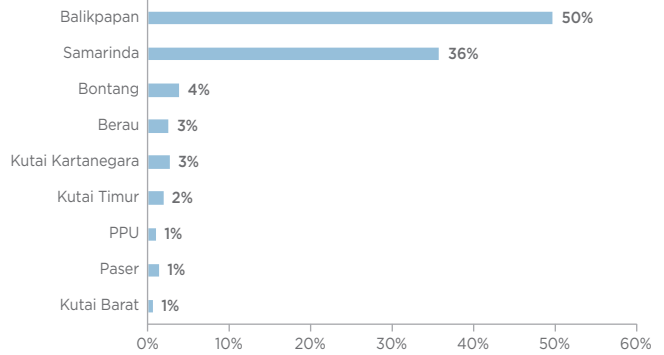
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik V.13 Perkembangan Volume Transaksi Kartu Kredit di Provinsi Kaltim



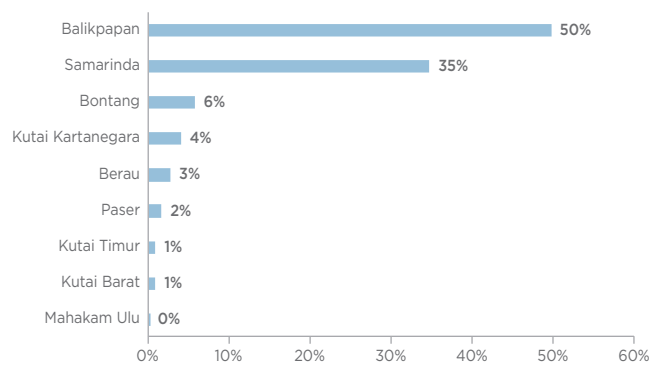
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik V.14 Distribusi Nominal Transaksi Kartu Kredit di Provinsi Kaltim



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik V.15 Distribusi Volume Transaksi Kartu Kredit di Provinsi Kaltim



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Samarinda memiliki porsi sebesar 21%, disusul oleh Kabupaten Kutai Timur sebesar 15% dan Kabupaten Kutai Kartanegara masing masing sebesar 13% (Grafik V.14). Berdasarkan volume transaksi, Kota Balikpapan memiliki porsi sebesar 48% sementara Kota Samarinda sebesar 36%, disusul oleh Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Kartanegara masing masing sebesar 5% dan 3% (Grafik V.15).

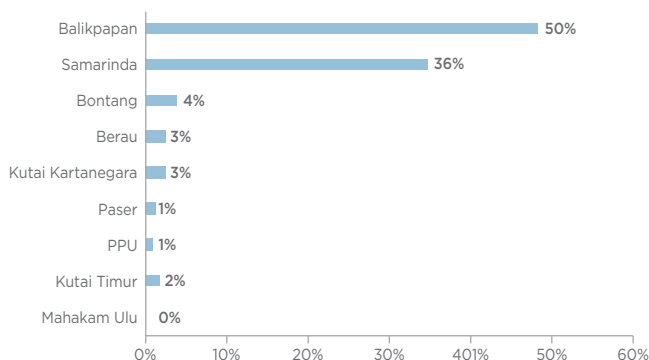
5.3.1.2. Perkembangan Transaksi APMK Kartu ATM/Debit

Transaksi kartu ATM/Debit mengalami pertumbuhan dari sisi nominal maupun dari sisi volume. Pada triwulan IV tahun 2025, nominal transaksi kartu ATM/Debit masih tumbuh positif sebesar 1,35% (yoy), atau tumbuh lebih rendah dibandingkan dengan triwulan III 2025 dengan pertumbuhan 3,99% (yoy). Namun, nominal

transaksi kartu ATM/Debit triwulan IV tahun 2025 tercatat lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya, dengan nominal sebesar Rp 41,38 triliun (Grafik V.16). Sementara dari sisi volume, transaksi kartu ATM/Debit mengalami kontraksi sebesar 3,02% (yoy), atau lebih baik dibandingkan dengan triwulan III 2025 yang terkontraksi 4,86% (yoy). Volume transaksi kartu ATM/Debit triwulan IV tahun 2025 tercatat 34,01 juta transaksi (Grafik V.17).

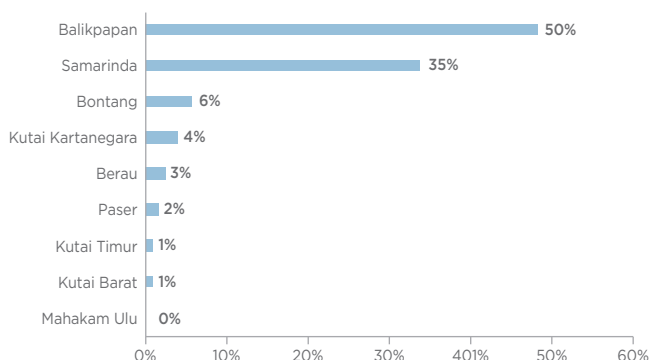
Secara spasial, Kota Samarinda dan Kota Balikpapan menjadi penggerak utama pertumbuhan transaksi ATM/Debit. Berdasarkan nominal transaksi, Kota Balikpapan menempati posisi teratas dengan porsi sebesar 50% yang kemudian disusul dengan Kota Samarinda sebesar 36% yang disusul oleh Kota Bontang sebesar 4% dan Kabupaten Berau sebesar 3% (Grafik V.18). Jika dilihat dari sisi volume transaksi, Kota Balikpapan dan Kota Samarinda memiliki masing

Grafik V.18 Distribusi Nominal Transaksi Kartu ATM/Debit di Provinsi Kaltim Triwulan IV 2025



Sumber: Bank Indonesia, diolah

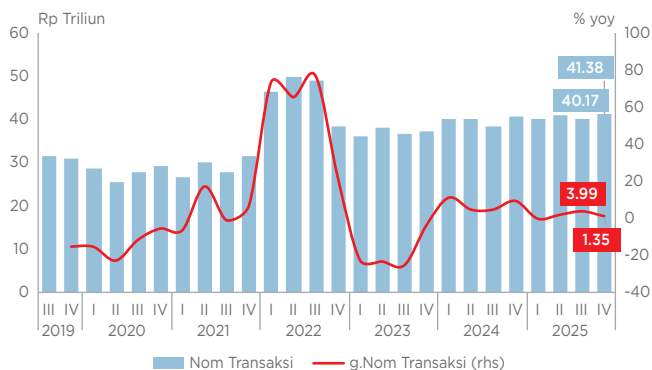
Grafik V.19 Distribusi Volume Transaksi Kartu ATM/Debit di Provinsi Kaltim Triwulan IV 2025



Sumber: Bank Indonesia, diolah

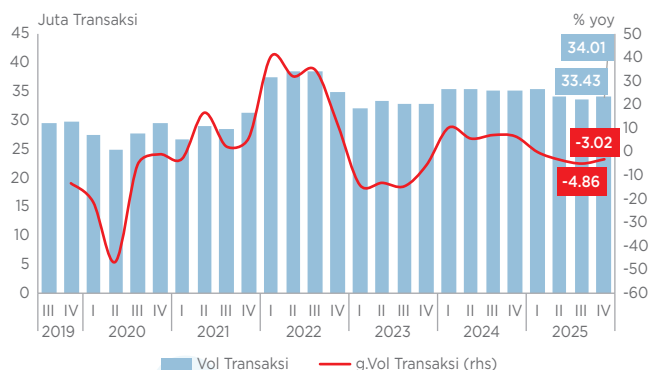
masing porsi yaitu 50% dan 35%, sementara Kota Bontang 6% dan disusul oleh Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Berau masing masing sebesar 4% dan 3% (Grafik V.19).

Grafik V.16 Perkembangan Nominal Transaksi Kartu ATM/Debit di Provinsi Kaltim



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik V.17 Perkembangan Volume Transaksi Kartu ATM/Debit di Provinsi Kaltim



Sumber: Bank Indonesia, diolah

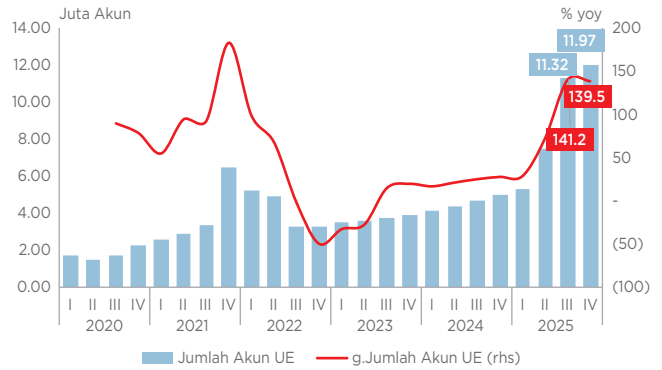
### 5.3.2. Perkembangan Transaksi Uang Elektronik

Transaksi Uang Elektronik (UE) mengalami pertumbuhan positif baik dari sisi nominal maupun volume. Pada triwulan IV tahun 2025, nominal transaksi UE mampu tumbuh positif sebesar 18,74% (yoy), atau meningkat dibandingkan dengan triwulan III 2025 yang tumbuh 1,91% (yoy). Nominal transaksi UE triwulan IV tahun 2025 tercatat Rp 2.39 triliun , atau lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan III 2025 yang sebesar Rp 2.11 triliun (Grafik V.20). Volume transaksi UE juga mengalami pertumbuhan positif sebesar 38,2% (yoy), atau

meningkat dibandingkan dengan triwulan III 2025 yang tumbuh 23,6% (yoy). Volume transaksi UE triwulan IV tahun 2025 tercatat 26,51 juta transaksi (Grafik V.21). Pertumbuhan transaksi UE baik dari sisi nominal maupun volume transaksi, didukung dengan terus tumbuhnya jumlah akun UE.

Selain nominal dan volume, jumlah akun uang elektronik juga melanjutkan tren pertumbuhan positif. Pertumbuhan jumlah akun UE triwulan IV tahun 2025 tercatat 139,5% (yoy), sedikit lebih rendah dibandingkan dengan triwulan III 2025 yang tumbuh 141,2% (yoy). Jumlah akun UE triwulan IV tahun 2025 tercatat 11,97 juta akun, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan III tahun 2025 yang tercatat 11,32 juta akun (Grafik V.22). Pertumbuhan transaksi dan jumlah akun UE sejalan dengan terus tumbuhnya pembayaran menggunakan kanal non tunai ritel untuk transaksi di pusat perbelanjaan, transportasi, dan jalan tol di wilayah Kaltim.

Grafik V.22 Perkembangan Jumlah Akun Uang Elektronik di Provinsi Kaltim



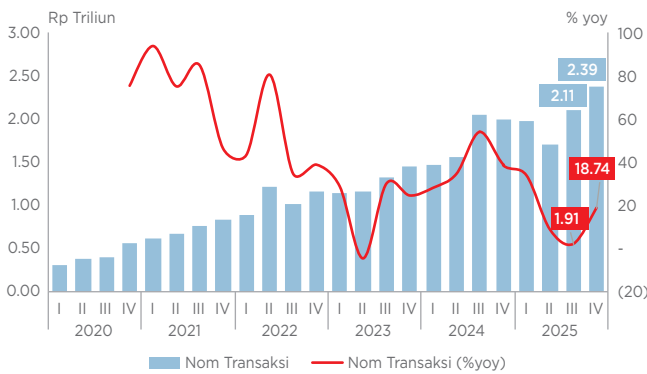
Sumber: Bank Indonesia, diolah

### 5.3.3. Perkembangan Transaksi QRIS

Jumlah pengguna baru dan merchant QRIS terus mengalami pertumbuhan positif pada triwulan laporan. Pada triwulan IV 2025, jumlah pengguna QRIS tumbuh positif sebesar 7,08% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan III 2025 yang tumbuh sebesar 6,31% (yoy). Jumlah pengguna QRIS triwulan IV tahun 2025 tercatat 850.806 pengguna, atau lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan III 2025 yang tercatat sebanyak 828.533 pengguna (Grafik V.23). Pada triwulan yang sama, jumlah merchant QRIS juga mengalami pertumbuhan sebesar 34% (yoy), atau meningkat dibandingkan dengan triwulan III 2025 yang mengalami pertumbuhan 33% (yoy). Jumlah merchant triwulan IV 2025 tercatat sebanyak 798.210 merchant (Grafik V.24). Pertumbuhan jumlah pengguna dan merchant QRIS yang tinggi tersebut sejalan dengan berbagai kegiatan sosialisasi, edukasi, dan publikasi yang gencar dilakukan untuk meningkatkan awareness dan minat masyarakat dalam menggunakan kanal QRIS.

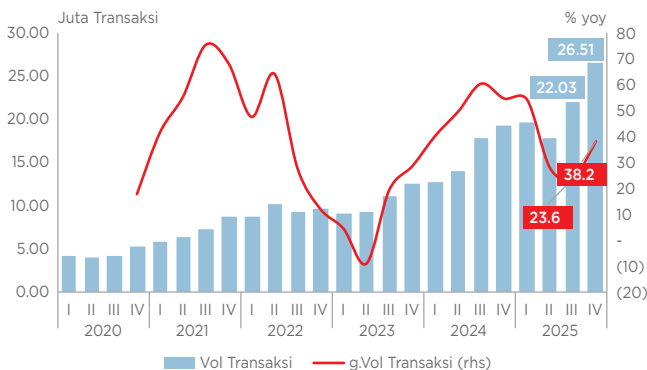
Transaksi QRIS baik dari sisi nominal maupun volume terus berada dalam tren positif. Pada triwulan IV 2025, nominal transaksi QRIS tumbuh sebesar 88% (yoy), atau pertumbuhan nominal transaksi QRIS menurun dibandingkan dengan triwulan III 2025 sebelumnya yang mengalami pertumbuhan sebesar 152% (yoy). Nominal transaksi QRIS triwulan IV 2025 tercatat Rp 6.43 triliun, atau lebih rendah dibandingkan dengan

Grafik V.20 Perkembangan Nominal Transaksi Uang Elektronik di Provinsi Kaltim



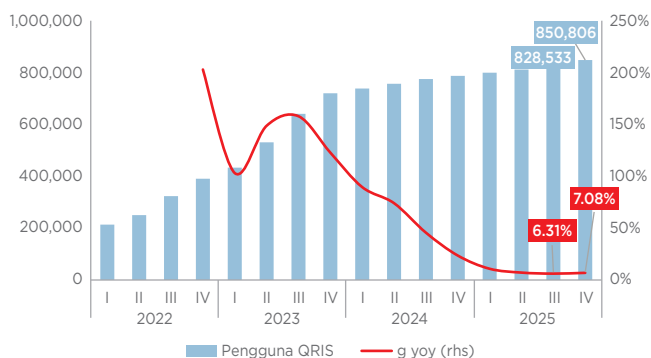
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik V.21 Perkembangan Volume Transaksi Uang Elektronik di Provinsi Kaltim



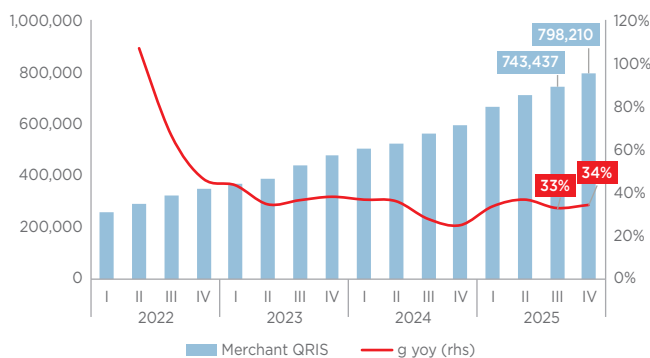
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik V.23 Jumlah Pengguna QRIS di Provinsi Kaltim



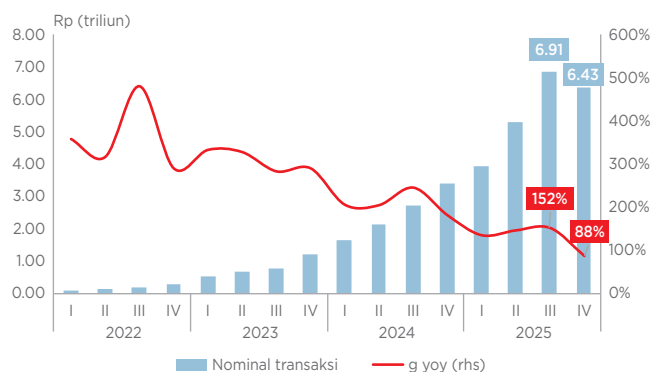
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik V.24 Jumlah Merchant QRIS di Provinsi Kaltim



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik V.25 Perkembangan Nominal Transaksi QRIS di Provinsi Kaltim



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik V.26 Perkembangan Volume Transaksi QRIS di Provinsi Kaltim



Sumber: Bank Indonesia, diolah

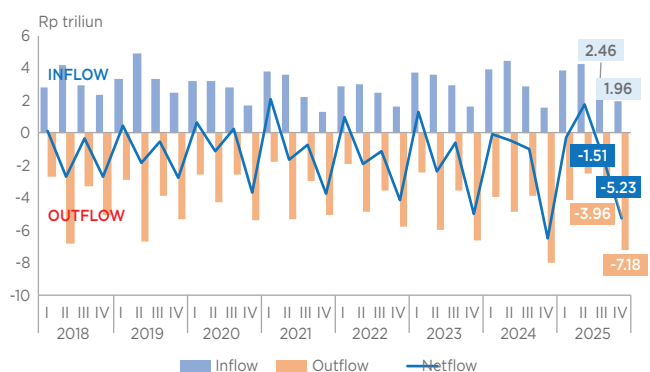
triwulan III 2025 sebelumnya yang tercatat Rp6.91 triliun (Grafik V.25). Volume transaksi QRIS juga mengalami pertumbuhan sebesar 108% (yoy) pada triwulan IV 2025. Pertumbuhan volume transaksi QRIS tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan III 2025 yang mengalami pertumbuhan sebesar 234% (yoy). Volume transaksi QRIS triwulan IV 2025 tercatat 51.84 juta transaksi, atau lebih rendah dibandingkan dengan triwulan III 2025 yang tercatat 64.9 juta transaksi (Grafik V.26).

berada pada posisi *net outflow* sebesar Rp5,23 triliun (Grafik V.27). Posisi *net outflow* ini seiring dengan meningkatnya aktivitas perekonomian masyarakat Kalimantan Timur. Secara spasial, *net outflow* bersumber dari wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltim sebesar Rp2,81 triliun, sementara *net outflow* Kantor Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan tercatat sebesar Rp 2,41 triliun (Grafik V.28).

### 5.4. PENGELOLAAN UANG RUPIAH

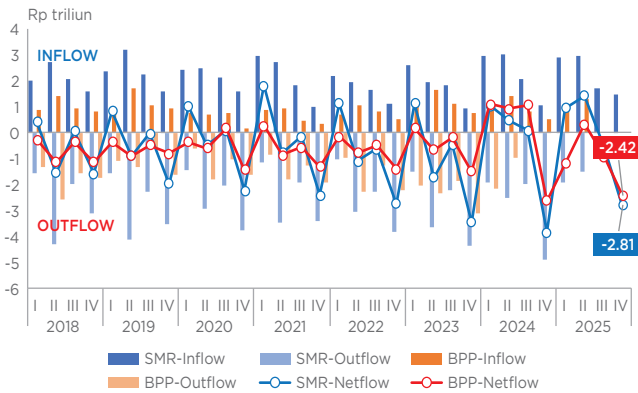
Dari sisi transaksi tunai, aliran uang kartal pada triwulan IV 2025 mencatat posisi *net outflow*. Secara nominal, nilai uang kartal yang masuk ke Bank Indonesia (*inflow*) tercatat sebesar Rp 1,96 triliun, sementara nilai uang kartal yang diedarkan oleh Bank Indonesia (*outflow*) sebesar Rp7,18 triliun. Dengan kondisi tersebut, aliran uang kartal

Grafik V.27 Pengedaran Uang Kartal di Provinsi Kaltim



Sumber: Bank Indonesia, diolah

**Grafik V.28 Uang Kartal di Provinsi Kaltim – Spasial**

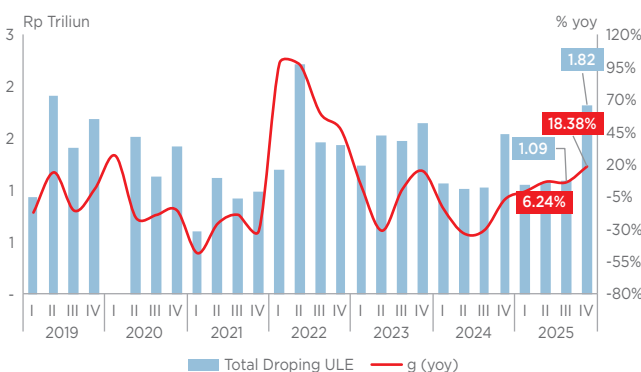


Sumber: Bank Indonesia, diolah

**Droping Uang Layak Edar (ULE) pada triwulan IV 2025 menunjukkan perkembangan positif.** Secara nominal, realisasi *dropping* ULE mencapai Rp 1,82 triliun, atau tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 18,38% (yoy). Kondisi ini terjadi seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi di wilayah Kaltim (Grafik V.29). Perkembangan ini mengindikasikan bahwa kebutuhan uang kartal di masyarakat tetap terpenuhi secara memadai, dengan pola distribusi yang menyesuaikan dinamika permintaan di daerah.

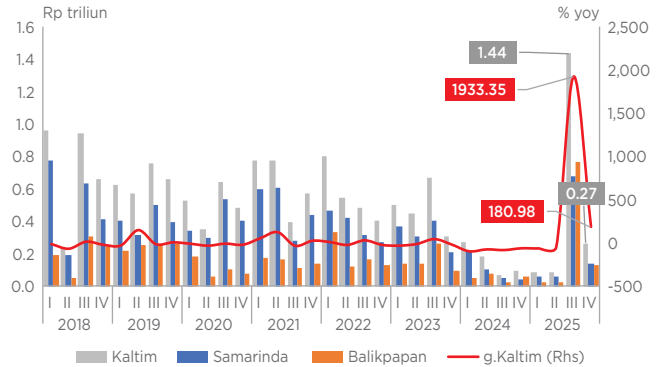
**Jumlah Uang Tidak Layak Edar (UTLE) yang ditarik dari masyarakat mengalami penurunan.** Dalam rangka menjaga kualitas uang kartal yang beredar di masyarakat, Bank Indonesia menjalankan kebijakan *Clean Money Policy* (CMP). Salah satu

**Grafik V.29 Dropping ULE dan inflow UTLE**



Sumber: Bank Indonesia, diolah

**Grafik V.30 Penarikan Uang Tidak Layak Edar di Provinsi Kaltim**

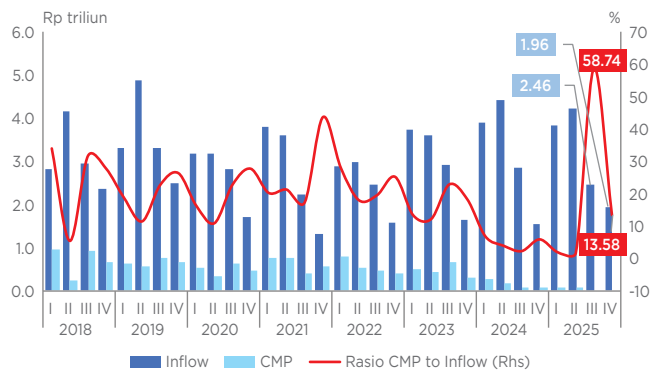


Sumber: Bank Indonesia, diolah

kegiatan yang dilaksanakan adalah pemusnahan Uang Tidak Layak Edar (UTLE) secara rutin. Pada triwulan IV 2025, nominal penyerapan UTLE selama periode laporan mengalami kenaikan sebesar 180,98% (yoy) atau sebesar Rp 270 miliar. (Grafik V.30).

**Rasio nominal penarikan UTLE terhadap inflow di Provinsi Kaltim mengalami kenaikan.** Rasio nominal penarikan UTLE terhadap inflow pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar 13,58%, atau lebih rendah dibandingkan dengan triwulan III 2025 yang tercatat sebesar 58,74%. Peningkatan nominal penarikan UTLE 2025 menunjukkan upaya optimalisasi distribusi uang layak edar untuk mendukung kelancaran transaksi di Provinsi Kaltim (Grafik V.31).

**Grafik V.31 Penarikan Uang Tidak Layak Edar terhadap Inflow di Provinsi Kaltim**



Sumber: Bank Indonesia, diolah



*Halaman ini sengaja dikosongkan*

# 06

## Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan





“

- Kondisi ketenagakerjaan mengalami penurunan didorong oleh penurunan penyerapan tenaga kerja di sektor utama di tengah kinerja ekonomi yang meningkat di triwulan IV, hal ini mengindikasikan adanya pergeseran tenaga kerja ke sektor padat modal. Sejalan dengan kondisi tersebut, kontribusi terbesar pertumbuhan ekonomi juga berasal dari industri pengolahan.
- Namun demikian, tingkat kesejahteraan masyarakat tetap membaik yang terindikasi dari penurunan jumlah penduduk miskin, ketimpangan pendapatan yang semakin rendah, serta peningkatan kesejahteraan petani.

### 6.1. GAMBARAN UMUM

Kondisi ketenagakerjaan Kaltim mengalami penurunan di tengah peningkatan pertumbuhan ekonomi di triwulan IV 2025. Meskipun pertumbuhan ekonomi di triwulan IV mengalami peningkatan, utamanya dari sektor industri pengolahan, hal ini tidak berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja di Kalimantan Timur. Hal tersebut tercermin dari penurunan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) serta peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Namun demikian, kondisi kesejahteraan masyarakat menunjukkan indikator lebih baik, terindikasi dari penurunan tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan.

### 6.2. KETENAGAKERJAAN

Kinerja ekonomi Kalimantan Timur yang mengalami peningkatan di triwulan IV tidak berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kaltim pada November 2025 sebesar 5,20%, sedikit meningkat dari TPT pada Agustus 2025 yang sebesar 5,18%. Peningkatan TPT tersebut didorong oleh peningkatan jumlah angkatan kerja menganggur yang lebih tinggi dibanding pertumbuhan jumlah angkatan kerja yang aktif bekerja. Jumlah angkatan kerja menganggur tumbuh sebesar 0,61% (yoy), sedangkan angkatan kerja yang aktif bekerja menurun yaitu 0,29%

(yoy) (Tabel VI.1). Hal ini turut mendorong TPT Kalimantan Timur yang menjadi provinsi dengan angka TPT tertinggi (Grafik VI.1).

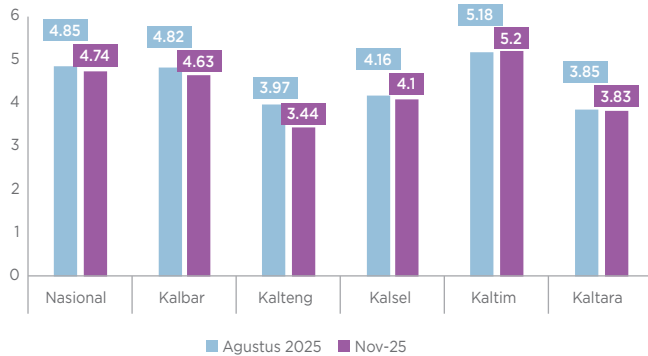
**Peningkatan TPT tidak terlepas dari penurunan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) akibat penurunan penyerapan tenaga kerja di beberapa sektor.** Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kalimantan Timur pada Agustus 2025 tumbuh 66,08%, lebih rendah dibandingkan dengan TPAC di Agustus 2025, yakni 66,58% (Tabel VI.1). Jika dilihat berdasarkan lapangan usahanya, LU Industri Perdagangan Besar dan LU Industri Pertanian menjadi sektor yang mengalami penurunan penyerapan tenaga kerja terbesar. Meskipun LU Industri Pengolahan mengalami peningkatan di triwulan IV, hal ini tidak berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja industri pengolahan yang justru mengalami penurunan sebesar 7,31% (yoy). Hal tersebut tidak terlepas dari ekspansi berbagai perusahaan manufaktur yang sejalan dengan pertumbuhan PDRB lapangan usaha industri pengolahan di tahun 2025 yang relatif tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa industri pengolahan memiliki pergeseran faktor produksi yang lebih terarah ke industri padat modal (Tabel VI.2). Adapun jika dibandingkan dengan wilayah Kalimantan, TPAC Kaltim merupakan terendah diantara provinsi lainnya di wilayah Kalimantan (Grafik VI.2). Hal ini mengindikasikan bahwa penyerapan tenaga kerja di Kaltim lebih banyak didorong oleh sektor yang padat modal sehingga penyerapan tenaga kerja menjadi kurang optimal.

Tabel VI.1 Angkatan Kerja dan Pengangguran Kaltim

Kondisi Ketenagakerjaan	Agustus 2025	November 2025	Pertumbuhan	
			Orang	%
A. Jumlah Penduduk 15+	3.120.112	3.146.621	26.509	0,85
B. Jumlah Angkatan Kerja	2.077.413	2.079.441	2.028	0,10
B.1 Jumlah Bekerja	1.969.739	1.971.374	1.635	0,08
B.1 Jumlah Penganggur	107.674	108.067	393	0,36
C. Bukan Angkatan Kerja	1.042.699	1.067.180	24.481	2,35
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja = (TPAK=[B/A]X100%)	66,58	66,08		▼
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT=[B.2/B]X100%)	5,18	5,20		▲

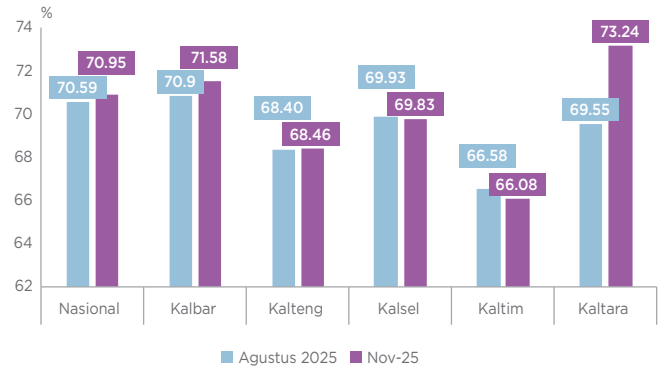
Sumber : BPS, diolah

**Grafik VI.1 Perbandingan TPT Kaltim dan Provinsi Lainnya di Kalimantan**



Sumber: BPS, diolah

**Grafik VI.2 Perbandingan TPAK Kaltim dan Provinsi Lainnya di Kalimantan**



Sumber: BPS, diolah

**Tabel VI.2 Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha**

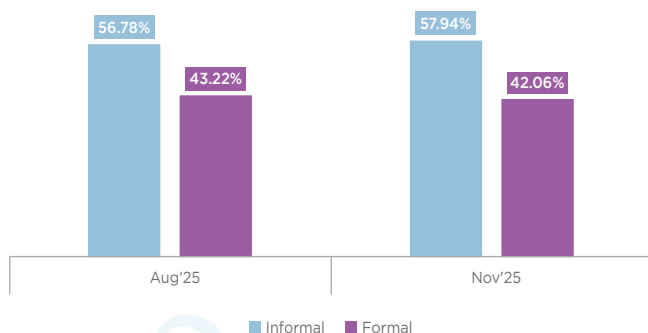
Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha	Agustus 2024	Agustus 2025	November 2025	Pertumbuhan		Pangsa
				Orang	%	%
Pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan	352.381	352.953	304.686	(48.267)	-13,68	15,46%
Pertambangan dan penggalian	168.391	169.202	156.833	(12.369)	-7,31	7,96%
Industri Pengolahan	138.773	140.936	133.969	(6.967)	-4,94	6,80%
Konstruksi	147.736	140.113	141.169	1.056	0,75	7,16%
Perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel	547.455	539.206	362.368	(176.838)	-32,80	18,38%
Transportasi dan pergudangan	126.036	118.482	123.387	4.905	4,14	6,26%
Administrasi Pemerintahan	121.846	115.887	135.747	19.860	17,14	6,89%
Jasa Perusahaan, Pendidikan, Kesehatan, dan Jasa Lainnya	310.143	325.639	539.078	213.439	65,54	27,35%
Lainnya	63.686	67.321	74.137	6.816	10,12	3,76%
<b>Total</b>	<b>1976447</b>	<b>1969739</b>	<b>1971374</b>	<b>100.375</b>	<b>0,08</b>	<b>100,00%</b>

Sumber : BPS, diolah

Pada bulan November 2025, penyerapan tenaga kerja sektor formal lebih besar dibandingkan dengan tenaga kerja sektor informal. Berdasarkan data dari BPS Provinsi Kaltim, persentase tenaga kerja yang bekerja di sektor formal pada bulan November 2025 mencapai 57,94%, lebih tinggi dibandingkan dengan tenaga kerja yang bekerja

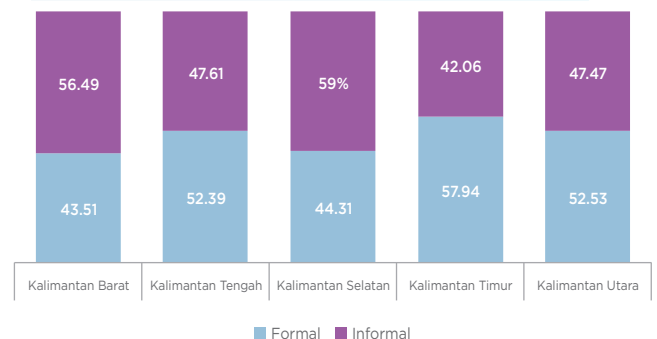
di sektor formal sebesar 42,06% (Grafik VI.3). *Share* pekerja di sektor formal di tahun 2025 tersebut meningkat dibandingkan periode Agustus 2025 yang sebesar 56,78%. Hal tersebut sejalan dengan peningkatan pekerja di sektor administrasi pemerintahan. Sejalan dengan hal tersebut, jika dibandingkan dengan provinsi

**Grafik VI.3 Tenaga Kerja Kaltim Berdasarkan Sektor Formal dan Informal**



Sumber: BPS, diolah

**Grafik VI.4 Perbandingan Proporsi Tenaga Kerja Formal dan Informal Seluruh Provinsi di Kalimantan**



Sumber: BPS, diolah

Tabel VI.3 Penduduk Yang Bekerja Berdasarkan Lapangan Usaha Kaltim

Penduduk Yang Bekerja Menurut Status Usaha	Agustus 2025	November 2025	Pertumbuhan		Pangsa
			Orang	%	%
Berusaha Sendiri	382.250,00	360.177,00	(22.073)	-1,14	18,22%
Berusaha dibantu buruh tidak tetap	191.514,00	202.126,00	10.612	0,53	10,23%
Berusaha dibantu buruh tetap	77.751,00	76.545,00	(1.206)	-0,06	3,87%
Buruh/Karyawan	1.040.732,00	1.065.658,00	24.926	1,22	53,92%
Pekerja bebas di pertanian	29.055,00	23.155,00	(5.900)	-0,30	1,17%
Pekerja bebas di non pertanian	71.248,00	90.447,00	19.199	0,97	4,58%
Pekerja keluarga/tak dibayar	177.189,00	153.266,00	(23.923)	-1,22	7,75%
<b>Total</b>	<b>1.969.739</b>	<b>1.971.374</b>	<b>1635</b>	<b>0,08</b>	<b>100%</b>

Sumber : BPS, diolah

lain di Kalimantan, proporsi pekerja formal di Kalimantan Timur merupakan yang tertinggi di antara Kalimantan lainnya (Grafik VI.4). Lebih lanjut, proporsi tenaga kerja informal Kalimantan Timur menunjukkan penurunan jika dibandingkan pada periode Agustus 2024 yang sebesar 57,68% (Tabel VI.3).

### 6.3. KESEJAHTERAAN

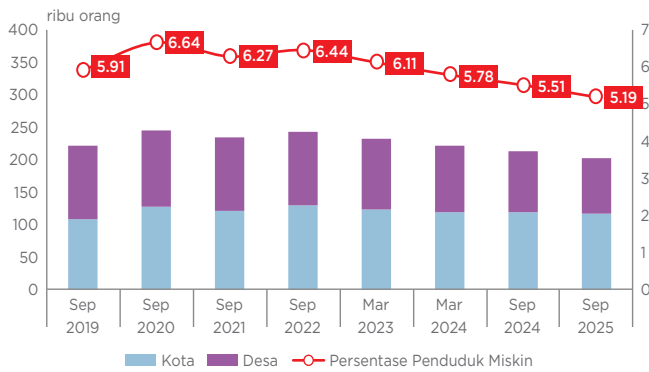
**Kondisi ketenagakerjaan yang menurun, turut memberikan dampak pada kesejahteraan masyarakat.** Hal tersebut yang terlihat dari peningkatan jumlah penduduk miskin baik di perkotaan maupun pedesaan. Jumlah penduduk miskin di Kaltim pada September 2025 tercatat sebanyak 202,04 ribu orang, dimana 58% di antaranya atau sebanyak 116,95 ribu orang di perkotaan dan 42% lainnya atau sebanyak 85,09 ribu orang berada di pedesaan. Sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk miskin tersebut, tingkat kemiskinan di Kaltim pada September 2025 juga tercatat lebih tinggi, yakni dari sebesar 5,17% pada Maret 2025 menjadi 5,19% pada September 2025 (Grafik VI.5). Namun demikian, ketimpangan pendapatan di Kalimantan Timur relatif konstan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hal tersebut tercermin dari rasio gini<sup>4</sup> Kalimantan Timur yang mencatatkan angka

0,310 pada September 2024 menjadi 0,310 pada September 2025. Angka tersebut juga relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan rasio gini nasional yang pada periode laporan tercatat sebesar 0,363. Meskipun demikian, rasio gini Kaltim tercatat mencatatkan urutan pertama di Kalimantan jika dibandingkan dengan provinsi lain di wilayah Kalimantan (Grafik VI.6). Dengan derajat ketimpangan yang cukup tinggi di wilayah Kalimantan dan cenderung tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan yang meningkat dan TPAK yang menurun turut menjadi faktor dalam faktor ketimpangan penduduk di Kalimantan Timur.

**Di sisi lain, Garis Kemiskinan (GK) mengalami peningkatan.** Garis Kemiskinan di Kaltim pada periode September 2025 tercatat sebesar Rp897.759/kapita/bulan, meningkat 5,12% (yoy) dibandingkan periode September di tahun sebelumnya yakni sebesar Rp853.997/kapita/bulan. Peningkatan garis kemiskinan tersebut terjadi baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Peningkatan GK di wilayah perkotaan mencapai sebesar 4,45% (yoy), lebih tinggi dibandingkan wilayah pedesaan yang meningkat sebesar 2,54% (yoy) (Grafik VI.7). Berdasarkan komponennya, peningkatan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) lebih tinggi dibandingkan

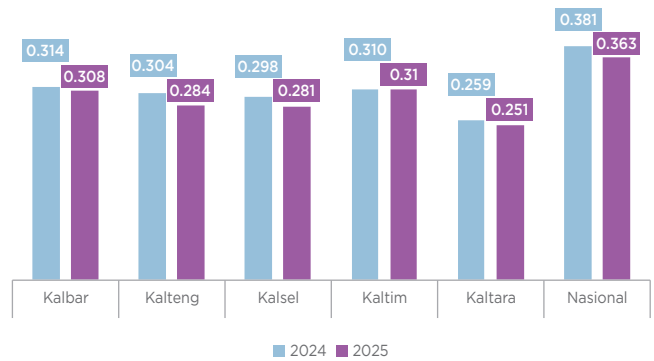
4. Rasio gini menunjukkan ketimpangan pendapatan di sebuah wilayah. Sebuah wilayah dikategorikan mengalami ketimpangan pendapatan ketika angka rasio gini mendekati 1. Sebaliknya, semakin mendekati 0 maka perbedaan pendapatan antara golongan berpendapatan tertinggi dan terendah semakin kecil.

Grafik VI.5 Jumlah Penduduk Miskin Kalimantan Timur



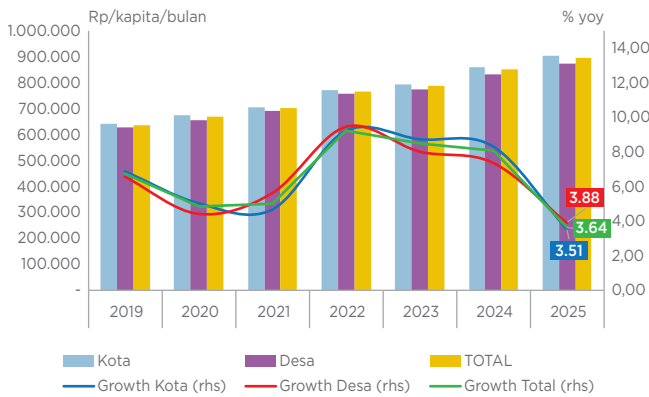
Sumber: BPS, diolah

Grafik VI.6 Perbandingan Rasio Gini Seluruh Provinsi di Kalimantan



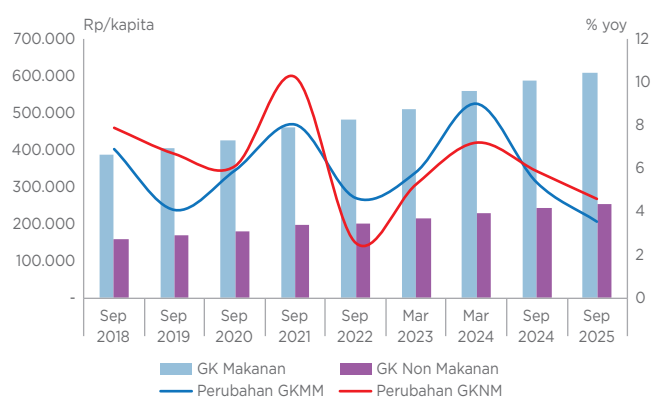
Sumber: BPS, diolah

Grafik VI.7 Garis Kemiskinan Kalimantan Timur



Sumber: BPS, diolah

Grafik VI.8 Pertumbuhan GKM dan GKNM



Sumber: BPS, diolah

Garis Kemiskinan Makanan (GKM), dimana GKNM meningkat sebesar 4,61% (yoy) atau dari Rp243.384/kapita/bulan menjadi Rp254.609/kapita/bulan, sementara GKM meningkat sebesar 3,56% (yoy) atau dari Rp590.571/kapita/bulan menjadi Rp611.584/kapita/bulan (Grafik VI.8).

**Komoditas terbesar penyumbang peningkatan GKM di perkotaan dan perdesaan adalah komoditas beras dan rokok kretek filter, sementara itu, komoditas non makanan terbesar adalah perumahan, bensin, dan listrik.** Komoditas beras merupakan penyumbang terbesar GKM di perkotaan dan perdesaan masing masing sebesar 17,17% dan 21,28%. Hal tersebut tidak terlepas dari besarnya kebutuhan akan beras sebagai makanan pokok masyarakat Kalimantan Timur.

Selain itu, rokok kretek filter menjadi komoditas penyumbang GKM makanan terbesar kedua setelah beras, baik di perkotaan (bobot 12,78%), maupun perdesaan (bobot 13,86%) (Tabel VI.4). Sama seperti beras, kontribusi rokok sebagai komoditas GKM sejalan dengan tingginya konsumsi rokok di tengah harganya yang semakin meningkat seiring peningkatan harga karena adanya gangguan distribusi. Sementara itu, komoditas utama penyumbang GKNM adalah perumahan sebesar 10,80% di perkotaan dan 12,43% di perdesaan, diikuti bensin sebesar 3,62% di perkotaan dan 3,84% di perdesaan, serta listrik sebesar 3,38% di perkotaan dan 2,51% di perdesaan, yang merupakan bagian dari kebutuhan dasar masyarakat (Tabel VI.5).

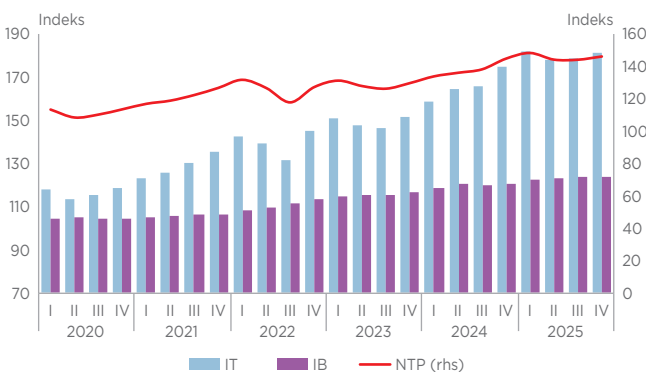
Tabel VI.4 Persentase Komoditas Makanan terhadap GKM

Perkotaan		Pedesaan	
Komoditi Makanan	%	Komoditi Makanan	%
Beras	17,17	Beras	21,28
Rokok kretek filter	12,78	Rokok kretek filter	13,86
Daging ayam ras	5,12	Telur ayam ras	4,59
Telur ayam ras	4,61	Daging ayam ras	4,25
Mie instan	2,47	Mie instan	3,09
Tongkol/tuna/cakalang	2,36	Kopi bubuk & kopi instan (sachet)	2,13
Kue basah	2,06	Gula pasir	1,91
Kopi bubuk & kopi instan (sachet)	1,92	Kue kering/biskuit	1,68
Bawang merah	1,86	Bawang merah	1,68
Gula pasir	1,82	Tongkol/tuna/cakalang	1,67
Tempe	1,74	Tempe	1,54
Tahu	1,64	Cabe rawit	1,48
Kue kering/biskuit	1,49	Kembung	1,45

Sumber: BPS, diolah

Tingkat kesejahteraan petani mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya dan lebih tinggi dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. NTP Kaltim pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar 146,71 lebih tinggi dibandingkan dengan periode sebelumnya yang sebesar 144,68. Peningkatan NTP disebabkan karena Indeks Harga yang Diterima Petani (It) naik menjadi 181,70, sebaliknya Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) sebesar 123,85 persen (Grafik VI.9).

Grafik VI.9 Perkembangan NTP, IT, dan IB Kaltim



Sumber: BPS, diolah

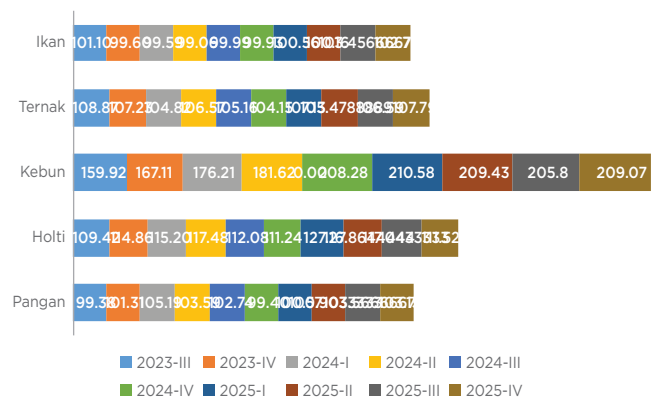
Tabel VI.5 Persentase Komoditas Nonmakanan terhadap GKNM

Perkotaan		Pedesaan	
Komoditi Makanan	%	Komoditi Makanan	%
Perumahan	10,80	Perumahan	12,43
Bensin	3,62	Bensin	3,84
Listrik	3,38	Listrik	2,51
Pendidikan	2,23	Pendidikan	1,26
Air	1,75	Perlengkapan mandi	1,26
Perlengkapan mandi	1,43	Sabun cuci	0,96
Perawatan kulit, muka, kuku, tambut	0,73	Air	0,83
Kesehatan	0,72	Pajak kendaraan bermotor	0,72
Perumahan	10,80	Perumahan	12,43

Sumber: BPS, diolah

Jika ditinjau NTP berdasarkan sub lapangan usaha, penurunan NTP terbesar bersumber dari sub lapangan usaha tanaman perkebunan. NTP pada sub lapangan usaha tanaman pangan pada triwulan IV 2025 tercatat secara berturut turut sebesar 211,31 lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang masing masing tercatat sebesar 201,09 (Grafik VI.10). Peningkatan tersebut tidak terlepas dari kenaikan harga komoditas sawit yang mengalami kenaikan pada awal triwulan IV sehingga komoditas yang dibayarkan ke petani cenderung lebih tinggi.

Grafik VI.10 Perkembangan NTP Sub Sektor Pertanian



Sumber: BPS, diolah



*Halaman ini sengaja dikosongkan*

# 07

## Prospek Perekonomian Daerah





“

- Dinamika perekonomian global dan domestik diwarnai oleh meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global serta divergensi pertumbuhan antarnegara.
- Perekonomian Kaltim di tahun 2026 diperkirakan terakselerasi pada kisaran 4,50 - 5,30% (yoy), seiring dengan akselerasi pembangunan IKN, industri hilirisasi CPO yang semakin ekspansif serta mulai beroperasinya sejumlah pabrik *refinery* di Kalimantan Timur
- Inflasi tahunan Kaltim di tahun 2026 diperkirakan tetap berada dalam koridor target dikisaran  $2,5\pm 1\%$  (yoy) seiring masih terkendalinya dampak inflasi global dan nilai tukar Rupiah, serta upaya pengendalian inflasi yang konsisten dan intensif untuk mencapai stabilitas harga komoditas utama di Kaltim.

## 7.1. PROSPEK PERTUMBUHAN EKONOMI

### Prospek Perekonomian Global dan Domestik

Ketidakpastian pasar keuangan global diperkirakan tetap tinggi di tengah tren perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia dan divergensi kinerja antarnegara. Pertumbuhan ekonomi global pada 2026 diperkirakan melambat dari 3,3% menjadi 3,2%, terutama dipengaruhi dampak tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) serta berlanjutnya tensi geopolitik. Disisi lain, perekonomian AS diperkirakan relatif meningkat ditopang stimulus fiskal dan investasi yang tetap kuat, termasuk investasi terkait *artificial intelligence* (AI). Sementara itu, Eropa dan Jepang diperkirakan melambat seiring kinerja ekspor yang menurun dan permintaan domestik yang belum kuat, meski didukung kenaikan investasi AI. Ekonomi Tiongkok juga tetap dalam tren melambat akibat konsumsi rumah tangga yang belum kuat, sedangkan India diperkirakan belum menguat dipengaruhi penurunan permintaan domestik dan kinerja sektor eksternal (Tabel VII.1).

Perekonomian Indonesia menunjukkan kinerja yang semakin menguat dan terus didorong agar tumbuh lebih tinggi dan berdaya tahan. Pertumbuhan ekonomi domestik sepanjang 2025 tetap terjaga, ditopang oleh permintaan domestik,

baik konsumsi rumah tangga maupun investasi, sejalan dengan dampak positif berbagai stimulus kebijakan Pemerintah dan bauran kebijakan Bank Indonesia. Namun ke depan, dinamika global dan ketidakpastian global yang masih tinggi berpotensi menahan akselerasi pertumbuhan yang lebih tinggi. Kendati demikian, sinergi kebijakan pemerintah dan bauran kebijakan Bank Indonesia yang tetap akomodatif diperkirakan mampu menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, antara lain melalui dukungan kebijakan terkait pembiayaan ekonomi, percepatan digitalisasi, hilirisasi dan penguatan ketahanan pangan. Prospek permintaan domestik diperkirakan semakin baik, tercermin dari membaiknya Indeks ekspektasi konsumen 6 bulan ke depan dari 133,35 di bulan Oktober 2025 menjadi 138,80 di bulan Januari 2026. Selain itu, *prompt manufacturing index* (PMI) juga diperkirakan masih ekspansif sebesar 51,20% pada triwulan I 2026, meskipun sedikit melambat dari triwulan IV 2025 sebesar 51,36%. Sejalan dengan perkiraan permintaan domestik dan efektivitas stimulus fiskal, Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh pada tahun 2026 meningkat dalam kisaran 4,90 - 5,70% (yoy) (Tabel VII.1).

Tabel VII.1 Proyeksi Pertumbuhan Global dan Domestik

Insitusi	PDB Global (% , yoy)			
	2024	2025*	2026*	
Dunia	3,3	3,3	3,2	➔
Negara Maju	1,8	1,8	1,8	➔
Amerika Serikat	2,8	2,2	2,3	➔
Kawasan Eropa	0,9	1,5	1,3	➔
Jepang	0,1	1,1	0,8	➔
Negara Berkembang	4,3	4,3	4,1	➔
Tiongkok	5,0	5,0	4,4	➔
India	6,5	7,4	6,8	⬇️
ASEAN 5	4,6	4,4	4,3	➔
Amerika Latin	2,4	2,2	2,2	➔
Negara Berkembang Eropa	3,4	2,1	2,4	➔
Timur Tengah & Asia Tengah	2,4	3,5	3,8	➔

Sumber: World Economic Outlook, \*Estimasi BI Februari 2026

Insitusi	PDB Nasional (% , yoy)			
	2025	2026*		
Anggaran	5,2	5,4		⬆️
Bank Indonesia	4,7-5,5	4,9-5,7		⬆️
Konsensus (Des 2026)	4,8	5,1		➔
IMF (WEO, Jan 2025)	4,7	5,0		➔
ADB (Des 2025)	5,0	5,2		➔

Keterangan:

⬆️ Naik dari prakiraan sebelumnya

➔ Tetap / on track

⬇️ Turun dari prakiraan sebelumnya

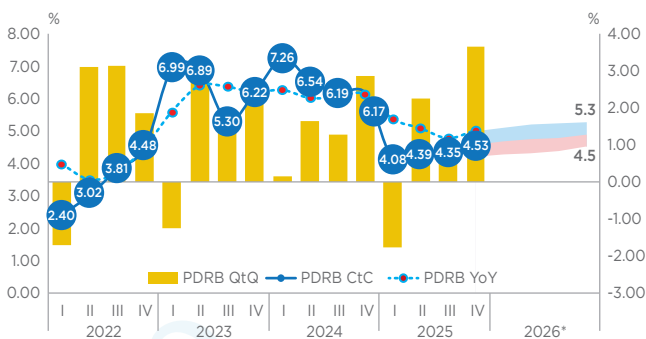
Prospek Perekonomian Kaltim

Dihadapkan pada berbagai tantangan divergensi ekonomi global dan dinamika perkembangan sektoral, prospek perekonomian Kaltim pada tahun 2026 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dalam kisaran 4,50% - 5,30% (yoy) (Grafik VII.1). Mempertimbangkan berbagai faktor pendorong dan faktor penahan yang ada, dan kinerja ekonomi Kaltim sampai dengan akhir 2025, diperkirakan pertumbuhan ekonomi Kaltim akan terakselerasi dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut utamanya didorong oleh LU Konstruksi yang sempat berkontraksi pada 2025 dan diperkirakan kembali tumbuh seiring dengan pembangunan IKN sejalan dengan peningkatan alokasi anggaran. Selain itu, kinerja Industri Pengolahan diperkirakan akan membaik, antara lain ditopang oleh ekspansi industri CPO serta mulai beroperasinya sejumlah pabrik *refinery* di Kalimantan Timur, yang turut memperkuat nilai tambah dan struktur industri daerah. Namun demikian, akselerasi pertumbuhan diperkirakan tertahan oleh moderasi kinerja LU Pertambangan dan Penggalian. Hal tersebut tercermin dari rencana RKAB tahun 2026 yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sejalan dengan pembatasan kuota dari Kementerian ESDM. Permintaan batu bara juga diperkirakan tertahan akibat wacana pengenaan bea ekspor yang berpotensi menurunkan daya saing harga batu bara Kalimantan, serta optimalisasi produksi dalam negeri dan transisi menuju energi terbarukan di Tiongkok dan India, di tengah dinamika perang tarif dagang dengan AS.

LU konstruksi diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya seiring dengan pembangunan IKN dan beberapa proyek pembangunan di Kalimantan Timur. Sepanjang tahun 2026, LU konstruksi diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya seiring dimulainya pembangunan beberapa proyek baru, diantaranya pembangunan ekosistem Gedung Yudikatif dan Legislatif IKN dengan estimasi nilai mencapai Rp26,1 triliun. Pembangunan IKN diperkirakan lebih masif seiring dengan peningkatan kebutuhan anggaran IKN tahun 2026 yang tumbuh 11,75% (yoy), lebih tinggi dibandingkan tahun 2025 yang berkontraksi 42,2% (yoy). Selain itu, berlanjutnya pembangunan sejumlah proyek konstruksi, hilirisasi ayam, serta proyek pembangunan pengolahan limbah air garam menjadi garam industri juga menjadi faktor pendorong akselerasi pertumbuhan LU konstruksi. Selain itu, faktor *high baseline effect* di tahun 2025 yang mengalami kontraksi, menyebabkan LU konstruksi diperkirakan akan menjadi penopang pertumbuhan tahun 2026.

LU Industri Pengolahan diperkirakan tetap tumbuh meskipun sedikit melambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya didorong oleh industri hilirisasi CPO yang semakin ekspansif serta mulai beroperasinya sejumlah pabrik *refinery* di Kalimantan Timur. Perlambatan terutama dipengaruhi oleh faktor *high baseline* industri migas pada 2025 seiring peningkatan kapasitas RDMP RU V Balikpapan, termasuk tambahan kapasitas *crude oil*, peningkatan produksi BBM dan LPG, serta tambahan produksi petrokimia di akhir 2025. Namun demikian, kinerja industri pengolahan secara keseluruhan tahun diperkirakan akan tetap tumbuh seiring berlanjutnya peningkatan kapasitas dan utilisasi kilang RDMP RU V yang direncanakan mencapai kapasitas optimal pada 2026, termasuk tambahan kapasitas pengolahan *crude oil*, BBM, LPG, dan produk petrokimia lanjutan. Selain itu, peningkatan produksi gas yang telah *onstream* turut memperkuat pasokan bahan baku industri turunan migas. Di sisi nonmigas, perbaikan produksi TBS dan CPO sejalan dengan kondisi cuaca yang lebih kondusif, serta akselerasi

Grafik VII.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kaltim 2026



hilirisasi komoditas seperti ferronickel dan smelter nikel, juga menjadi faktor yang menopang pertumbuhan industri pengolahan secara lebih berkelanjutan.

**Akselerasi pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur pada 2026 diperkirakan masih tertahan oleh kontraksi pada LU Pertambangan dan Penggalian, khususnya sektor batu bara.** Penurunan permintaan ekspor dari negara mitra strategis utama seperti Tiongkok dan India tetap menjadi tantangan utama. Permintaan ekspor batu bara ke kedua negara tersebut turun signifikan sepanjang 2025, seiring dengan lemahnya permintaan energi di China dan upaya substitusi impor di India yang mengoptimalkan produksi dalam negeri. Selain itu, industri batubara menghadapi tekanan struktural dengan meningkatnya kapasitas produksi domestik di negara importir dan kebutuhan dunia yang diproyeksikan stagnan hingga menurun, sejalan dengan tren transisi energi ke sumber yang lebih bersih di berbagai negara. Hal ini turut menekan volume perdagangan dan harga komoditas batubara global. Meski demikian, perlambatan lebih dalam tertahan oleh peningkatan target produksi sejumlah pelaku usaha dan permintaan domestik Indonesia yang relatif masih tinggi.

**7.2. PROSPEK INFLASI**

Nilai tukar Rupiah diperkirakan akan stabil dan cenderung menguat, sejalan dengan langkah stabilisasi yang terus diperkuat serta dukungan fundamental ekonomi Indonesia yang solid. Dampak tekanan geopolitik dan fragmentasi perdagangan global terhadap nilai tukar dan inflasi di domestik diperkirakan relatif terbatas. Bank Indonesia memandang nilai tukar Rupiah saat ini berada pada level yang *undervalued* dibandingkan kondisi fundamental, termasuk konsistensi dengan pengendalian inflasi pada sasaran 2,5±1% untuk 2026. Stabilitas Rupiah didukung oleh imbal hasil domestik yang tetap menarik, inflasi yang rendah, serta prospek pertumbuhan ekonomi yang meningkat.

**Tabel VII.2 Proyeksi Inflasi Global dan Domestik**

Insitusi	Inflasi (% , yoy)		
	2025	2026*	
Anggaran	2,5	2,5	➔
Bank Indonesia	2,5±1	2,5±1	➔
IMF (WEO, Oktober 2025)	1,8	2,5	↗
ADB (September 2025)	1,7	2,0	➔

Sumber: World Economic Outlook, \* Estimasi Februari 2026

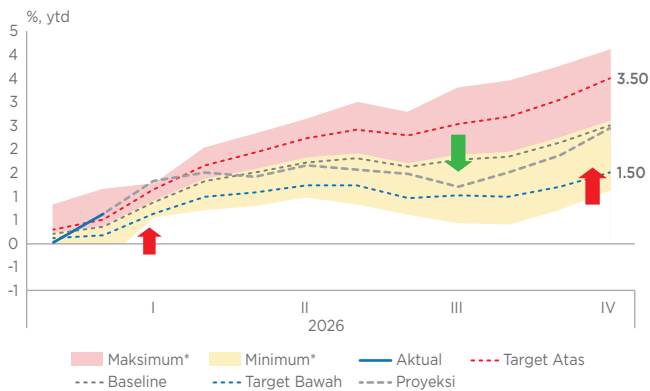
Keterangan:

- ↗ Naik dari prakiraan sebelumnya
- ➔ Tetap / on-track
- ↘ Turun dari prakiraan sebelumnya

Ketahanan eksternal juga terjaga, tercermin dari kinerja Neraca Pembayaran Indonesia yang solid dan aliran modal yang berlangsung selektif. Di sisi lain, sinergi Tim Pengendalian Inflasi Pusat/ Daerah (TPIP/TPID) melalui akselerasi digitalisasi dan penguatan implementasi program ketahanan pangan nasional turut memperkuat stabilitas harga pangan, khususnya inflasi *volatile food*. Terkendalnya dampak rambatan global terhadap inflasi dan nilai tukar tercermin dari proyeksi inflasi di 2026 yang tetap rendah (Tabel VII).

**Inflasi Provinsi Kaltim untuk keseluruhan 2026 diperkirakan terkendali dalam kisaran target, namun lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Grafik VII.2).** Tingkat inflasi yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya terjadi seiring dengan meningkatnya tekanan inflasi kelompok *core inflation*, utamanya didorong oleh peningkatan harga emas perhiasan yang dipengaruhi oleh ketidakpastian pasar keuangan global, serta kelompok VF (aneka cabai, komoditas hortikultura) yang dipengaruhi oleh prakiraan kondisi cuaca yang tidak stabil pada daerah sentra (khususnya Jawa Timur dan Sulawesi) maupun Kalimantan Timur. Selain itu, tekanan pada kelompok AP diperkirakan turut mengalami peningkatan dikarenakan *low base effect* adanya diskon tarif listrik di awal tahun 2025, potensi kenaikan harga minyak dunia akibat konflik geopolitik, serta peningkatan harga eceran sigaret kretek mesin. Di sisi lain, untuk menekan laju inflasi, dilakukan optimalisasi upaya pengendalian inflasi oleh TPID dan pelaksanaan

Grafik VII.2 Proyeksi Inflasi Kaltim 2026



Keterangan:  
\*) berdasarkan historis 5 tahun terakhir

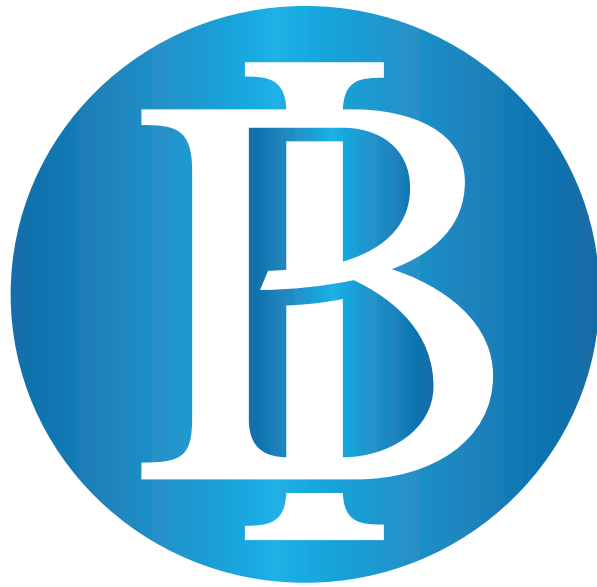
program strategis Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) tahun 2026 turut mendorong tercapainya stabilitas harga di tahun ini seperti masifnya Gerakan Pangan Murah (GPM) dan peningkatan KAD yang menekan laju kenaikan harga lebih tinggi.

**Dalam upaya mencapai sasaran inflasi 2026 dan mengantisipasi potensi inflasi ke depan, berbagai inovasi dan kebijakan pengendalian inflasi di Kaltim terus diimplementasikan secara masif dan konsisten oleh TPID Kaltim.** Beberapa program kerja TPID yang dilakukan secara berkelanjutan untuk menjaga kestabilan inflasi yang rendah dan stabil terutama bahan pangan strategis dalam kerangka GPIPS diantaranya sebagai berikut:

- i. Untuk menjaga **ketersediaan pasokan**, dapat dilakukan dengan melanjutkan pemantauan dan monitoring harga serta sidak pasar, terutama pada komoditas yang berpotensi mengalami kenaikan, seperti aneka cabai, bawang merah, dan perikanan. Selanjutnya, mendorong implementasi penggunaan bibit unggul dan optimalisasi teknologi untuk meningkatkan produktivitas komoditas strategis meliputi beras, aneka cabai dan bawang merah, melakukan penguatan data neraca pangan Provinsi Kaltim dalam rangka peningkatan efektivitas pengelolaan pasokan termasuk program KAD dengan daerah

sentra. Dan terakhir, melakukan penguatan data neraca pangan Provinsi Kaltim dalam rangka peningkatan efektivitas pengelolaan pasokan termasuk program KAD dengan daerah sentra.

- ii. Guna menciptakan **keterjangkauan harga**, dapat dilakukan melalui GPM seperti Operasi Pasar, Sidak Pasar khususnya untuk komoditas strategis dengan tetap memperhatikan margin keuntungan yang wajar bagi petani dalam rangka mendukung keberlanjutan usaha tani. Selanjutnya, optimalisasi peran tim teknis TPID dalam melakukan pemantauan harga dan ketersediaan pasokan melalui Tim *Early Warning System* (EWS) Kaltim. Terakhir, melakukan penyusunan rencana pengendalian inflasi baik skenario peningkatan harga maupun penurunan harga, dalam rangka menjaga laju inflasi dalam kisaran target  $2,5 \pm 1\%$  (yoy).
- iii. Dalam rangka memastikan **kelancaran distribusi**, TPID dapat dilakukan dengan melanjutkan pemantauan kelancaran jalur jalur distribusi utama baik dari ketersediaan bahan bakar dan kesiapan infrastruktur jalan maupun ketersediaan bahan bakar.
- iv. Dalam rangka memperkuat **komunikasi efektif**, perlu menjaga konsistensi dan kesinambungan pelaksanaan koordinasi melalui *High Level Meeting* maupun koordinasi secara berkala dan konsisten dalam rangka *monitoring* dan evaluasi program pengendalian inflasi termasuk keterlibatan Forkopimda. Selanjutnya, melakukan sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat bahwa penting untuk bijak berbelanja dan mendorong gerakan tanam di pekarangan rumah untuk komoditas penyumbang inflasi, utamanya melalui *platform media social*. Dan terakhir, optimalisasi peran kepala daerah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk menjaga ekspektasi dan belanja masyarakat.



*Halaman ini sengaja dikosongkan*



## **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Rencana keuangan tahunan Pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

## **Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

## **Dana Alokasi Umum (DAU)**

Merupakan salah satu transfer dana Pemerintah kepada Pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

## **Dana Bagi Hasil (DBH)**

Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

## **Dana Perimbangan**

Sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah.

Dana Pihak Ketiga (DPK).

Dana yang dihimpun perbankan dari masyarakat, yang berupa giro, tabungan atau deposito.

## **Ekspor-Impor**

Dalam konteks PDRB adalah mencakup perdagangan barang dan jasa antar negara dan antar provinsi.

## **Indeks Harga Konsumen (IHK)**

Sebuah indeks yang merupakan ukuran perubahan rata-rata harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat pada suatu periode tertentu.

## **Inflasi**

Kenaikan harga barang secara umum dan terus menerus (*persistent*).

## **Liaison**

Kegiatan pengumpulan data/statistik dan informasi yang bersifat kualitatif dan kuantitatif yang dilakukan secara periodik melalui wawancara langsung kepada pelaku ekonomi mengenai perkembangan dan arah kegiatan ekonomi dengan cara yang sistematis dan didokumentasikan dalam bentuk laporan.

## **Month to Month (mtm)**

Perbandingan antara data satu bulan dengan bulan sebelumnya.

## **Non-Performing Loan (NPL)**

Kredit/pembiayaan yang bermasalah atau nonlancar yang terdiri dari kredit dengan klasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet berdasarkan ketentuan Bank Indonesia tentang kualitas aktiva produktif.

**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi suatu daerah seperti hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.

**Pertumbuhan Ekonomi**

Perubahan nilai PDRB atas harga konstan dalam suatu periode tertentu (triwulanan atau tahunan).

**Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Pendapatan suatu daerah yang mencerminkan hasil kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah tertentu.

**Year on Year (yoy)**

Perbandingan antara data satu tahun dengan tahun sebelumnya.



# Tim Penyusun Laporan

## **Penanggung Jawab:**

Jajang Hermawan - Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltim

## **Editor:**

Bayuadi Hardiyanto - Deputi Kepala Perwakilan Kantor Perwakilan BI Provinsi Kaltim

Azhari Novy Sucipto - Ekonom Senior Kantor Perwakilan BI Provinsi Kaltim

## **Tim Penulis:**

- **Bab I - Perkembangan Makro Ekonomi Daerah**

Bagoes Fikri Heikhal Erwin Syachrannie - Ekonom Yuniior Kantor Perwakilan BI Provinsi Kaltim

- **Bab II - Keuangan Pemerintah di Daerah**

Rama Sumanta - Analis Yuniior Kantor Perwakilan BI Balikpapan

- **Bab III - Perkembangan Inflasi Daerah**

Rosa Diwanegara - Ekonom Yuniior Kantor Perwakilan BI Provinsi Kaltim

- **Bab IV - IV. Pembiayaan Daerah Serta Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM**

Shindy Almandasari - Ekonom Yuniior Kantor Perwakilan BI Provinsi Kaltim

- **Bab V - Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah**

Fenyilia Nurshakira Putri Kusuma - Analis Yuniior Kantor Perwakilan BI Provinsi Kaltim

- **Bab VI - Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan**

Rosa Diwanegara - Ekonom Yuniior Kantor Perwakilan BI Provinsi Kaltim

- **Bab VII - Prospek Perekonomian Daerah**

Nindy Widianingrum - Ekonom Kantor Perwakilan BI Provinsi Kaltim

## **Tim Pengolah Data:**

- Bagoes Fikri Heikhal Erwin Syachrannie - Ekonom Yuniior Kantor Perwakilan BI Provinsi Kaltim

- Shindy Almandasari - Ekonom Yuniior Kantor Perwakilan BI Provinsi Kaltim

- Rosa Diwanegara - Ekonom Yuniior Kantor Perwakilan BI Provinsi Kaltim

- Fathia Nisa - Analis Yuniior Kantor Perwakilan BI Provinsi Kaltim

- Desy Sofita - Pelaksana Kantor Perwakilan BI Provinsi Kaltim



*Halaman ini sengaja dikosongkan*



**KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Jl. Gajah Mada No. 1 SAMARINDA 75122

Telp. 0541 -741022, Fax. 0541 -732644

[www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)

